

Laporan Kegiatan  
**Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi  
Keterbukaan Pemerintah  
(Open Government Indonesia)  
TA 2018**



# KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak/Ibu/Saudara yang saya hormati, *Open Government Partnership* adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas. Pada awal pendiriannya pada tahun 2011, OGP terdiri dari 8 negara di mana Indonesia menjadi satu dari 8 negara pemrakarsa. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2011 dideklarasikan *Open Government Indonesia* (OGI) sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap gerakan global untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka lebih partisipatif dan inovatif. Selama kurun waktu tersebut, banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mensukseskan gerakan OGI, salah satunya melalui penyusunan Rencana Aksi.

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan Organisasi Masyarakat Sipil menyusun Rencana Aksi 2018-2020. Rencana Aksi ini merupakan rencana aksi ke-lima yang disusun oleh Indonesia. Hasil evaluasi atas proses penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi sebelumnya menunjukkan adanya beberapa aspek yang perlu diperkuat untuk memastikan implementasi rencana aksi. Pertama, perlu adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat sehingga renaksi dapat dijalankan secara konsisten. Kedua, perlu penguatan sumber daya manusia untuk melakukan monev dan menjalin komunikasi lintas . Ketiga, perlu adanya sinkronisasi rencana aksi dengan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan tahunan (RKP).

Akhir kata, tahun 2018 merupakan tahun ke-7 keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Kemitraan Pemerintah Terbuka (*Open Government Partnership*). Banyak pembelajaran yang telah didapatkan, baik dari sisi substansi kebijakan maupun sisi kemitraan dan kolaborasi dengan mitra non-pemerintah. Ke depan, masih banyak ruang untuk melakukan perbaikan dari sisi substansi dan proses. Untuk itu, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara dalam membentuk pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2018.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



**Velix V. Wanggai**  
Direktur Aparatur Negara



# RINGKASAN

Pada tahun 2018 terdapat beberapa keluaran utama yang dihasilkan dari kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (*Open Government Indonesia*) yaitu (i) Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2018-2020; (ii) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi 2016-2017; dan (iii) Laporan pelaksanaan acara nasional, regional dan internasional terkait kebijakan keterbukaan pemerintah.

Penyusunan Rencana Aksi 2018-2020 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk pertemuan bilateral dan multilateral yang melibatkan K/L dan Organisasi Masyarakat Sipil. Setidaknya 41 pertemuan tatap muka dilakukan yang menghasilkan 16 komitmen yang terdiri dari 14 komitmen global dan 2 komitmen nasional yang disepakati bersama. Dari sisi substansi, selain isu-isu dari tingkat nasional, renaksi ini juga berupaya mengakomodir isu-isu global, antara lain Kepemilikan Manfaat (*Beneficial Ownership*), Keterbukaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*Open Contracting*), dan Akses terhadap Layanan Bantuan Hukum (*Access to Justice*).

Selain penyusunan rencana aksi, Pemerintah Indonesia juga terlibat aktif dalam berbagai pertemuan, baik lokal, nasional, regional maupun global. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan hadir dalam *OGP Global Summit* di Georgia. Adapun Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi ketua Delegasi Indonesia dalam *OGP Regional Meeting* di Korea Selatan.

Selain pertemuan dalam skala global dan regional tersebut, tim *Open Government Indonesia* juga terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan level nasional, diantaranya seperti Deklarasi Keterbukaan Parlemen (*Open Parliament*) di DPR RI, Acara Keterbukaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Open Contracting Expo*), FGD Peran Perempuan dalam Keterbukaan Pemerintah, *The 4th High Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing*, dan *EITI Regional Peer-Learning Session on Beneficial Ownership*.



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2 Tujuan dan Sasaran .....	<b>1</b>
<b>BAB II METODOLOGI KEGIATAN</b> .....	<b>2</b>
2.1 Ruang Lingkup Kegiatan .....	<b>2</b>
2.2 Keluaran dan Manfaat .....	<b>2</b>
<b>BAB III HASIL KEGIATAN</b> .....	<b>3</b>
3.1 Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 .....	<b>3</b>
3.2 Laporan Rencana Aksi 2016-2017 ( <i>Government Self Assessment Report 2017</i> ) .....	<b>3</b>
3.3 Keikutsertaan dalam <i>OGP Global Summit</i> di Georgia .....	<b>3</b>
3.4 Keikutsertaan dalam <i>OGP Regional Meeting</i> di Korea Selatan .....	<b>4</b>
3.5 Terlaksananya <i>Open Government Week</i> di Beberapa Daerah .....	<b>4</b>
3.6 Terlaksananya Fungsi Komunikasi dan Penjangkauan Isu Keterbukaan Pemerintah .....	<b>4</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>6</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>7</b>



# DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran I** : Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2018-2020

**Lampiran II** : *Government Self Assessment Report 2017*

**Lampiran III** : Brafaks Laporan *OGP Global Summit Georgia*

**Lampiran IV** : Brafaks Laporan *OGP Regional Meeting Korea Selatan*

**Lampiran V** : Laporan Performa Media Sosial

**Lampiran VI** : *Newsletter Open Government Indonesia*

**Lampiran VII** : Dokumentasi Kegiatan OGI



# 01

**PENDAHULUAN**



### 1.1 Latar Belakang

*Open Government Partnership* (OGP) merupakan sebuah inisiatif internasional yang diluncurkan tahun 2011 dan diinisiasi oleh 8 negara yaitu Amerika Serikat, Indonesia, Mexico, Inggris, Filipina, Brasil, Afrika Selatan, dan Tanzania. Gerakan ini bertujuan untuk menyediakan kerangka bagi pemangku kepentingan di negara anggota untuk mendorong terbangunnya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap warga;

Saat ini OGP beranggotakan 70 Negara dengan 11 negara duduk sebagai anggota *Steering Committee*, yaitu 8 negara pemrakarsa ditambah Kroasia, Georgia, dan Prancis. Sebagai salah satu pemrakarsa OGP, Indonesia secara resmi menjabat sebagai *Government Lead Chair* untuk periode Oktober 2013 – September 2014. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia, bersama Chile dan Rumania telah terpilih sebagai anggota *OGP-Government Steering Committee* periode 2015-2018;

Adapun *Open Government Indonesia* (OGI) diluncurkan pada tanggal 20 September 2011 dan merupakan bagian dari gerakan *Open Government Partnership*. Menteri PPN/Kepala Bappenas bertindak sebagai *Responsible Minister* OGI dengan didampingi oleh Menteri Luar Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan. Adapun yang menjadi *National Focal Point* adalah (i) Deputi II bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas Kantor Staf Presiden dan (ii) Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas.

Pada tahun 2018 yang merupakan tahun ke-7 keterlibatan Indonesia dalam komitmen internasional ini, Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait fokus pada penyusunan rencana aksi 2018-2020 serta keikutsertaan dalam forum-forum nasional, regional maupun global.

### 1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dilaksanakan kegiatan adalah untuk mempercepat dan memastikan kebijakan keterbukaan pemerintah (*open government*) terlaksana dengan baik, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Tersusunnya Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020;
2. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi 2016-2017;
3. Tersosialisasikannya kebijakan keterbukaan pemerintah;
4. Terlaksananya keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam forum regional dan global.



# **METODOLOGI KEGIATAN**



### 2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

1. Melakukan pertemuan dengan K/L/D dan OMS untuk menyusun rencana aksi 2018-2020;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi 2016-2017;
3. Melakukan kampanye dan sosialisasi atas kebijakan keterbukaan pemerintah ke K/L dan Pemda;
4. Menyelenggarakan *event* lokal, nasional, regional, maupun internasional dalam rangka *knowledge sharing* kebijakan keterbukaan pemerintah;

### 2.2 Keluaran dan Manfaat

**Keluaran (*output*)** dari kegiatan koordinasi strategis ini adalah terlaksananya kebijakan keterbukaan pemerintah (*open government*), dengan sub-keluaran diantaranya adalah:

- a. Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2018-2020;
- b. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi 2016-2017;
- c. Laporan pelaksanaan event nasional, regional dan internasional terkait kebijakan keterbukaan pemerintah

**Manfaat (*outcome*):**

- a. Terlaksananya kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam renaksi keterbukaan pemerintah;
- b. Tersusunnya rekomendasi atas pelaksanaan renaksi keterbukaan pemerintah;
- c. Tumbuhnya kesadaran di antara pemangku kepentingan atas pentingnya keterbukaan pemerintah.



**HASIL  
KEGIATAN**



### 3.1 Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2018-2020

Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (*Open Government*) 2018-2020 merupakan rencana aksi periode keempat sepanjang keanggotaan Indonesia dalam *Open Government Partnership* (OGP). Rencana aksi kali ini dirumuskan untuk merespon isu nasional dan global yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintah, keterbukaan informasi, serta teknologi dan inovasi. Selain itu, proses penyusunannya juga melibatkan partisipasi dari Organisasi Masyarakat Sipil dan Kementerian/Lembaga. Terdapat enam tahapan penyusunan, dimulai dari perumusan isu strategis hingga melakukan finalisasi dokumen rencana aksi. Secara lebih detail, tahapan tersebut terdiri dari: (i) Workshop Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah, (ii) Pertemuan *Kick Off* Penyampaian Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah, (iii) Pertemuan Bilateral dan Multilateral, (iv) Konsultasi Publik Online, (v) Pertemuan Konsultatif dan Pendalaman, dan (vi) Pertemuan Finalisasi. Adapun Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (*Open Government Indonesia*) sebagaimana terlampir (**lampiran I**)

### 3.2 Laporan Rencana Aksi 2016-2017 (*Government Self Assessment Report 2017*)

Pemerintah selaku pelaksana renaksi *Open Government* di Indonesia diwajibkan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (*Government Self Assessment Report*) untuk dapat memberikan gambaran secara detail terkait implementasi dari renaksi yang sedang berjalan atau telah selesai dilaksanakan. Dokumen ini berfungsi juga untuk mendukung penilaian dari *Independent Reporting Mechanism* (IRM) yang akan memberikan evaluasi terhadap kinerja Indonesia dalam menjalankan renaksi keterbukaan pemerintah. Proses penyusunan GSAR ini adalah dengan menganalisa data-data yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Nasional dimana di dalamnya dapat ditemukan tingkat capaian dari masing-masing rencana aksi sehingga tingkat keberhasilan dari implementasi Renaksi OGI 2016-2017 dapat terukur dan tervalidasi. Selain itu, Seknas OGI juga mengadakan pertemuan dengan *stakeholders* terkait untuk membahas sistematika laporan dan informasi yang dapat digunakan sebagai bagian dari laporan (**Lampiran II**).

### 3.3 Keikutsertaan dalam *OGP Global Summit* di Georgia

*Open Government Partnership Global Summit* merupakan konferensi tingkat tinggi terkait keterbukaan pemerintah dimana pada tahun 2018 diselenggarakan di Tbilisi, Georgia. KTT ini dihadiri oleh seluruh negara anggota dari *Open Government Partnership* dimana Indonesia merupakan anggota dari *Steering Committee* (SC) OGP periode 2015-2018. Sebagai anggota dari SC, Indonesia berkontribusi untuk menentukan arah strategis dari *Open Government Partnership* secara keseluruhan lewat dari resolusi-resolusi yang disepakati bersama dengan anggota SC lainnya. *Open Government Partnership Global Summit 2018* dihadiri oleh 96 perwakilan negara dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas isu-isu strategis terkait keterbukaan pemerintah dengan tema keterlibatan masyarakat, pemberantasan korupsi, dan peningkatan pelayanan publik. Sebanyak 54 delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jend. (Purn) Dr. Moeldoko hadir di kegiatan global tersebut. Delegasi Indonesia menghadiri beberapa meeting yang diagendakan dalam KTT tersebut, antara lain : (i) *OGP Steering Committee Working Level Meeting*; (ii) *OGP Steering Committee Ministerial Level Meeting*; (iii) *OGP General Summit Session*; (iv) *Bilateral Meeting* dengan Denmark; dan (v) *Bilateral Meeting* dengan Georgia (**Lampiran III**).

### 3.4 Keikutsertaan dalam OGP *Regional Meeting* di Korea Selatan

*Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018* merupakan pertemuan tingkat regional yang dihadiri oleh negara-negara anggota *Open Government Partnership* di wilayah Asia Pasifik. Pertemuan regional ini diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan pada bulan November 2018 dengan merujuk pada tema demokrasi yang partisipatif, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan memperbaharui kepercayaan publik. *Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018* dihadiri oleh 43 perwakilan negara dan organisasi masyarakat sipil. Sebanyak 70 delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro hadir dalam pertemuan regional ini.

Pertemuan regional ini mengagendakan sesi ministerial roundtable dan sejumlah breakout sessions. Delegasi Indonesia menghadiri beberapa sesi, antara lain : (i) *Ministerial Roundtable : Building a People Powered Open Government Movement*; (ii) *Bilateral Meeting* dengan Direktur Eksekutif OGP, Sanjay Pradhan; (iii) *Breakout Session : From Shoddy Construction to Grand Corruption “Renewing Trust through Open Contracting”*; (iv) *Breakout Session : Strengthening Governance through Inclusivity “Integration of Leaving No One Behind in the Sustainable Development Agenda”*; (v) *Points of Contact Day*; (vi) *Breakout Session : Advancing a Feminist Open Government Agenda “Challenges and Opportunities”*; (vii) *Breakout Session : Youth-Led Solutions for Open Government “An Intergenerational Dialogue”* (Lampiran IV).

### 3.5 Terlaksananya *Open Government Week* di Beberapa Daerah

*Open Government Week* atau *OpenGovWeek* adalah rangkaian kegiatan yang diadakan serentak secara global oleh negara-negara anggota *Open Government Partnership* terkait dengan topik-topik keterbukaan pemerintah. *OpenGovWeek* bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai *Open Government* terutama *Open Government Indonesia*, dan mengakselerasi partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat untuk saling berkolaborasi dan merupakan kegiatan untuk berbagi ide, mendiskusikan solusi serta komitmen untuk meningkatkan partisipasi yang lebih luas pada pemerintah.

*OpenGovWeek* pada tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 7-11 Mei 2018 di lima (5) kota di Indonesia yakni Wonosobo, Solok, Yogyakarta, Pontianak dan Jakarta. Rangkaian kegiatan *OpenGovWeek* terdiri dari rapat penajaman Renaksi OGI di Wonosobo, pameran inovasi daerah di Solok, seminar mengenai transparansi pemerintah dan kegiatan *Hackathon* di Pontianak, sosialisasi keterbukaan anggaran desa di Yogyakarta dan seminar mengenai peningkatan pelayanan kesehatan di Jakarta. Kegiatan OGW, menarik sekitar 318 peserta dari Wonosobo, Jakarta, Yogyakarta dan Pontianak, sementara jumlah yang tidak terhitung pada Solok, karena merupakan pameran umum (Lampiran V).

### 3.6 Terlaksananya Fungsi Komunikasi dan Penjangkauan Isu Keterbukaan

Secara garis besar langkah-langkah dari menjalankan fungsi komunikasi OGI adalah dengan mengoperasikan kembali kanal-kanal digital OGI dan melaksanakan kegiatan-kegiatan baru yang melibatkan masyarakat secara aktif, terutama dari kalangan anak muda. Selain itu juga telah dilakukan penciptaan dan pengembangan konten-konten komunikasi OGI, yang bertujuan untuk memperluas diskursus keterbukaan pemerintah dan berbagai isu yang memiliki kaitan erat dengan keterbukaan di masyarakat. Akun sosial media OGI digunakan untuk membagikan kegiatan OGI yang



## Hasil Kegiatan

---

berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dan juga dipergunakan untuk membagikan konten informasi visual (infografis) seputar keterbukaan pemerintah (<https://www.instagram.com/opengovindo/>) dan (<https://www.facebook.com/OpenGovernmentIndonesia/>). Selama periode bulan Mei - Desember 2018, sekretariat OGI telah memproduksi 11 Blog yang telah dibagikan pada website OGI serta 5 siaran pers/berita. OGI juga telah menerbitkan 7 *e-newsletter* bulanan OGI yang berjudul *OGI Timeline* yang dimulai pada bulan Agustus 2018. Salah satu inovasi terkait komunikasi publik adalah pelaksanaan *OGI Talk*. *OGI Talk* mengajak kerjasama narasumber dari pemerintahan dan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan topik Rencana Aksi yang dibahas. Selama periode 2018, OGI melaksanakan dua sesi *OGI Talk Via Twitter* yaitu; 1) Perencanaan dan Penganggaran Desa Terbuka, dilaksanakan pada Jumat, 28 September 2018 dengan mengajak kerjasama Kementerian Desa, Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). 2) Integrasi Data Untuk Keterbukaan dan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, dilaksanakan pada Senin, 3 Desember 2018 dengan mengajak kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada periode ini, Sekretariat Nasional OGI berkesempatan untuk menyusun wawancara dengan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang merupakan *focal point* untuk *Open Parliament Indonesia*. Wawancara ini ditayangkan pada 23 November 2018 di semua media sosial *Open Government Indonesia*. (Lampiran VI).



**O**  
**PENUTUP**



## Penutup

---

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (*Open Government Indonesia*) tahun 2018 telah menghasilkan beberapa capaian-capaian penting yang menunjukkan komitmen Kementerian PPN/Bappenas secara khusus dan Pemerintah Indonesia secara umum dalam memperkuat komitmen keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat beberapa rekomendasi untuk penguatan pelaksanaan kegiatan dan komitmen atas kebijakan keterbukaan pemerintah, diantaranya yaitu:

1. Mengintensifkan proses koordinasi dan komunikasi dengan K/L kunci yang memiliki tupoksi di bidang-bidang terkait;
2. Memperluas isu keterbukaan pemerintah pada bidang-bidang atau sektor pembangunan prioritas;
3. Memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam seluruh proses perumusan, pelaksanaan dan pemantauan rencana aksi;
4. Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi secara berkala dan mendalam;
5. Melakukan sinkronisasi proses penyusunan rencana aksi dengan siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah.





# LAMPIRAN I

Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2018-2020



# **Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018-2020**



Jakarta, Desember 2018

# RENCANA AKSI KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA 2018-2020

## I. Pendahuluan

Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah atau *Open Government Indonesia* (Renaksi OGI) 2018-2020 merupakan rencana aksi kelima yang diluncurkan Indonesia sejak bergabung ke dalam Kemitraan Global Pemerintahan Terbuka atau *Open Government Partnership* (OGP) pada tahun 2011.

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan pemerintah (*open government*), merupakan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu agenda dalam RPJMN 2015-2019 adalah Membangun Tata Kelola **Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya**, dengan salah satu sub-agenda prioritas **Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan** dengan tiga strategi utama, yakni: (i) penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik; (ii) penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan dan terintegrasi; dan (iii) penerapan *Open Government* untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 diawali dengan perumusan *grand challenges* yang menasar sektor Desa, Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, Ekonomi melalui serangkaian proses dan tahapan. *Grand challenges* dirumuskan dengan merujuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah, Kegiatan Prioritas Pantauan Presiden, dan dokumen *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya dipetakan ke dalam lima area, yakni (i) partisipasi publik; (ii) reformasi birokrasi; (iii) akses informasi publik; (iv) tata kelola data; (v) inovasi pelayanan publik. Selain itu, *grand challenges* dirumuskan dengan merujuk masukan, saran dan kritik yang masuk dalam portal LAPOR! serta media monitoring.

Selain menjangkau isu-isu spesifik yang berasal dari tingkat nasional, Renaksi kali ini juga berupaya mengakomodir beberapa isu global, antara lain Kepemilikan Manfaat (*Beneficial Ownership*), Keterbukaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*Open Contracting*), dan Akses terhadap Layanan Bantuan Hukum (*Access to Justice*). Di tingkat global, OGP telah secara resmi mendeklarasikan isu-isu global tersebut dalam agenda tematik keterbukaan pemerintah melalui Deklarasi Paris (*Paris Declaration*) di tahun 2016.

## II. Open Government di Indonesia

### A. Perjalanan Open Government Indonesia

Awal keterlibatan Indonesia dalam inisiatif *Open Government* dimulai ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan tujuh kepala negara lain—Amerika Serikat, Brazil, Filipina, Inggris, Meksiko, Norwegia, Afrika Selatan—berkumpul di New York, Amerika Serikat pada 20 September 2011 untuk meluncurkan inisiatif *Open Government Partnership* (OGP). Tujuan utama dari inisiatif keterbukaan pemerintah adalah untuk mendorong implementasi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inovasi dalam untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

Sebagai salah satu pendiri, Indonesia aktif dalam mengakselerasikan langkah, guna mewujudkan keterbukaan pemerintah. Bentuk komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan Open Government tercermin pada penyusunan Renaksi Keterbukaan Pemerintah yang telah mencapai periode kelima (2019-2020). Selain itu, untuk mengawal pelaksanaan inisiatif ini, pemerintah membentuk tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, berbagai kegiatan telah terlaksana untuk memperkuat praktik keterbukaan pemerintah di Indonesia.

Dalam waktu tujuh tahun, Renaksi Keterbukaan Pemerintah telah mendorong berbagai inisiatif, antara lain:

#### a. Keterbukaan Anggaran

Adanya tata kelola anggaran yang terbuka dan partisipatif merupakan prasyarat utama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang juga mampu mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses penganggaran nasional. Untuk meningkatkan kualitas keterbukaan anggaran dan proses anggaran tersebut, maka pada tahun 2017 Kementerian Keuangan meluncurkan portal [data-apbn.kemenkeu.go.id](http://data-apbn.kemenkeu.go.id) yang memuat data pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai ke tingkat sub komponen, peta anggaran dan data pembangunan Indonesia yang terbagi dalam data-data tematik.

#### b. Satu Data Indonesia

Inisiatif Satu Data Indonesia lahir sebagai upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel dan mutakhir guna mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Satu Data berupaya mendorong terciptanya tata kelola data pemerintah yang lebih baik melalui tiga prinsip utama, yakni (i) satu standar data baku, (ii) satu metadata baku, dan (iii) interoperabilitas data. Melalui portal [data.go.id](http://data.go.id), berbagai data terkait Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan instansi lain tersedia dalam format terbuka serta dapat dimanfaatkan oleh siapapun secara lebih mudah.

#### c. Forum Konsultasi Publik (FKP)

Forum Konsultasi Publik dicanangkan berdasarkan amanat PermenPAN RB No. 16/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan yang dikuatkan dengan Surat Edaran MenPAN RB No. 56/2017 sebagai wadah dialog dan diskusi pertukaran opini yang dilakukan secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat lewat berbagai wahana dan media.

#### d. Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

Dalam upaya perencanaan pembangunan nasional, data dan informasi geospasial memainkan peranan vital sebagai dasar untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional sehingga dibutuhkan data dan informasi geospasial yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terpadu. Dalam hal ini, Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) hadir untuk untuk mengintegrasikan seluruh data dan informasi geospasial Indonesia yang mengacu pada prinsip satu Georeferensi, Geo-standar, Geo-kustodian dan Geodatabase dalam skala peta 1:50.000 yang dapat secara terbuka dimanfaatkan oleh publik. Renaksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017 juga mendorong peningkatan partisipasi publik dalam perbaikan tata kelola informasi geospasial sebagai bagian integral dari upaya terpadu proses percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

#### e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamankan tiap badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang terbuka, mudah dan cepat bagi setiap orang yang membutuhkan. Meskipun sampai saat ini belum semua badan publik menunjuk PPID dan menyediakan informasi publik yang diamanatkan UU KIP, namun sebanyak 483 dari 708 badan publik/ 68,22% (2017) sudah memiliki PPID. Ke depannya, peningkatan jumlah PPID di badan publik harapannya dapat meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.

#### f. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

LAPOR! diluncurkan pada tahun 2011 sebagai sarana pengaduan dan aspirasi masyarakat yang terpadu dan terhubung dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang saat ini dikelola bersama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia. Melihat peran pentingnya tersebut, LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).



## PERJALANAN KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA



Asian Pacific Leaders Forum on OGP Indonesia di Jakarta

**2017**

**2016**

- Renaksi OGI Keempat (2016-2017)
- Bojonegoro terpilih sebagai proyek percontohan oleh OGP
- Platform API Pemilu, inisiatif Perludem Memenangkan Peringkat Kedua dalam Penganugerahan OGP

- Indonesia Terpilih Menjadi Tim Pengarah dalam OGP Tahun 2012-2015 | 2015-2018
- Pencerah Nusantara Memenangkan Peringkat Kedua Peringkat Kedua dalam Penganugerahan OGP

**2015**

**2014**

- Indonesia Menyelenggarakan Konferensi OGP Regional Asia Pasifik Pertama di Bali
- Terbit Keputusan Presiden Nomor Number 13/2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Open Government Partnership
- Renaksi OGI Ketiga (2014-2015)

- Indonesia Menjadi Ketua OGP
- Renaksi OGI Kedua 2013

**2013**

**2012**

Renaksi OGI Pertama 2012

Indonesia +7 Negara Lain Mendirikan OGP

**2011**

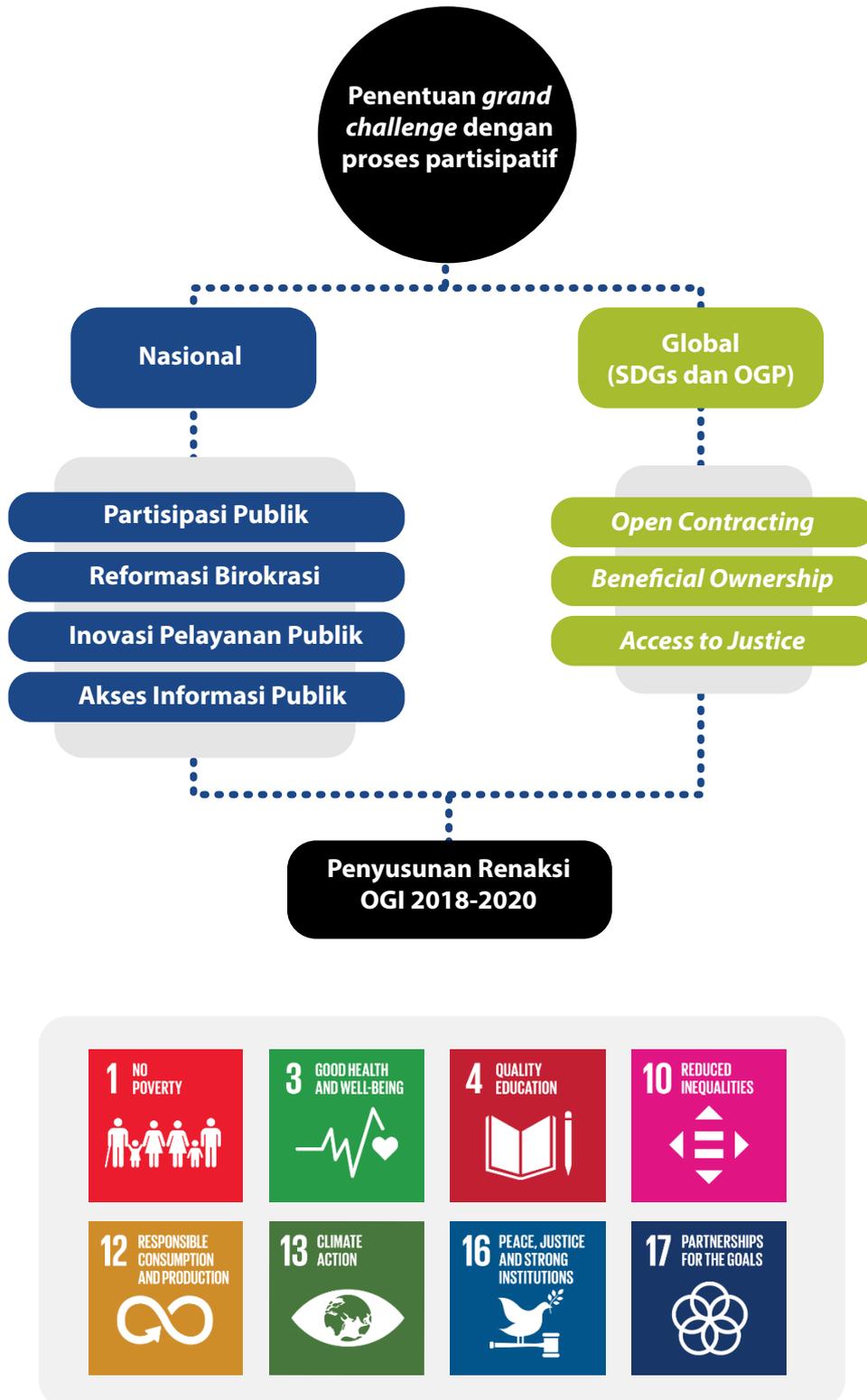
**2010**

Delegasi Obama Mengundang Indonesia untuk Mendirikan Gerakan Inovasi Transparansi Global.

## B. Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia Tahun 2018-2020

### 1. Perumusan

Pada Renaksi kelima ini, penyusunan diawali dengan penyusunan *Grand Challenges* bersama, antara Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil. Berdasarkan usulan dari organisasi masyarakat sipil dan pembahasan dengan pemerintah, sebanyak 16 komitmen yang terdiri dari: 14 komitmen global dan 2 komitmen nasional. Selain itu, 16 komitmen tersebut juga memuat 8 target dalam Target Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*.



## 2. Kolaborasi dan Konsultasi Publik

Sesuai dengan standar dari *Open Government Partnership*, proses perumusan Rencana Aksi harus menggunakan pendekatan ko-kreasi. Metode kolaborasi dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka dan daring. Terhitung sebanyak 41 pertemuan tatap muka dan 17 respon masyarakat yang didapatkan melalui konsultasi publik secara daring. Responden terdiri dari 14 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Berdasarkan masukan dari masyarakat, terdapat tiga komitmen yang mendapatkan perhatian terbanyak yakni komitmen tentang akses keterbukaan anggaran (16%), komitmen tentang e-legislasi (11%) dan komitmen tentang pelaksanaan forum konsultasi publik (11%).



### 3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan pelaksanaan rencana aksi akan menggunakan Sistem Sistem Pemantauan (SISPAN) yang digunakan oleh Kantor Staf Presiden. SISPAN akan dimonitoring secara berkala setiap tiga bulan (triwulan), target capaian yang telah disusun dalam Renaksi ini akan dipertajam dalam target triwulan. Lebih jauh lagi, penerapan metode ko-kreasi dalam monev melalui diskusi secara terfokus antara pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk saling memberikan *feedback* dalam memperkuat implementasi *Open Government* di Indonesia.



### III. Rencana Aksi Open Government Indonesia 2018-2020



#### **Komitmen 01**

Perbaiki Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

#### **Komitmen 02**

Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan

#### **Komitmen 03**

Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah

#### **Komitmen 04**

Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif

#### **Komitmen 05**

Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa

#### **Komitmen 06**

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislasi

### **Komitmen 07**

Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

### **Komitmen 08**

Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah

### **Komitmen 09**

Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik Pemerintah Indonesia

### **Komitmen 10**

Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPOR!-SP4N

### **Komitmen 11**

Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### **Komitmen 12**

Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

### **Komitmen 13**

Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia

### **Komitmen 14**

Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum

### **Komitmen 15**

Pengarusutamaan Nilai-Nilai Keterbukaan Pemerintah pada Pelaksanaan *Smart City*

### **Komitmen 16**

Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia

# DAFTAR KOMITMEN RENCANA AKSI KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA 2018-2020

## I. Perbaiki Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>2. Kementerian Keuangan</li> <li>3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li> <li>4. Kementerian Pertanian</li> <li>5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> </ol>
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?</p>	<p>Setelah Panama Paper muncul ke permukaan publik pada tahun 2016, sebanyak 1.038 pelaku usaha yang memiliki perusahaan yang didirikan di luar negeri dan berstatus wajib pajak diduga terlibat kasus pendanaan terorisme. Berkaitan dengan temuan tersebut, pemerintah Indonesia merespon melalui penerbitan dua regulasi, diantaranya: 1) Peraturan Presiden Nomor 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme; dan 2) Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kedua regulasi tersebut saling mendukung sebagai upaya untuk mengurangi tindakan korupsi. Bahkan, pada Peraturan Presiden Nomor 13/2018 mendorong perusahaan (seperti PT, CV, Firma, Perkumpulan, Yayasan dan lainnya) untuk mendaftarkan, melaporkan dan melakukan pembaharuan data penerima manfaat (<i>Beneficial Ownership/ BO</i>). Kedua regulasi yang masih terbilang baru tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat. Lebih jauh lagi, peraturan terkait dengan BO masih membutuhkan regulasi teknis terkait dengan prosedur publikasi data dan tata cara untuk mengaksesnya.</p> <p>Implementasi dalam mendorong data BO di Indonesia sendiri, dilakukan secara kolaboratif dengan kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, secara teknis, data BO dilaksanakan oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Komitmen BO dalam Rencana Aksi <i>Open Government</i> ini, secara langsung mengadopsi komitmen yang telah dibuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.</p>

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Komitmen Renaksi 2018-2020 terkait dengan kepemilikan manfaat akan difokuskan kepada pengumpulan dan pemanfaatan data BO. Pendaftaran BO akan dilakukan pada sektor ekstraktif, kehutanan dan sawit. Lebih jauh lagi, penggunaan data BO akan difokuskan kepada pendaftaran perizinan pada industri ekstraktif dan sawit, dan juga tentang penyalahgunaan dana untuk pencucian uang dan terorisme.</p>	
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Dengan adanya komitmen untuk mengumpulkan data terkait kepemilikan manfaat dapat menyelesaikan masalah korupsi dan penangguhan pajak di Indonesia. Lebih jauh lagi, komitmen ini juga mendorong integrasi data BO melalui Sistem Informasi Korporasi. Dengan demikian data tersebut akan dapat diakses oleh publik.</p>	
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini sesuai dengan salah satu nilai dari <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yaitu nilai transparansi yang berkaitan dengan keterbukaan akses informasi dan masyarakat terhadap informasi. hal tersebut dapat dilakukan dengan mempublikasikan data terkait dengan BO dari perusahaan sehingga masyarakat dapat menggunakan data tersebut.</p>	
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga memiliki keterkaitan dengan upaya untuk mencapai target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) No. 17: "Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan", terutama pada target 17.1: "memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional ke negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik untuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya", karena tidak hanya untuk menerbitkan BO secara publik, tetapi komitmen ini juga secara tidak langsung meningkatkan pendapatan nasional melalui pengumpulan dan integrasi BO.</p>	
<p>Indikator capaian dengan target terukur</p>	<p>Tanggal mulai:</p>	<p>Tanggal berakhir:</p>
<p>1. Terlaksananya Sistem Pengelolaan Administrasi Korporasi.</p>	<p>Januari 2019</p>	<p>Desember 2020</p>
<p>2. Digunakannya basis data <i>Beneficial Ownership</i> untuk pencegahan penyalahgunaan legal persons/arrangements untuk tujuan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan penyalahgunaan perpajakan.</p>	<p>Januari 2019</p>	<p>Desember 2020</p>

3. Digunakannya basis data <i>Beneficial Ownership</i> sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit.	Januari 2019	Desember 2020
Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia</li> <li>2. Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</li> <li>5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>6. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>8. Kementerian Perdagangan</li> <li>9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha</li> <li>11. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi</li> </ol>
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Publish What You Pay</i> (PWYP) Indonesia</li> <li>2. Sekretariat EITI Indonesia</li> </ol>

## II. Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Sosial
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?</p>	<p>Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu program JKN adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk masyarakat miskin. Namun, kondisi saat ini data PBI tidak dapat diakses oleh pengguna dan seringkali tidak sesuai dengan kriteria penerima PBI. Misalnya, karena beberapa penerima mungkin sudah meninggal, pindah, memiliki nomor identitas ganda, atau memiliki perubahan dalam keadaan keuangan yang memungkinkan mereka membayar kontribusi. Tidak konsistennya data penerima PBI terjadi karena masyarakat tidak dapat memverifikasi dan memvalidasi. Selain itu, data PBI juga masih sulit untuk diakses.</p> <p>Di sisi lain, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5/2016 tentang Penerima Bantuan Kontribusi Kesehatan (Revisi) mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan mekanisme verifikasi data dan validasi partisipatif. Menurut peraturan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memperbarui data PBI melalui musyawarah kelurahan dan musyawarah desa.</p> <p>Namun, forum tersebut tidak berjalan efektif sehingga pemantauan terhadap implementasi pembaharuan data secara partisipatif tetap rendah. Rencana Aksi ini berkomitmen untuk memberdayakan pembaruan data partisipatif dan mendorong Kementerian Sosial untuk menginformasikan data PBI melalui sistem aplikasi.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Komitmen ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sistem aplikasi dan partisipasi masyarakat dalam memperbarui data. Sistem aplikasi ini akan memberikan informasi pribadi penerima. Selain itu, semua proses pemutakhiran data akan dilaksanakan oleh kecamatan. Komitmen ini juga mendorong keterlibatan kelompok perempuan, komunitas terpinggirkan, dan masyarakat adat. Hasil dari pembaruan data partisipatif akan dilakukan dengan dikeluarkannya keputusan menteri.</p>

<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Komitmen ini mendorong publikasi data PBI untuk membantu masyarakat mengetahui siapa saja penerima bantuan di wilayah mereka. Selain itu, komitmen ini akan memberdayakan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan forum data PBI secara berkala.</p>	
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini selaras dengan beberapa nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yang merupakan partisipasi masyarakat dan transparansi. Relevansi partisipasi masyarakat dari komitmen ini dapat dilihat dalam keterlibatan orang untuk memperbarui data melalui forum kecamatan. Selain itu, transparansi relevan dengan komitmen ini dengan meningkatkan kualitas informasi publik dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi tersebut.</p>	
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga diselaraskan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Nomor 3: "Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia", terutama pada 3.8: "mencapai cakupan kesehatan universal termasuk akses perlindungan risiko keuangan ke kualitas layanan kesehatan esensial dan akses ke obat-obatan dan vaksin esensial yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua", karena ketika semua orang mendapat akses ke layanan kesehatan, peluang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan akan dimungkinkan.</p>	
<p>Indikator capaian dengan target terukur</p>	<p>Tanggal mulai:</p>	<p>Tanggal berakhir:</p>
<p>1. Aplikasi sistem informasi tentang kesejahteraan sosial menyediakan semua proses pembaruan data sebagai hasil dari verifikasi daring. Sebagai <i>platform</i> data, sistem ini juga menyediakan data yang akurat dan valid, diperkaya dengan fitur ekspor dan impor data.</p>	<p>Januari 2019</p>	<p>Desember 2019</p>
<p>2. Pelaksanaan pertemuan konsultasi publik melalui musyawarah kelurahan/desa atau forum lain untuk pembaruan data PBI</p>	<p>Januari 2020</p>	<p>Juni 2020</p>
<p>3. Ketersediaan dua belas keputusan menteri tentang data yang diperbarui dari penerima PBI berdasarkan input partisipasi warga</p>	<p>Januari 2020</p>	<p>Desember 2020</p>

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Kesehatan</li> <li>2. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)</li> <li>3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</li> </ol>
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	MediaLink

### III. Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?</p>	<p>Komitmen ini merupakan perluasan dari Rencana Aksi 2016-2017 sebelumnya tentang peningkatan pengungkapan informasi dalam pemerintah. Anggaran pemerintah tersedia di situs Kementerian Keuangan (<a href="http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/">http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/</a>). Situs ini menyediakan peta anggaran dan <i>query</i> data pemerintah di tingkat nasional. Selain itu, juga menyajikan alokasi anggaran tematik yang mencakup item terkecil (seperti satuan kerja) untuk kegiatan pemerintah.</p> <p>Walaupun terdapat dalam situs tersebut, masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mengakses data karena beberapa data tidak dapat diakses di portal. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh kebijakan keterbukaan informasi di tingkat Kementerian/ Lembaga belum sama. Oleh karena itu, untuk mendorong komitmen kementerian keuangan ada terus mempublikasikan anggaran dari seluruh kementerian perlu untuk dikuatkan. Melalui komitmen ini, Kementerian Keuangan membutuhkan dukungan dari kementerian lain untuk menerbitkan anggaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.</p> <p>Inovasi dalam transparansi data diharapkan akan direplikasi oleh pemerintah daerah. Komitmen ini juga mendorong pembentukan platform Anggaran Pemerintah Daerah. Dengan demikian, semua data anggaran pemerintah daerah akan diintegrasikan ke dalam satu portal yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, transparansi anggaran di tingkat nasional dan daerah dapat dengan mudah diakses oleh orang-orang melalui portal Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menggunakan kualitas dan standar yang setara untuk tujuan publikasi. Sehingga, fungsi pemantauan partisipatif oleh masyarakat dapat dilakukan secara efektif.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Komitmen ini mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mempublikasikan data anggaran menggunakan standar Portal Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola</p>

	<p>oleh Kementerian Keuangan. Untuk membuat semua kementerian mengumumkan data anggaran mereka, sangat disarankan untuk menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Layanan Sosial.</p> <p>Selanjutnya, komitmen ini mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan situs web. Ini mengakomodasi database Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terpusat. Portal APBD ini berbeda dari Portal APBN karena keduanya dikelola oleh dua otoritas yang berbeda.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Transparansi anggaran terstandarisasi baik dalam portal APBN dan APBD yang mencakup kegiatan detail dapat menyelesaikan masalah pada kualitas data yang akan dipublikasikan. Adapun pemerintah daerah, komitmen ini mensyaratkan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah dalam menerbitkan anggaran melalui sistem elektronik yang terpusat dan terintegrasi (<i>E-budgeting</i>). Selanjutnya, <i>E-budgeting</i> akan mempromosikan implementasi sistem anggaran terintegrasi di 34 provinsi.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen tersebut diselaraskan dengan beberapa nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP), transparansi, dan akuntabilitas. Transparansi terkait dengan informasi publik dan mengakses informasi. Ini nyata dalam meningkatkan kualitas transparansi anggaran kementerian dan lembaga di tingkat nasional dan daerah. Sedangkan akuntabilitas berkorelasi dengan tanggung jawab atas tindakan pemerintah melalui publikasi anggaran pemerintah secara terbuka.</p>
<p>Additional Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Nomor 16: "mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan." Terutama di target 16,6: "mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan." Karena diyakini bahwa transparansi data dalam anggaran pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan baik di pemerintah pusat atau daerah adalah salah satu pendekatan untuk mewujudkan kesetaraan berkelanjutan kemajuan pembangunan untuk semua.</p>

Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
<b>APBN</b>		
1. Ketersediaan nota kesepahaman tentang publikasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dengan Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Sosial	Januari 2019	Desember 2019
2. Publikasi informasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan hingga biaya kegiatan di portal data APBN	Januari 2020	Desember 2020
<b>APBD</b>		
3. Pembentukan portal data anggaran daerah ( <i>E-Budgeting</i> ) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri	Januari 2019	Desember 2019
4. Ketersediaan data anggaran dari 34 provinsi di portal <i>E-Budgeting</i>	Januari 2020	Desember 2020
<b>Informasi Kontak</b>		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pendidikan</li> <li>2. Kementerian Kesehatan</li> <li>3. Kementerian Sosial</li> </ol>
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

#### IV. Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Deskripsi Komitmen</b>	
<p>Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?</p>	<p>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionall mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu mengalokasikan setidaknya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Namun, pada level implementasi, masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat dari anggaran.</p> <p>Untuk alasan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD). NPD bertujuan untuk memberikan informasi mengenai anggaran dan kebijakan pendidikan di setiap daerah. NPD berisi data tentang anggaran dan pencapaian pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. Selanjutnya, format data dalam NPD akan disediakan dengan menggunakan grafik, <i>chart</i>, dan dalam bentuk seri waktu sehingga akan lebih mudah untuk memantau perubahan yang terjadi pada layanan pendidikan daerah.</p> <p>Namun demikian, NPD tidak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga pada proses perencanaan dan penganggaran tidak menjadi salah satu acuan. Oleh karena itu, untuk memperluas informasi NPD menjadi upaya untuk menyediakan data kepada pemerintah maupun masyarakat sipil untuk dapat menyusun program berbasis kondisi di lapangan.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>NPD digunakan untuk mengidentifikasi masalah utama dalam program pendidikan daerah. Dengan menggunakan NPD, pemerintah dapat dengan mudah mengetahui distribusi anggaran pendidikan, akreditasi, kondisi ruang kelas, hasil ujian nasional, dan indeks integritas ujian nasional, kualifikasi guru, tes kompetensi guru, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka partisipasi murni, dan rasio pendidikan.</p> <p>Mempertimbangkan manfaat dari NPD, komitmen ini akan merujuk kepada penggunaan NPD sebagai informasi dasar bagi orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.</p>

<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Melalui komitmen ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan serangkaian lokakarya bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mensosialisasikan informasi tentang NPD. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memperluas informasi tentang penggunaan NPD dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan daerah.</p>	
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini selaras dengan beberapa nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yang transparan dan partisipasi masyarakat. Transparansi terkait dengan keterbukaan informasi publik dan orang-orang mengakses informasi. Hal ini dimanifestasikan dalam penerbitan NPD oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan partisipasi dari masyarakat untuk memperbarui data NPD. Partisipasi warga ditafsirkan sebagai masyarakat akan terlibat lebih lanjut dalam proses pengambilan keputusan yang ditunjukkan dalam keterlibatan orang dalam mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan melalui portal NPD.</p>	
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga selaras dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Nomor 16: "mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan." Terutama di target 16.6: "mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan." Karena pembangunan berkelanjutan di masa depan hanya dapat didukung oleh lembaga nasional yang bertanggung jawab atas penganggaran dan pengeluaran mereka. Selain itu, komitmen ini secara tidak langsung bersilangan dengan SDGs Nomor 4: "Pastikan pendidikan berkualitas inklusif dan merata dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua", terutama pada target 4.1: "Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan secara gratis, adil dan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas mengarah pada hasil pembelajaran yang relevan dan efektif".</p>	
<p>Indikator capaian dengan target terukur</p>	<p>Tanggal mulai:</p>	<p>Tanggal berakhir:</p>
<p>1. Sosialisasi NPD kepada masyarakat sipil dan pemerintah daerah</p>	<p>Januari 2019</p>	<p>Desember 2019</p>
<p>2. Penyelenggaraan forum konsultasi untuk rencana anggaran</p>	<p>Januari 2020</p>	<p>Desember 2020</p>

pendidikan dengan masyarakat sipil di daerah			
<b>Informasi Kontak</b>			
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ombudsman RI</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>	
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	<i>Transparency International Indonesia (TII)</i>	

## V. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa

January 2019 - December 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Penyertaan partisipasi publik yang luas dalam musyawarah desa masih belum optimal sehingga turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Pertemuan desa kurang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan hanya melibatkan elit desa. Bahkan musyawarah desa kerap kali dihadiri kepala desa dan sekretaris desa. Akibatnya, program-program yang diusulkan hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu saja. Musyawarah desa seharusnya dilakukan dengan partisipasi inklusif yang melibatkan masyarakat dari berbagai elemen seperti latar belakang pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan sebagainya.</p> <p>Perbaikan kebijakan telah dikeluarkan secara bertahap dan di antaranya adalah penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/2018 tentang Manajemen Keuangan Desa. Secara rinci, peraturan ini mengidentifikasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>Namun, peluang dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa tidak berhenti sampai di situ saja. Kualitas partisipasi masyarakat desa masih merupakan tugas yang tidak dapat dihindari. Masyarakat harus memiliki kapasitas yang cukup baik untuk memberikan input kepada pemerintah. Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilakukan dengan meningkatkan peran fasilitator desa terutama dalam proses perencanaan dan implementasi pemerintah.</p>
Apa bentuk komitmennya?	<p>Terbatasnya akses dalam partisipasi Perencanaan Pembangunan Desa akan menyebabkan arah program menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komitmen ini mendorong partisipasi masyarakat dari latar belakang, mata pencaharian, dan stakeholder lainnya untuk terlibat dalam musyawarah desa.</p> <p>Dalam komitmen ini terdapat dua kementerian yang menjadi penanggungjawab pelaksana, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kementerian Dalam Negeri</b> akan mengambil peran untuk memberikan pembangunan kapasitas bagi desa dan provinsi. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga akan melakukan pelatihan kepada pemerintah maupun masyarakat terkait</li> </ol>

	<p>musyawarah Desa di 30 desa di tiga provinsi.</p> <p>2. <b>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</b> akan merevisi peraturan tentang musyawarah desa dan pendamping desa.</p>	
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	<p>Terdapat beberapa peraturan terkait dengan pelaksanaan pemerintah desa yang harus direvisi untuk mendukung pelaksanaan komitmen ini. Peraturan yang direvisi diharapkan dapat memberikan jaminan keterlibatan masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan hak mereka dalam memantau administrasi pemerintahan desa. Selanjutnya, sosialisasi dan peningkatan kapasitas dilakukan di pemerintah desa, perempuan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, harapannya dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintah desa.</p>	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	<p>Komitmen ini relevan dengan prinsip partisipasi publik karena mendorong partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam memantau dan meninjau jalannya pemerintahan.</p> <p>Komitmen ini juga relevan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Dengan keterbukaan dalam proses perumusan program pembangunan desa, ini akan mendorong pemerintah untuk menjadi lebih transparan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran desa menjadi seefisien dan seefektif mungkin.</p>	
Informasi tambahan	<p>Komitmen ini juga terkait dengan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang kebetulan menjadi agenda internasional dalam menciptakan pembangunan yang lebih transparan dan inklusif. Komitmen ini nyata dalam tujuan pembangunan Nomor 16 yang menyatakan tentang Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga Kuat. Sebab, institusi yang kuat juga tercermin dalam akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Komitmen ini akan mendorong pencapaian SDGs lain, terutama SDGs Nomor 1 dalam hal mengurangi kemiskinan.</p>	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
Kementerian Dalam Negeri		
1. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa di 30 desa pada 3 provinsi (Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Barat)	Januari 2019	Desember 2019

2. Tersedianya juknis musyawarah desa dan FGD evaluasi pelaksanaan musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. FGD ini juga mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat sipil untuk memperkaya isi dan proses diskusi.		Januari 2020	Desember 2020
Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal			
3. Tersedianya <i>draft</i> Permendesa tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Dalam capaian ini, juga mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat sipil dan <i>stakeholder</i> terkait. Perubahan pada peraturan desa ini juga melibatkan konsultasi publik dengan <i>stakeholder</i> dan masyarakat sipil lainnya.		Januari 2019	Desember 2019
4. Tersedianya <i>draft</i> Permendesa tentang Pendampingan Desa. Perubahan pada peraturan desa ini juga melibatkan konsultasi publik dengan <i>stakeholder</i> dan masyarakat sipil lainnya.		Januari 2020	Desember 2020
<b>Informasi Kontak</b>			
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PATTIRO</li> <li>2. Wahana Visi Indonesia</li> </ol>	

## VI. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislati

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?</p>	<p>Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa "setiap orang memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan / atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundangan" di mana Peraturan Daerah di Provinsi dan Kabupaten dimasukkan dalam hierarki legislasi. Selain itu, dalam regulasi tersebut juga dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan peraturan sebagai persyaratan kebijakan demokratis. Namun, masih ada beberapa faktor yang menghambat peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Faktor utamanya adalah kurangnya akses dalam proses perumusan dan minimnya fasilitas informasi yang tersedia. Dengan demikian, diperlukan dorongan untuk turut melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan peraturan daerah.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Komitmen portal E-Legislati bukanlah sebuah inovasi baru karena sudah diimplementasikan oleh Kota Semarang dan Kota Makassar. Sebagai bentuk replikasi, tujuan dari komitmen ini adalah untuk mendorong daerah lain menggunakan portal E-Legislati. Portal memuat tentang program-program legislatif, rancangan peraturan baru, agenda diskusi, risalah rapat dan menu konsultasi publik online. Untuk mewujudkan komitmen ini, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk menerbitkan surat edaran kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara bersamaan, Kemendagri juga akan mendorong pengembangan platform E-Legislati di daerah. Platform ini akan menyediakan dokumen regulasi, kolom komentar dan publikasi peraturan di daerah.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Keterbukaan proses perumusan peraturan perundangan melalui portal E-Legislati akan menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengakses perkembangan regulasi. Mulai dari informasi terkait dengan proses perumusan peraturan, kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menu konsultasi publik online. Selain itu, platform ini akan dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat.</p>

<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini selaras dengan beberapa nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yang merupakan partisipasi masyarakat dan transparansi. Partisipasi warga terkait dengan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan orang secara luas dari berbagai latar belakang. Dalam hal ini, dengan menyediakan platform E-Legislati untuk menegakkan ruang demokrasi dalam proses pembuatan peraturan daerah, pemerintah telah memanifestasikan nilai partisipasi warga. Transparansi terkait dengan kualitas informasi publik dan orang-orang mengakses informasi. Nilai ini dimanifestasikan dalam E-Legislati yang memungkinkan orang untuk mengakses peraturan daerah yang diusulkan.</p>	
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga diselaraskan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) nomor 16: "Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua dan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan", terutama pada target 16.7 : "Pastikan pengambilan keputusan responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan". Proses pengambilan keputusan partisipatif hingga tingkat regional dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.</p>	
<p>Indikator capaian dengan target terukur</p>	<p>Tanggal mulai:</p>	<p>Tanggal berakhir:</p>
<p>1. Tersedianya SE Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui <i>platform</i> E-Legislati.</p>	<p>Januari 2019</p>	<p>Juli 2019</p>
<p>2. Tersedianya platform E-Legislati dalam <i>website</i> DPRD di 5 kabupaten/kota.</p>	<p>Januari 2019</p>	<p>Desember 2020</p>
<p><b>Informasi Kontak</b></p>		
<p>Aktor lain yang terlibat</p>	<p>Aktor pemerintah yang terlibat</p>	<p>1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Komisi Informasi Pusat</p>
	<p>CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja</p>	<p><i>Indonesian Parliamentary Center</i> (IPC)</p>

## VII. Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

January 2019 - December 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?</p>	<p>Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di mana setiap orang memiliki hak untuk memilih perwakilan legislatif dan pemimpin setiap tingkat pemerintahan. Ada dua jenis pemilihan yang diikuti oleh masyarakat yaitu pemilihan umum pada tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan pemilu diamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu KPU memegang peran penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. KPU telah mengembangkan inovasi sistem informasi melalui portal <a href="http://infopemilu.kpu.go.id">http://infopemilu.kpu.go.id</a>. Namun, data dalam portal tidak sepenuhnya tersedia dan hanya terbatas dalam beberapa tahun terakhir.</p> <p>Selain itu, juga terdapat informasi tentang profil calon anggota legislatif, profil calon presiden dan rekapitulasi penghitungan suara. Namun, informasi itu hanya dapat diakses dalam portal yang berbeda, seperti <a href="http://infopemilu.kpu.go.id">http://infopemilu.kpu.go.id</a> dan <a href="https://www.kpu.go.id/">https://www.kpu.go.id/</a>. Oleh karena itu, untuk mendorong transparansi dan kemudahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, KPU harapannya dapat mengintegrasikan data melalui portal yang terbuka dan mudah diakses.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Permasalahan data dapat diselesaikan diantaranya melalui integrasi data pemilu dengan Satu Data, yang bertujuan agar data tersebut dapat diadopsi berdasarkan prinsip-prinsip Satu Data, yakni mudah diakses, dapat digunakan kembali, dan dapat didistribusikan kepada semua orang. Selain itu, data tersebut juga harus dalam bentuk format terbuka (seperti: CSV, XLS, XML, JSON). Dengan demikian, implementasi prinsip Satu Data akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses data pemerintah. Komitmen ini juga mendorong publikasi hasil pemungutan suara, publikasi data calon legislatif dan eksekutif (kepala daerah) dalam satu portal resmi milik KPU. Sehingga setiap orang dapat mengetahui informasi tersebut dengan mudah.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Untuk mengatasi masalah di atas, komitmen ini mencoba menyederhanakan akses data dan informasi mengenai proses pemilihan. Selain itu, komitmen menyoroti dua permasalahan, pertama penerapan</p>

	<p>prinsip Satu Data dan publikasi data perhitungan ataupun data pemilu dalam satu portal.</p> <p>Oleh karena itu, data yang dapat diakses dengan mudah akan meningkatkan transparansi proses pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengembangan sistem elektronik juga akan memastikan keakuratan, keamanan, dan kepercayaan masyarakat serta mengurangi kemungkinan penipuan selama pemilihan.</p>	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yakni transparansi, yang berkaitan dengan kualitas keterbukaan informasi publik dan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. Dalam hal ini, integrasi data kepemiluan dalam portal Satu Data Indonesia yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan tersedianya platform e-rekap beserta rencana pengembangannya guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang terpercaya merupakan perwujudan nilai transparansi.</p>	
Informasi tambahan	<p>Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) No. 16, yakni “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”, khususnya pada target 16.6 yang berbunyi “mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat”, karena di samping mampu mewujudkan keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, integrasi data kepemiluan juga merupakan salah satu langkah mewujudkan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan guna mendukung pembangunan yang adil serta berkelanjutan.</p>	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pemilu 2019 secara daring di portal resmi KPU	April 2019	Desember 2019
2. Integrasi publikasi data penyelenggaraan pemilu dalam satu portal resmi KPU. integrasi yang dimaksud dalam indikator ini adalah menghubungkan dua portal ( <a href="http://infopemilu.kpu.go.id">http://infopemilu.kpu.go.id</a> dan <a href="https://www.kpu.go.id/">https://www.kpu.go.id/</a> ) sehingga dapat diakses dalam satu portal.	Januari 2019	Desember 2019

3. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pilkada serentak 2020 secara daring di portal resmi KPU	September 2020	Desember 2020
4. Tersedianya informasi data penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam portal Satu Data ( <a href="http://data.go.id">data.go.id</a> )	Juni 2019	Desember 2020
<b>Informasi Kontak</b>		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS</li> <li>2. Badan Pengawas Pemilu</li> <li>3. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

## VIII. Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Kesehatan
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?</p>	<p>Ketersediaan fasilitas kesehatan (kamar tidur, tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya) masih membutuhkan pembaruan dan publikasi secara berkala.</p> <p>Sebagian besar data terkait fasilitas kesehatan milik belum diperbarui secara teratur oleh rumah sakit ataupun puskesmas. Karena itu informasi ini tidak tersedia di semua fasilitas kesehatan. Belum optimalnya informasi layanan kesehatan ini berpotensi untuk menghambat pelayanan publik, khususnya penduduk miskin yang akan berobat.</p> <p>Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Sistem ini berisi informasi tentang proses manajemen rumah sakit, termasuk layanan diagnostik, perawatan medis untuk pasien, catatan medis, apotek, penagihan, database personel, dan kontrol manajemen. Kedua portal ini telah diintegrasikan ke dalam 366 rumah sakit dan Puskesmas. Mengingat sistem informasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, maka untuk mengoptimalkan pembahasuan data Kementerian Kesehatan harus mendorong rumah sakit maupun puskesmas untuk memperbarui dan mempublikasikan data secara teratur.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Merespon permasalahan yang disampaikan sebelumnya, komitmen bertujuan untuk mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan mempublikasikan data fasilitas kesehatan. Data tersebut dapat dipublikasikan secara teratur melalui Siranap dan SIMRS. Data yang dipublikasikan terdiri dari ketersediaan obat, tenaga medis, kamar dan layanan kesehatan lainnya di 366 fasilitas kesehatan milik pemerintah.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Komitmen ini mendorong Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan penggunaan SIRANAP dan SIMRS. Lebih lanjut, komitmen ini mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperbarui data fasilitas hingga 2020. Dengan melakukan itu, komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan pencegahan penolakan pasien.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yakni transparansi</p>

	yang antara lain berkaitan dengan kualitas keterbukaan informasi publik dan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. Dalam hal ini, upaya untuk mempublikasikan informasi ketersediaan layanan kesehatan yang valid dan <i>real-time</i> dari fasilitas kesehatan milik pemerintah agar dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat merupakan perwujudan dari nilai transparansi.	
Informasi tambahan	Komitmen ini juga mendukung pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) No. 3 yakni “menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia”, khususnya pada target 3.8 yang berbunyi “mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang”, yang secara tidak langsung beririsan dengan Tujuan No. 1 yakni “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun”, khususnya pada target 1.4 yang berbunyi “pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro”.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Tersedianya update data kamar, identitas, dan tenaga medis di Puskesmas pada tahun 2018 melalui portal layanan kesehatan Aplikasi iHeff	Januari 2019	Desember 2019
2. Tersedianya aplikasi Rumah Sakit daring yang terpasang di Dinas Kesehatan	Januari 2019	Desember 2019
3. Tersedianya informasi tentang data pelayanan, SDM dan jumlah tempat tidur di rumah sakit melalui portal layanan kesehatan	Januari 2020	Desember 2020
<b>Informasi Kontak</b>		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian Dalam Negeri
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	<i>Indonesian Corruption Watch</i> (ICW)

## IX. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik Pemerintah Indonesia

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Masyarakat kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, sementara pemerintah mengetahui keluhan tersebut. Merespon keluhan dari masyarakat terdapat instrumen untuk saling berbenah. Melalui Forum Konsultasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik pada Unit Layanan Publik. Peraturan tersebut juga didukung oleh Surat Edaran No. 56/2017 tentang Pembentukan Publik Forum Konsultasi dalam Layanan Publik.</p> <p>Peraturan tersebut mengamanatkan masing-masing lembaga pemerintah yang melakukan layanan publik untuk mengimplementasikan Forum Konsultasi Publik sebagai platform untuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan layanan publik. Selain itu, semua lembaga pemerintah yang melakukan layanan publik diharuskan memiliki Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk keterlibatan publik dalam manajemen layanan publik. Untuk mendukung implementasi, setiap lembaga harus memiliki dokumen seperti 1. maklumat layanan publik; 2. Standar layanan; 3. Pemantauan dan evaluasi manajemen layanan publik; 4. Menghargai; 5. Survei kepuasan masyarakat; dan 6. Peraturan lain terkait layanan publik.</p> <p>Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik harus dilakukan dengan interaksi tatap muka seperti pertemuan bersama, diskusi kelompok fokus, audiensi publik, lokakarya akademik, dan konferensi perencanaan pembangunan. Ini juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan komunikasi radio, acara bincang-bincang di televisi, media sosial, aplikasi online, dan saluran survei dan pengaduan.</p> <p>Komitmen ini sebelumnya dimasukkan dalam Rencana Aksi Nasional Pemerintah Terbuka 2016-2017. Namun, berdasarkan data dari Kementerian PAN dan RB, belum semua kementerian/lembaga melakukan Forum Konsultasi Publik. Maka, untuk mendorong implementasi forum tersebut maka komitmen ini kembali diusulkan dalam Rencana Aksi Nasional 2018-2020 untuk mendorong partisipasi publik. Selain itu, komitmen ini mendorong</p>

	<p>agar Forum Konsultasi Publik dapat diimplementasikan di tiga kementerian, yaitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Komitmen Forum Konsultasi Publik muncul dua kali dalam Rencana Aksi Nasional Pemerintah Terbuka. Dalam Rencana Aksi Nasional 2018-2020, Forum Konsultasi Publik akan fokus pada sosialisasi khususnya di tingkat kementerian dan lembaga, serta mendaftar jumlah lembaga pemerintah yang sudah menerapkan Forum Konsultasi Publik.</p> <p>Forum Konsultasi Publik dapat dilakukan dengan interaksi tatap muka seperti pertemuan bersama, diskusi kelompok fokus, audiensi publik, lokakarya akademik, dan konferensi perencanaan pembangunan. Ini juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan komunikasi radio, acara bincang-bincang di televisi, media sosial, aplikasi online, dan saluran survei dan pengaduan. Daftar stakeholder yang dapat dilibatkan adalah media, sektor swasta, organisasi wanita, organisasi masyarakat sipil, dan banyak lagi. Sebagai proyek percontohan Forum Konsultasi Publik, akan difokuskan pada tiga sektor: Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberantasan Kemiskinan.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Komitmen tersebut dilaksanakan dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk segera memprakarsai pembentukan Forum Konsultasi Publik, diikuti oleh tiga langkah implementasi yang terdiri dari tiga fase, yaitu, pra-implementasi, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi.</p> <p>Ketiga langkah tersebut mengamanatkan konsultasi publik untuk dilakukan mulai dari konsep formulasi, penyelesaian masalah, hingga pemantauan dan pengamatan oleh masyarakat. Lebih jauh, Kementerian Administrasi dan Reformasi Birokrasi membuat daftar kementerian dan lembaga yang telah menerapkan Forum Konsultasi Publik.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini relevan dengan nilai-nilai Kemitraan Pemerintah Terbuka yang transparan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Transparansi terkait dengan kualitas pengungkapan informasi publik dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.</li> <li>● Partisipasi warga di mana ada keterbukaan proses pembuatan regulasi yang melibatkan masyarakat dengan berbagai media.</li> <li>● Akuntabilitas dalam regulasi atau mekanisme di mana pemerintah dapat bertanggung jawab atas setiap peraturan atau keputusan yang diambilnya.</li> </ul>

	<p>Manifestasi transparansi ditunjukkan oleh pembukaan data peraturan, program, dan hasil pemantauan-evaluasi pelaksanaan layanan publik yang dapat diakses oleh orang-orang sebelum menghadiri Forum Konsultasi Publik. Kemudian, partisipasi publik ditunjukkan dalam penegakan Forum Konsultasi Publik di setiap kementerian dan lembaga sehingga orang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan layanan publik. Selanjutnya, akuntabilitas diaktualisasikan oleh Forum Konsultasi Publik sebagai mekanisme di mana pemerintah memberikan tanggapan terhadap pendapat masyarakat tentang pemberian layanan publik.</p>	
Informasi tambahan	<p>Komitmen ini sejalan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) No. 16: "Promosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan." Terutama pada no. 16.7: "Pastikan pengambilan keputusan responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan" dan pada no. 16.10: "Memastikan akses publik ke informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan undang-undang nasional dan perjanjian internasional." Komitmen ini menunjukkan pengakuan akan pentingnya mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka dan partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan.</p>	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Terlaksananya sosialisasi Forum Konsultasi Publik di 90 Instansi Pemerintah	Januari 2019	Desember 2019
2. Mengembangkan data base yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi FKP	September 2020	Desember 2020
3. Sebanyak 3 (tiga) pilot project pelaksanaan forum konsultasi publik di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial	Januari 2020	Desember 2020
<b>Informasi Kontak</b>		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>2. Kementerian Kesehatan</li> <li>3. Kementerian Sosial</li> <li>4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</li> <li>5. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>

	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	YAPPIKA- <i>ActionAid</i>
--	---	---------------------------

## X. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPOR!-SP4N

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?</p>	<p>Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan layanan publik nasional. Mandat ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Pada tahun 2016, LAPOR! dikukuhkan sebagai Sistem Manajemen Pengaduan Layanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 3/2015 tentang <i>Road Map</i> Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Saat ini LAPOR!-SP4N telah terhubung dengan 88 K/L, 135 Pemerintah Daerah, 128 Universitas Nasional dan Koordinasi Universitas Swasta, 131 Perwakilan Indonesia di luar negeri dan 116 badan usaha milik negara di Indonesia. Keberadaan LAPOR!-SP4N mulai dikenal luas oleh masyarakat, terlihat dari jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 1.180.609 pengaduan (per 2017).</p> <p>Namun masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh LAPOR!-SP4N, termasuk (i) jumlah laporan yang ditindaklanjuti masih rendah; (ii) proses integrasi di tingkat pemerintah daerah masih lambat, bahkan cenderung hanya formalitas (terbatas pada keputusan) tanpa dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai; (iii) tanggapan dari LAPOR!-SP4N manajer yang belum berhasil memuaskan reporter</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Meningkatkan jumlah laporan melalui perbaikan kualitas penyelesaian pengaduan layanan publik melalui LAPOR!-SP4N. Peningkatan ini ditandai dengan semakin banyak lembaga publik yang terhubung dengan LAPOR! dan pengawasan LAPOR!-SP4N dikategorikan baik.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Tantangan yang dihadapi oleh LAPOR!-SP4N akan diatasi melalui sejumlah komitmen strategis yang harus dilakukan oleh KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.</p> <p><b>Pertama</b>, KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia harus menetapkan standar dasar yang akan menjadi rujukan untuk manajemen pengaduan yang dibentuk oleh K/L, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.</p>

	<p>Produk dari komitmen ini dapat dalam bentuk SOP atau Manual Penanganan Keluhan. Keberadaan ini akan menjaga standar kualitas dalam menangani keluhan.</p> <p><b>Kedua</b>, KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI perlu membentuk task force yang bertugas untuk melakukan asistensi teknis kepada unit pengelola pengaduan di K/L, Pemda dan BUMN. Asistensi akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada, lingkupnya meliputi proses pembentukan unit pengelola pengaduan, <i>set-up</i> LAPORI-SP4N, peningkatan kapasitas tim pengelola, hingga evaluasi penanganan pengaduan. Selain itu hal ini akan memperkuat sinergi antara KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI dengan stakeholder dalam memberikan asistensi kepada unit pengelola pengaduan.</p> <p><b>Ketiga</b>, untuk memastikan penanganan pengaduan dilakukan secara benar, keberadaan standar baku tidak cukup. Dibutuhkan forum yang lebih strategis, melibatkan pejabat pembuat kebijakan dan stakeholder strategis untuk mengevaluasi dan menganalisa tren pengaduan yang masuk. Forum ini juga dapat diposisikan sebagai forum kebijakan, karena akan menggunakan data pengaduan sebagai basis di dalam menyusun langkah kebijakan perbaikan pelayanan publik.</p> <p><b>Keempat</b>, publikasi status penanganan pengaduan termasuk respons kepuasan dari pelapor. Informasi ini penting untuk dipublikasikan sebagai bagian dari kontrol publik atas kinerja penanganan pengaduan pelayanan publik. Bagi pelapor, informasi ini akan memudahkan mereka untuk memantau status dari laporan mereka.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Komitmen ini akan membuka akses informasi tentang perkembangan penanganan pengaduan secara lebih luas kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pemerintahan</li> <li>● Meningkatkan kualitas akses pelayanan publik karena adanya perbaikan layanan yang berasal dari tindak lanjut pengaduan sehingga dapat mendorong akuntabilitas pelayanan publik.</li> <li>● Memperkuat sinergi antara pembuat kebijakan, stakeholder dan masyarakat dalam menelaah data pengaduan untuk rekomendasi perbaikan kebijakan.</li> </ul>
<p>Informasi tambahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Komitmen ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5, terutama dalam Program Prioritas "Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi".</li> <li>● Tim bantuan telah dibentuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi</li> </ul>

	Birokrasi dengan melibatkan Ombudsman Republik Indonesia dan Kantor Staf Presiden. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji coba dapat disinergikan dengan pilihan daerah yang telah dipilih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</li> </ul>	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Peningkatan penetrasi LAPOR!-SP4N di lembaga pemerintah (target 500 lembaga)	Januari 2019	Desember 2019
2. Laporan pengaduan melalui LAPOR!-SP4N telah ditindaklanjuti (target meningkat 25%)	Januari 2020	Desember 2020
3. Peningkatan kinerja manajemen LAPOR! oleh lembaga pemerintah (target meningkat 15%)	September 2020	Desember 2020
Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS 2. Ombudsman RI
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	YAPPIKA-ActionAid

## XI. Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

January 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Pemerintah pusat telah membuat portal pelaporan dan pengaduan untuk masalah lingkungan. Melalui LAPOR!-SP4N, orang dapat mengajukan keluhan mereka tentang masalah lingkungan. Selain itu, KLHK juga telah menyiapkan sistem manajemen pengaduan melalui penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22/2017 tentang Prosedur untuk Mengelola Pengaduan tentang Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dan / atau Deforestasi.</p> <p>Selain itu, sistem manajemen pengaduan di KLHK dikelola oleh tiga direktorat yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Direktorat Pengaduan Manajemen, Pengawasan, Sanksi Administrasi, dan Inspektorat Jenderal. Ketiga platform ini belum terintegrasi. Akibatnya, hal itu menyebabkan masyarakat harus memastikan ia mengajukan keluhan kepada administrator yang tepat. Untuk alasan ini, diperlukan integrasi sistem pengaduan dalam KLHK untuk mengelola pengaduan yang berkualitas, transparan dan partisipatif.</p> <p>Sebelumnya, komitmen terkait dengan pengaduan tentang lingkungan juga ditulis dalam Rencana Aksi Pemerintah Indonesia Terbuka 2016-2017. Komitmen tersebut mencakup integrasi <i>platform</i> pengaduan KLHK dengan LAPOR!-SP4N, namun tidak mencapai target karena kendala teknis dan peraturan terkait dengan sistem pengaduan di KLHK. Menimbang bahwa, pada 2018-2020 komitmen akan lebih fokus pada pengorganisasian pengaduan internal di KLHK agar memiliki sistem pengaduan satu pintu.</p>
Apa bentuk komitmennya?	<p>Terdapat tiga portal pengaduan untuk masalah lingkungan di KLHK. Komitmen ini menargetkan optimalisasi peran LAPOR! dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang tim manajemen LAPOR dalam KLHK. Selain itu, untuk memberikan jalur yang jelas, dalam komitmen ini juga dikeluarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) Sistem Pengaduan satu pintu di bidang lingkungan dan kehutanan. Selain itu, satu pintu komitmen manajemen keluhan akan memudahkan orang untuk mengajukan keluhan. Ini juga akan mempercepat</p>

	<p>proses manajemen dalam menangani pengaduan dan memotong proses koordinasi karena semua direktorat dapat mengakses laporan.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Laporan pengaduan dan keterlibatan partisipatif dalam mekanisme pemantauan lingkungan diharapkan untuk membantu KLHK. Selain kebutuhan masyarakat, KLHK juga dapat memantau kinerja manajemen pengaduan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh lembaga lingkungan di bawah kementerian.</p> <p>Ada dua arah strategi untuk mencapai komitmen ini, pertama, melalui peningkatan aturan manajemen terkait dengan keluhan lingkungan. SOP adalah sebagai dasar untuk memperkuat dan sebagai jaminan kepastian hukum untuk melaksanakan pengaduan. Lebih lanjut, perbaikan dan penguatan mekanisme dan sistem informasi daring diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemeliharaan lingkungan.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Adanya sistem informasi pengaduan dan/atau pengawasan membuka lebih banyak informasi mengenai status pengelolaan pengaduan dan/atau pengawasan yang dilakukan oleh KLHK dan instansi dibawahnya. Sistem informasi ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik yang tepat dalam hal pengelolaan pengaduan dan pengawasan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku (baik terkait jangka waktu maupun metode). Sehingga akan mendorong nilai-nilai partisipasi masyarakat. Sistem ini memungkinkan KLHK memonitoring instansi di bawahnya untuk melakukan pengelolaan pengaduan dan pengawasan dengan standar yang sama dan menghindari terjadinya double pengelolaan pengaduan atau pengawasan. Selain itu memungkinkan KLHK untuk melakukan <i>second line inspection</i> dan <i>second line enforcement</i> dengan lebih efektif. Dengan demikian akan mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja KLHK.</p> <p>Komitmen ini juga akan diintegrasikan ke dalam Peraturan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan yang pada saat yang sama sedang dikembangkan.</p>
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan upaya Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah agenda internasional untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan transparan. Terutama di No. 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Selain itu, komitmen ini juga bersinggungan dengan SDGs No. 12 tentang Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dan No. 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim.</p>

	<p>Komitmen ini juga menjadi capaian KLHK dalam <i>UN Framework Convention on Climate Change</i> (UNFCCC) di bawah ketentuan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim melalui Kerangka Kerja Transparansi. Prestasi ini juga menjadi bagian dari <i>The Project for Advancing Climate Transparency</i> (PACT), sebuah konsorsium yang mendukung desain dan pengembangan efektivitas transparansi dan akuntabilitas dalam laporan lingkungan.</p>	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang tim manajemen LAPOR!-SP4N dalam KLHK.	Juni 2019	Desember 2019
2. Perumusan SOP digunakan untuk mekanisme penanganan pengaduan satu pintu dalam lingkup KLHK	Maret 2020	Desember 2020
Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)</li> <li>2. Ombudsman RI</li> </ol>
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	<i>Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)</i>

## XII. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

January 2019 - December 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</li> <li>2. Komisi Informasi Pusat (KIP)</li> </ol>
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Menurut catatan LKPP, negara ini masih dalam defisit 15 miliar USD per tahun atau hampir 200 triliun rupiah karena proses pengadaan yang buruk.</p> <p>Salah satu solusi untuk mencegah dan mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses pengadaan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dokumen pengadaan.</p> <p>Meskipun saat ini pemerintah menerbitkan informasi pengadaan secara luring dan daring, tetapi, berdasarkan <i>Scoping Study Open Contracting</i> di Indonesia (2016), enam tahap dokumen pengadaan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir belum dipublikasikan. Selama ini, informasi yang tersedia di situs web hanya terbatas pada informasi tentang proses seleksi, sisanya dari proses belum tersedia. Oleh karena itu, inisiatif keterbukaan kontrak diharapkan dapat membantu transparansi pengadaan publik diikuti dengan data dan konten standar.</p>
Apa bentuk komitmennya?	<p>Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berfokus pada percepatan kemudahan proses pengadaan. Peraturan tersebut mengamanatkan integrasi sistem pengadaan yang terdiri dari proses perencanaan program, penganggaran, hingga pemantauan dan evaluasi. Sistem ini disebut Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).</p> <p>Namun, berdasarkan peraturan tersebut, belum banyak dokumen tahapan pengadaan yang terpublikasikan. LKPP dan KIP akan mengeluarkan kebijakan (peraturan dan keputusan) terkait dengan daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>Selanjutnya, untuk memperkuat sistem pemantauan yang diamanatkan oleh peraturan, LKPP harus menambahkan komponen pemantauan untuk pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan masyarakat sipil.</p>
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	<p>Komitmen ini bertujuan untuk mempraktikkan transparansi dalam proses pengadaan secara komprehensif. Salah satu solusi telah diupayakan melalui publikasi dokumen pengadaan. Dokumen-dokumen ini harus konsisten,</p>

	terstandarisasi, dan dapat diakses oleh pengguna untuk dianalisis sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi. Selain itu, transparansi dalam proses ini diharapkan dapat mencegah korupsi, pengadaan palsu, dan proyek yang belum selesai.	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini relevan dengan nilai-nilai OGP, seperti pengungkapan informasi, partisipasi publik, transparansi, dan inovasi teknologi. Dengan menggunakan SPSE yang terintegrasi, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah akan lebih akuntabel. Komitmen ini juga mendorong transparansi dan partisipasi publik.	
Informasi tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbukaan kontrak menjadi salah satu indikator untuk menentukan pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), khususnya terkait dengan Agenda 16.10.</li> <li>• Komitmen kontrak terbuka adalah inisiatif yang awalnya dibawa oleh Kabupaten Bojonegoro dan organisasi masyarakat sipil setempat melalui Program Percontohan Sub-nasional OGP. Selain itu, kontrak terbuka telah didukung oleh Komite Pengarah OGP melalui KTT Regional OGP 2017 dan KTT Global OGP 2016.</li> <li>• Beberapa organisasi masyarakat sipil, misalnya Bojonegoro Institute (BI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII) telah mendukung komitmen ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah sejak tahun lalu. Pusat Informasi dan Studi Regional (PATTIRO) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) akan mendukung komitmen ini juga.</li> </ul>	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP)		
1. Ketersediaan Keputusan Kepala LKPP tentang daftar informasi publik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat	Januari 2019	September 2019
2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di semua pengadaan pemerintah (Perencanaan, Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan,	Januari 2019	Desember 2020

Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak, dan Serah Terima) di lembaga-lembaga pemerintah.			
3. <i>Workshop</i> Pengawasan Pengadaan Publik untuk organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional atau regional.		Januari 2019	Desember 2020
Komisi Informasi Pusat (KIP)			
1. Konsultasi publik untuk memperoleh tanggapan masyarakat terhadap pengungkapan informasi publik mengacu pada peraturan pengungkapan informasi publik yang dikeluarkan oleh LKPP.		Januari 2020	September 2020
2. Terbitnya Perki Terkait dengan Daftar Informasi Publik untuk Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah yang merujuk pada regulasi yang diterbitkan oleh Kepala LKPP .		September 2020	Desember 2020
<b>Informasi Kontak</b>			
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Indonesia Corruption Watch (ICW)</i></li> <li>2. <i>Transparency International Indonesia (TII)</i></li> </ol>	

### XIII. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Komisi Informasi Pusat (KIP)
<b>Deskripsi Komitmen</b>	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengamanatkan badan publik untuk menyediakan dan mempublikasikan informasi publik kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). Namun kondisi saat ini menunjukkan kesulitan masyarakat dalam mengakses data dan informasi publik. Masyarakat harus datang langsung ke kantor badan publik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pengembangan data di tingkat regional juga belum optimalisasikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pelayanan informasi publik tak dapat dilakukan secara elektronik. Tidak tersedianya platform pelayanan permohonan data juga membatasi pemerintah untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan data yang harus dipublikasikan.</p> <p>Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, hadirnya pergeseran paradigma tata kelola ke arah tata kelola berbasis elektronik ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini mewajibkan semua badan publik untuk melakukan digitalisasi layanan publik dan permohonan informasi publik guna menghemat anggaran dan sumber daya. Di sisi lain, dokumentasi permohonan informasi diharapkan didasarkan pada prinsip Satu Data Indonesia. Dengan berbasis pada prinsip tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan dan menganalisis data yang tersedia di badan publik. Rencana aksi ini berkomitmen untuk mendorong digitalisasi permohonan informasi publik dengan mengembangkan sistem dan perangkat kelembagaan yang memungkinkan pemerintah untuk menjembatani kebutuhan publik akan informasi, dengan penyedia informasi--dalam hal ini badan publik--secara efisien, efektif, serta murah.</p>
Apa bentuk komitmennya?	<p>Komitmen ini bertujuan untuk membantu upaya digitalisasi permohonan informasi publik dengan melakukan pengembangan sistem permohonan data dalam portal LAPOR!-SP4N. Saat ini LAPOR!-SP4N telah terintegrasi dengan 34 Kementerian/Lembaga dan 303 pemerintah lokal. Maka dari itu, fitur tersebut akan menyederhanakan proses permohonan data dan informasi yang mengintegrasikan LAPOR!-SP4N</p>

	<p>dengan PPID di badan publik berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Selanjutnya, sistem yang terintegrasi dengan LAPOR!-SP4N akan memfasilitasi masyarakat untuk dengan mudah mengajukan data yang dibutuhkan agar dipublikasikan oleh pemerintah.</p> <p>Prinsip yang dimaksud dalam Satu Data Indonesia adalah pemanfaatan data dalam standar data yang sama seperti konsep, definisi, klasifikasi, pengukuran, unit dan asumsi. Selain itu, data akan memiliki metadata mentah (<i>raw metadata</i>) yang mana informasi tersebut akan menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memfasilitasi pencarian, penggunaan dan manajemen data.</p> <p>Untuk mencapai komitmen tersebut, harus dilakukan revisi Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, sosialisasi juga diperlukan untuk memperkenalkan standar dan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia baik kepada pemerintah maupun masyarakat sipil.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Melalui permohonan informasi dan data yang dapat diakses secara elektronik, masyarakat difasilitasi untuk mengajukan masukan terkait dengan permohonan tersebut kepada pemerintah. Data dapat dikirimkan secara daring, sehingga masyarakat tak lagi diminta untuk menunggu terlalu lama untuk data yang mereka butuhkan. Di sisi lain, dokumentasi permohonan informasi dan data dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperkaya jenis dan kebutuhan data yang perlu untuk dipublikasikan.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) yakni transparansi dan inovasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparansi berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi permohonan informasi publik; dan</li> <li>• Inovasi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akses terhadap informasi publik melalui pengembangan dashboard dalam sistem LAPOR!.</li> </ul>
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) No. 16 yakni “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”, khususnya pada target 16.10 yang berbunyi “menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional”.</p>

Indikator capaian dengan target terukur		Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Implementasi pemeringkatan keterbukaan lembaga publik oleh Komisi Informasi Provinsi dengan menggunakan prinsip Satu Data Indonesia sebagai indikator tambahan		Juli 2019 Juli 2020	Desember 2019 Desember 2020
2. Mendorong tersedianya pelayanan permohonan informasi publik melalui LAPORI-SP4N (dilakukan di Kota/Kabupaten terpilih di 5 Provinsi)		Januari 2019	Desember 2020
3. Terlaksananya revisi Perki No. 1/2010 untuk mendukung permohonan informasi publik berbasis elektronik		Januari 2019	Desember 2019
Informasi Kontak			
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat</li> <li>2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur</li> <li>4. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>5. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara</li> </ol>	
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Open Data Lab</i></li> <li>2. <i>Freedom of Information Network Indonesia (FIONI)</i></li> <li>3. <i>Plan C</i></li> </ol>	

#### XIV. Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?</p>	<p>Dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan (<i>access to justice</i>) dan kesamaan di hadapan hukum (<i>equality before the law</i>) merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh Negara. Dalam hal ini, layanan bantuan hukum memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk mendapatkan hak konstitusionalnya lewat jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma sebagaimana diamanatkan UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum.</p> <p>Namun terdapat beberapa faktor yang masih menghambat pemenuhan hak tersebut, diantaranya (a) keterbatasan anggaran bantuan hukum nasional di tengah semakin meningkatnya kasus hukum yang ditangani; (b) jangkauan bantuan hukum yang terbatas karena belum meratanya persebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sampai ke tingkat daerah di luar Pulau Jawa; (c) kualitas layanan bantuan hukum yang masih rendah baik dari sisi kelembagaan maupun kapasitas penanganan kasus hukum; dan (d) rendahnya kesadaran hukum (<i>legal awareness</i>) masyarakat, khususnya masyarakat miskin.</p> <p>Renaksi ini berkomitmen untuk memperluas dan meningkatkan kuantitas serta kualitas layanan bantuan hukum yang menyasar seluruh masyarakat, tak terkecuali masyarakat miskin.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Komitmen ini berupaya meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat yang didorong melalui dua aspek, yakni melalui kebijakan dan juga sosialisasi kepada masyarakat luas maupun OBH.</p> <p>Hadirnya regulasi yang menjamin pemerintah untuk mendukung akses terhadap bantuan hukum akan menjadi dasar bagi OBH untuk dapat memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat. Selanjutnya, adanya pendidikan dan sosialisasi untuk membangun kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu poin agar masyarakat memahami hak untuk diperlakukan setara di depan hukum. Pada akhirnya,</p>

	tujuan dari komitmen ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan OBH sehingga orang mendapatkan akses yang setara di hadapan hukum.	
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Komitmen ini bertujuan agar semakin banyak masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Selain itu, komitmen ini juga berupaya memperkuat kesadaran dan kapasitas hukum masyarakat, utamanya yang miskin dan terpinggirkan. Selain digunakan untuk menyediakan layanan bantuan hukum melalui OBH, anggaran bantuan hukum dalam APBN dan APBD juga harus dimanfaatkan untuk program sosialisasi bantuan hukum. Pembentukan Layanan Hukum Komunitas ( <i>Community Legal Center</i> ) yang dilakukan oleh BPHN akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum.	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Kesadaran hukum ( <i>legal awareness</i> ) yang semakin tinggi juga akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengakses informasi. Penyediaan layanan bantuan hukum juga akan memberi ruang bagi masyarakat untuk menuntut kebijakan publik yang melanggar hak mereka sebagai warga negara.	
Informasi tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, tujuan pembangunan hukum adalah untuk memperkuat kehadiran negara dalam menerapkan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</li> <li>• Indonesia juga memiliki Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dimana aspek bantuan hukum ditetapkan sebagai strategi ke-3, yaitu “memperkuat akses keadilan pada bantuan hukum”.</li> <li>• Melalui Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), Indonesia menetapkan komitmennya untuk mencapai SDGs, khususnya pada tujuan ke-16 “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”.</li> </ul>	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Meningkatnya Jumlah Perda Bantuan Hukum di tingkat Kabupaten/Kota menjadi 100 Perda.	Januari 2019	September 2019

2. Tersedianya 21 Perda Bantuan Hukum di tingkat Provinsi.	Januari 2020	September 2020
3. Meningkatnya jumlah penerima layanan bantuan hukum (informasi, konsultasi, pendampingan hukum) menjadi 20.000 orang.	Januari 2019	September 2020
4. Membaiknya indeks kepuasan penerima layanan bantuan hukum, yang mana 50% target penerima menyatakan cukup puas atau sangat puas.	September 2019 September 2020	Desember 2019 Desember 2020
<b>Informasi Kontak</b>		
Aktor lain yang terlibat	State actors involved	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS
	CSOs, private sector, multilaterals, working groups	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)</li> <li>2. MediaLink</li> </ol>

## XV. Pengarusutamaan Nilai-Nilai Keterbukaan Pemerintah pada Pelaksanaan *Smart City*

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS</li> <li>2. Kantor Staf Presiden</li> </ol>
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	<p>Sebagai sebuah tren global, <i>Smart City</i> telah diterapkan di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia melalui Gerakan Menuju 100 <i>Smart City</i> yang secara bersama-sama diampu oleh beberapa kementerian dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.</p> <p>Melalui program 100 Kota Pintar, pemerintah daerah di dorong untuk mendesain kotanya dalam enam dimensi, yakni <i>Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment</i>. Keenam komponen tersebut beririsan dengan prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah yang terdiri dari Akses Informasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Publik, Teknologi dan Inovasi untuk keterbukaan dan akuntabilitas.</p> <p>Dengan meninjau kedua dimensi <i>Smart City</i> dan prinsip dalam Keterbukaan Pemerintah. Harapannya dapat terjalin kolaborasi, sehingga dalam merumuskan masterplan <i>Smart City</i> ataupun dalam implementasi akan lebih partisipatif dan menjawab kebutuhan masyarakat.</p>
Apa bentuk komitmennya?	<p>Komitmen ini mendorong Sekretariat OGI untuk terlibat aktif memberikan informasi dan menyediakan panduan keterbukaan pemerintah kepada 25 daerah dampingan. 25 daerah tersebut akan terpapar informasi tentang manfaat serta metode ko kreasi yang menjadi poin penting dalam pelaksanaan keterbukaan pemerintah. Selain itu, komitmen untuk berkolaborasi ini juga akan memperkuat inisiatif dan keberlanjutan program <i>Smart City</i>.</p>
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	<p>Komitmen ini mendorong terlaksananya sosialisasi tentang <i>Open Government</i> kepada 25 daerah Gerakan Menuju 100 <i>Smart City</i> Selain itu, komitmen ini juga mendorong tersedianya panduan tentang prinsip-prinsip <i>Open Government</i> dalam kerangka besar pelaksanaan <i>Smart City</i>.</p>
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	<p>Komitmen ini sejalan dengan beberapa nilai <i>Open Government Partnership</i> (OGP) seperti partisipasi publik dan transparansi, yang mana relevansi dari nilai partisipasi publik adalah tersedianya ruang bagi</p>

	masyarakat bersama dengan pemerintah untuk turut serta berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan <i>Smart City</i> , sedangkan relevansi nilai transparansi adalah terbukanya akses terhadap informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas.	
Informasi tambahan	Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Nomor 16 yakni “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”, khususnya pada target 16.7 yang berbunyi “menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan” dan target 16.10 yang berbunyi “menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional”.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Penyusunan dokumen dan/atau materi sosialisasi program <i>Open Government</i>	Januari 2019	Maret 2019
2. Diseminasi dokumen dan/atau materi sosialisasi program <i>Open Government</i> Indonesia, pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan <i>masterplan Smart City</i>	Maret 2019	Desember 2020
3. Perwakilan Sekretariat Open Government Indonesia dapat ikut serta menjadi salah satu pemateri (narasumber) pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan <i>masterplan Smart City</i>	Januari 2019	Desember 2020
<b>Informasi Kontak</b>		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS</li> </ol>
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Indonesia Corruption Watch</i> (ICW)</li> <li>2. <i>Transparency International Indonesia</i> (TII)</li> <li>3. MediaLink</li> <li>4. <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i> (INFID)</li> <li>5. <i>Indonesian Parliamentary Center</i> (IPC)</li> </ol>

## XVI. Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Deskripsi Komitmen	
<p>Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?</p>	<p>Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah arah kebijakan yang akan diatur dalam RPJMN 2020-2024 adalah terkait isu keterbukaan pemerintah seiring dengan tren tatakelola pemerintahan ke depan. Untuk itu, diperlukan peta jalan keterbukaan pemerintah sebagai bahan masukan bagi Rancangan RPJMN 2020-2024.</p>
<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Komitmen ini bertujuan untuk mendorong terlaksananya penyempurnaan Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka dan implementasi rencana kerja Tim Koordinasi OGI termasuk di dalamnya penyusunan implementasi renaksi OGI 2018-2020.</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?</p>	<p>Komitmen ini akan mendorong institusionalisasi kebijakan keterbukaan pemerintah, melalui penyediaan peta jalan bagi pendalaman pelaksanaan kebijakan keterbukaan pemerintah.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai Open Government Partnership (OGP) yakni partisipasi publik. Meskipun publik tidak dimaknai sebagai masyarakat luas pada umumnya, partisipasi publik disini dilihat sebagai adanya ruang pelibatan dan kerjasama antar instansi terkait, CSO dan organisasi donor dalam menyusun rencana aksi dan rencana kerja penguatan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintahan Indonesia.</p>
<p>Informasi tambahan</p>	<p>Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) No. 16 yakni “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”, khususnya pada target 16.6 yang berbunyi “mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat” dan target 16.10 yang berbunyi “menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional”, karena hadirnya tata kelola</p>

Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini sejalan dengan nilai Open Government Partnership (OGP) yakni partisipasi publik. Meskipun publik tidak dimaknai sebagai masyarakat luas pada umumnya, partisipasi publik disini dilihat sebagai adanya ruang pelibatan dan kerjasama antar instansi terkait, CSO dan organisasi donor dalam menyusun rencana aksi dan rencana kerja penguatan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintahan Indonesia.	
Informasi tambahan	penyelenggaraan keterbukaan pemerintahan yang kuat dan mampu menjamin keterbukaan di seluruh instansi pemerintahan merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Penyempurnaan Peta Jalan (termasuk kerangka regulasi, sosialisasi Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka dan Indeks Keterbukaan Pemerintah)	Januari 2019	Desember 2020
2. Implementasi rencana kerja Tim Koordinasi OGI (pertemuan dewan pengarah, <i>donor meeting</i> , termasuk implementasi renaksi OGI 2018-2020)	Januari 2019	Desember 2020
<b>Informasi Kontak</b>		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian Luar Negeri
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MediaLink</li> <li>2. <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i> (INFID)</li> </ol>

LAMPIRAN  
**DAFTAR KOMITMEN  
RENCANA AKSI KETERBUKAAN  
PEMERINTAH INDONESIA  
2018-2020**



# LAMPIRAN-DAFTAR KOMITMEN RENCANA AKSI KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA 2018-2020

## A. KOMITMEN GLOBAL

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
01	Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan <b>(Berdasarkan Aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2019-2020)</b>	Tersedianya dan dimanfaatkannya basis data <i>Beneficial Ownership</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Sistem Pengelolaan Administrasi Korporasi</li> <li>2. Digunakannya basis data <i>Beneficial Ownership</i> untuk pencegahan penyalahgunaan <i>legal persons/arrangements</i> untuk tujuan anti pencucian uang/pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan penyalahgunaan perpajakan.</li> <li>3. Digunakannya basis data <i>Beneficial Ownership</i> sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>2. Kementerian Keuangan</li> <li>3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li> <li>4. Kementerian Pertanian</li> <li>5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia</li> <li>2. Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</li> <li>5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>6. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>8. Kementerian Perdagangan</li> <li>9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha</li> <li>11. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi</li> </ol>	<i>Publish What You Pay (PWYP)</i> Indonesia
02	Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Data PBI sesuai dengan hasil aspirasi masyarakat</li> <li>2. Tersusunnya Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS)</li> </ol>	1. Aplikasi sistem informasi tentang kesejahteraan sosial menyediakan semua proses pembaruan data sebagai hasil dari verifikasi daring. Sebagai <i>platform</i> data, sistem ini juga menyediakan data yang akurat dan valid, diperkaya dengan fitur ekspor dan	Kementerian Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Kesehatan</li> <li>2. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)</li> <li>3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</li> </ol>	MediaLink

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
		Modul PBI 3. Tersusunnya surat penetapan PBI JK	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. impor data.</li> <li>2. Pelaksanaan pertemuan konsultasi publik melalui musyawarah kelurahan / desa atau forum lain untuk pembaruan data PBI</li> <li>3. Ketersediaan dua belas keputusan menteri tentang data yang diperbarui dari penerima PBI berdasarkan input partisipasi warga</li> </ul>			
03	Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/ Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di kementerian/ lembaga</li> <li>2. Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan nota kesepahaman tentang publikasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dengan Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Sosial</li> <li>2. Publikasi informasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan hingga biaya kegiatan di portal data APBN</li> <li>3. Pembentukan portal data anggaran daerah (<i>E-Budgeting</i>) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri</li> <li>4. Ketersediaan data anggaran dari 34 provinsi di portal <i>E-Budgeting</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Kementerian Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>2. Kementerian Kesehatan</li> <li>3. Kementerian Sosial</li> </ul>	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
04	Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif	Tersediannya usulan perencanaan anggaran pendidikan berbasis data NPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi NPD kepada masyarakat sipil dan pemerintah daerah</li> <li>2. Penyelenggaraan forum konsultasi untuk rencana anggaran masyarakat pendidikan dengan masyarakat sipil di daerah</li> </ol>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ombudsman RI</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>	<i>Transparency International Indonesia</i> (TII)
05	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam melaksanakan Musyawarah Desa yang partisipatif</li> <li>2. Tersedianya harmonisasi peraturan Kementerian Desa terkait dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa di 30 desa pada 3 provinsi (Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Barat)</li> <li>2. Tersedianya juknis musyawarah desa dan FGD evaluasi pelaksanaan musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. FGD ini juga mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat sipil untuk memperkaya isi dan proses diskusi.</li> <li>3. Tersedianya <i>draft</i> Permendesa tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Perubahan pada peraturan desa ini juga melibatkan konsultasi publik dengan <i>stakholder</i> dan masyarakat sipil lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PATTIRO</li> <li>2. Wahana Visi Indonesia</li> </ol>

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
			4. Tersedianya <i>draft</i> Permendesa tentang Pendampingan Desa. Perubahan pada peraturan desa ini juga melibatkan konsultasi publik dengan <i>stakeholder</i> dan masyarakat sipil lainnya.			
06	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislati	Tersedianya portal e-legislasi yang dapat diakses oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya SE Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui <i>platform</i> E-Legislati.</li> <li>2. Tersedianya platform E-Legislati dalam <i>website</i> DPRD di 5 kabupaten/ kota.</li> </ol>	Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>2. Komisi Informasi Pusat</li> </ol>	<i>Indonesian Parliamentary Center (IPC)</i>
07	Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Terciptanya transparansi data pemilihan yang dapat diakses oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pemilu 2019 secara daring di portal resmi KPU</li> <li>2. Integrasi publikasi data penyelenggaraan pemilu dalam satu portal resmi KPU. integrasi yang dimaksud dalam indikator ini adalah menghubungkan dua portal (<a href="http://infopemilu.kpu.go.id">http://infopemilu.kpu.go.id</a> dan</li> </ol>	Komisi Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS</li> <li>3. Badan Pengawas Pemilu</li> </ol>	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
			<p><a href="https://www.kpu.go.id/">https://www.kpu.go.id/</a>) sehingga dapat diakses dalam satu portal.</p> <p>3. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pilkada serentak 2020 secara daring di portal resmi KPU</p> <p>4. Tersedianya informasi data penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam portal Satu Data (data.go.id)</p>			
08	Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah	Publikasi Informasi yang valid terkait ketersediaan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya update data kamar, identitas, dan tenaga medis di Puskesmas pada tahun 2018 melalui portal layanan kesehatan Aplikasi iHeff</li> <li>2. Tersedianya aplikasi Rumah Sakit daring yang terpasang di Dinas Kesehatan</li> <li>3. Tersedianya informasi tentang data pelayanan, SDM dan jumlah tempat tidur di rumah sakit melalui portal layanan kesehatan</li> </ol>	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri	<i>Indonesian Corruption Watch (ICW)</i>
09	Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor	Terlaksananya forum konsultasi publik di Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya sosialisasi Forum Konsultasi Publik di 90 Instansi Pemerintah</li> <li>2. Mengembangkan <i>data base</i> yang dapat digunakan untuk</li> </ol>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>2. Kementerian Kesehatan</li> <li>3. Kementerian Sosial</li> <li>4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah</li> </ol>	<i>YAPPIKA-Action Aid</i>

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
	16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik Pemerintah Indonesia		monitoring dan evaluasi FKP 3. Sebanyak 3 (tiga) <i>pilot project</i> pelaksanaan forum konsultasi publik di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial		Tertinggal dan Transmigrasi 5. Kementerian Dalam Negeri	
10	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPOR!-SP4N	1. Peningkatan penetrasi LAPOR! -SP4N di lembaga pemerintah (target 500 lembaga) 2. Peningkatan jumlah pengaduan ditindaklanjuti dalam LAPOR!-SP4N 3. Peningkatan tingkat kepatuhan pengelolaan SOP LAPOR!-SP4N	1. Peningkatan penggunaan LAPOR! di instansi pemerintah (target 500 Instansi) 2. Laporan pengaduan melalui LAPOR!-SP4N telah ditindaklanjuti (target meningkat 25%) 3. Peningkatan kinerja manajemen LAPOR! oleh lembaga pemerintah (target meningkat 15%)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS 2. Ombudsman RI	YAPPIKA-Action Aid
11	Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Sistem Pelayanan Pengelolaan Pengaduan dan Pengawasan Satu Pintu Pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang tim manajemen LAPOR!-SP4N dalam KLHK. 2. Perumusan SOP digunakan untuk mekanisme penanganan pengaduan satu pintu dalam lingkup KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) 2. Ombudsman RI	Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra <sup>ii</sup>
1	2	3	4	5	6	7
12	Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan dan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Keputusan Kepala LKPP tentang daftar informasi publik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat</li> <li>2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di semua pengadaan pemerintah (Perencanaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak, dan Serah Terima) di lembaga-lembaga pemerintah.</li> <li>3. <i>Workshop</i> Pengawasan Pengadaan Publik untuk organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional atau regional.</li> <li>4. Konsultasi publik untuk memperoleh tanggapan masyarakat terhadap pengungkapan informasi publik mengacu pada peraturan pengungkapan informasi publik yang dikeluarkan oleh LKPP.</li> <li>5. Terbitnya Perki Terkait dengan Daftar Informasi Publik untuk Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</li> <li>2. Komisi Informasi Pusat (KIP)</li> </ol>	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Indonesia Corruption Watch</i>(ICW)</li> <li>2. <i>Transparency International Indonesia</i>(TII)</li> </ol>

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
			yang merujuk pada regulasi yang diterbitkan oleh Kepala LKPP .			
13	Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia	Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas berbasis elektronik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi pemeringkatan keterbukaan lembaga publik oleh Komisi Informasi Provinsi dengan menggunakan prinsip Satu Data Indonesia sebagai indikator tambahan</li> <li>2. Mendorong tersedianya pelayanan permohonan informasi publik melalui LAPOR!-SP4N (dilakukan di Kota/Kabupaten terpilih di 5 Provinsi)</li> <li>3. Terlaksananya revisi Perki No. 1/2010 untuk mendukung permohonan informasi publik berbasis elektronik</li> </ol>	Komisi Informasi Pusat (KIP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS</li> <li>2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat</li> <li>3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah</li> <li>4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur</li> <li>5. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>6. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Open Data Lab</i></li> <li>2. <i>Freedom of Information Network Indonesia (FIONI)</i></li> <li>3. Plan C</li> </ol>

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
14	Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum	Tersedianya kerangka regulasi dan peningkatan pelayanan bantuan hukum di daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Jumlah Perda Bantuan Hukum di tingkat Kabupaten/Kota menjadi 100 Perda.</li> <li>Tersedianya 21 Perda Bantuan Hukum di tingkat Provinsi.</li> <li>Meningkatnya jumlah penerima layanan bantuan hukum (informasi, konsultasi, pendampingan hukum) menjadi 20.000 orang.</li> <li>Membaiknya indeks kepuasan penerima layanan bantuan hukum, yang mana 50% target penerima menyatakan cukup puas atau sangat puas.</li> </ol>	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)</li> <li>MediaLink</li> </ol>

## B. KOMITMEN NASIONAL

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
15	Pengarusutamaan Nilai-Nilai Keterbukaan Pemerintah pada Pelaksanaan <i>Smart City</i>	Tersosialisasikannya nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah dalam pelaksanaan <i>Smart City</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dokumen dan/atau materi sosialisasi program <i>Open Government</i></li> <li>Diseminasi dokumen dan/atau materi sosialisasi program <i>Open Government Indonesia</i>,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS</li> <li>Kantor Staf Presiden</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>Kementerian Dalam Negeri</li> <li>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Indonesia Corruption Watch (ICW)</i></li> <li><i>Transparency International Indonesia (TII)</i></li> <li>MediaLink</li> </ol>

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
			<p>pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan <i>masterplan Smart City</i></p> <p>3. Perwakilan Sekretariat <i>Open Government</i> Indonesia dapat ikut serta menjadi salah satu pemateri (narasumber) pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan <i>masterplan Smart City</i>.</p>			<p>4. <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i> (INFID)</p> <p>5. <i>Indonesian Parliamentary Center</i> (IPC)</p>
16	Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia	Tersedianya perencanaan strategis dan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyempurnaan roadmap (termasuk kerangka regulasi, sosialisasi peta jalan OGI dan alat ukur keterbukaan pemerintah)</li> <li>2. Implementasi rencana kerja tim koordinasi OGI (pertemuan dewan pengarah, <i>donor meeting</i>, termasuk implementasi renaksi 2018-2020)</li> </ol>	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS	Kementerian Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MediaLink</li> <li>2. <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i> (INFID)</li> </ol>





# LAMPIRAN II

*Government Self Assessment Report 2017*



OPEN  
GOVERNMENT  
INDONESIA

# Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia Tahun 2017

*Indonesia End of Term Self-Assessment Report of 4th  
National Action Plan 2016-2018*

# Daftar Isi

A. Pendahuluan	1
B. Proses Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017	2
I. Kolaborasi dalam Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017	3
II. Kolaborasi dalam Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017	4
III. Kampanye Isu Keterbukaan Pemerintah di Level Regional	5
C. Rekomendasi Independent Reporting Mechanism (IRM) 2016-2017	6
I. Rekomendasi untuk mengikuti panduan OGP dalam pembuatan rencana aksi, pengembangan, dan pemantauan.	6
II. Rekomendasi untuk pengembangan strategi dalam melokalisasi keterbukaan pemerintah di daerah-daerah di Indonesia.	6
III. Rekomendasi terkait melembagakan forum kemitraan melalui keputusan pemerintah.	6
IV. Rekomendasi terkait penyertaan rencana dan prioritas strategis pemerintah dalam rencana aksi nasional OGP.	7
V. Rekomendasi terkait pembuatan pendaftaran kepemilikan manfaat online terbuka.	7
D. Implementasi Komitmen Rencana Aksi Open Government Indonesia 2017	8
I. Pencapaian Tingkat Nasional	9
II. Pencapaian Tingkat Subnasional	12
E. Komitmen Unggulan 2017	19
I. Satu Peta sebagai Bentuk Pemetaan Partisipatif	19
II. Forum Konsultasi Publik	19
III. Keterbukaan Anggaran	19
IV. Panduan Tata Kelola dan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	19
V. Keterbukaan Kanal Informasi Gampong (Desa) di kota Banda Aceh	19
VI. Penguatan Tata Kelola Data dan Kanal Pengaduan Publik di Semarang	20
VII. Penguatan Keterlibatan Masyarakat di Kota DKI Jakarta	20
VIII. Open Data di Kota Bandung	20
F. Penutup	21

## A. Pendahuluan

Permasalahan pembangunan di Indonesia sangatlah kompleks sehingga membutuhkan upaya-upaya multidimensional yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Salah satu upaya dan metode yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintah yang terbuka. . Fondasi dan nilai-nilai keterbukaan pemerintah yang patut untuk dijunjung tinggi adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. Pemerintah yang terbuka akan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan nasional.

Indonesia telah bergabung di dalam Open Government Partnership sejak tahun 2012 dan telah mengimplementasikan 4 (empat) rencana aksi, termasuk Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2016-2017 yang merupakan rencana aksi keempat. Selain melibatkan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, terdapat 5 (lima) pemerintah daerah yang terlibat dalam renaksi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kabupaten Bojonegoro dan Kota Bandung.

Renaksi OGI 2016-2017 diharapkan dapat menjawab 5 (lima) tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel, yakni : (1) praktik korupsi yang sistematis; (2) akses informasi publik yang terbatas; (3) saluran partisipasi publik yang terbatas; (4) penyediaan pelayanan publik yang belum optimal; dan (5) sistem penegakan hukum yang lemah. Rencana Aksi OGI 2016-2017 akan fokus dalam menjawab tantangan pertama, ketiga, dan keempat, dengan (i) mendorong sisi pemanfaatan dari keterbukaan informasi; (ii) mendorong tingkat partisipasi publik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan; dan (iii) mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Merujuk pada nilai-nilai keterbukaan pemerintah, Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017 menekankan lima pilar prioritas yaitu: (1) penyusunan grand strategy pemerintah terbuka; (2) peningkatan partisipasi publik; (3) perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik; (4) penguatan keterbukaan informasi publik; serta (5) pembenahan tata kelola data.

Dari kelima prioritas tersebut, terdapat total 50 (lima puluh) komitmen dalam Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017 dengan 69 (enam puluh sembilan) indikator capaian, dimana sebanyak 17 (tujuh belas) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah telah terlibat di dalamnya. Perbedaan yang terlihat cukup signifikan antara rencana aksi sebelumnya dengan rencana aksi saat ini adalah tingkat pencapaiannya, dimana Rencana Aksi OGI 2016-2017 mampu mendorong tercapainya 45 (empat puluh lima) indikator capaian dengan perbandingan kenaikan capaian dari Rencana Aksi OGI 2015 sebesar 16,2%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pencapaian praktik keterbukaan pemerintah di Indonesia selama 2017 telah meningkat dan diharapkan senantiasa terus mengalami kemajuan.

## B. Proses Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017

Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017 diluncurkan pada Desember 2016 oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Tim penyusun terdiri atas beberapa unsur, baik dari K/L seperti Kementerian PPN/ Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri, maupun perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Rencana aksi ini merupakan Renaksi OGI keempat sejak tahun 2012. Proses penyusunan renaksi OGI tahun ini secara aktif melibatkan publik di tiap tahap penyusunannya. Bahkan bukan hanya menerapkan metode konvensional melalui diskusi/tatap muka, proses pelibatan publik di tahun ini juga dilakukan melalui sarana online.

Secara garis besar pada periode 2016-2017 ini, renaksi dibuat dalam lima tahapan yaitu: (1) penjaringan aspirasi; (2) lokakarya penyusunan renaksi; (3) penilaian daerah; (4) penajaman; dan (5) finalisasi. Keseluruhan proses ini menerapkan prinsip partisipasi dan ko-kreasi. Berikut penggambaran proses penyusunan Renaksi OGI 2016-2017.

**Gambar 1: Proses Penyusunan Renaksi OGI 2016-2017**



## **I. Kolaborasi dalam Tahapan Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017**

### **a. Tahap Penjaringan Aspirasi**

Tahap penjaringan aspirasi menggunakan metode survei online melalui ragam aset digital yang dimiliki seperti situs, Facebook dan Twitter. Survei online ditujukan untuk menjaring pendapat publik mengenai tantangan utama dalam mewujudkan pemerintahan terbuka di 7 (tujuh) sektor pemerintahan yang sudah disepakati oleh tim penyusun, yaitu : (i) pelayanan publik; (ii) penegakan hukum; (iii) transparansi anggaran; (iv) lingkungan hidup dan sumber daya alam; (v) keterbukaan parlemen; (vi) pembangunan desa; dan (vii) tata kelola data. Survei yang dilaksanakan selama dua minggu tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 316 responden dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat terjaring dengan baik. Hasil dari penjaringan aspirasi publik ini kemudian dirumuskan menjadi isu-isu prioritas dalam renaksi.

### **b. Tahap Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi**

Tahap lokakarya penyusunan renaksi mempertemukan K/L yang potensial untuk terlibat dalam Renaksi OGI dengan unsur-unsur masyarakat sipil. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas 9 (sembilan) isu untuk Government Self-Assessment Report 2016, tantangan kunci, serta solusi alternatif di 7 (tujuh) sektor yang sudah disepakati sebelumnya.

### **c. Tahap Penilaian Daerah**

Terkait konteks daerah, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil mengunjungi beberapa kandidat pemerintah daerah. Pada tahapan pertama, Seknas OGI bersama masyarakat sipil menilai kesiapan beberapa daerah melalui desk review. Setelah itu, kedua pihak bertemu untuk mempertajam daftar daerah potensial untuk dinilai secara langsung. Dalam kunjungan daerah, Seknas OGI dan masyarakat sipil memvalidasi temuan dan kesiapan pemerintah daerah melalui sejumlah pertemuan yang melibatkan aparatur daerah setempat. Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan penilaian daerah adalah : (1) komitmen kepala daerah; (2) keberadaan local champions; (3) kesiapan kanal dan regulasi keterbukaan; dan (4) ruang kolaborasi dengan masyarakat sipil. Berdasarkan penilaian inilah maka Seknas OGI bersama koalisi masyarakat sipil memutuskan bahwa DKI Jakarta, Bojonegoro, Semarang, Bandung dan Banda Aceh adalah daerah yang tepat untuk terlibat dalam Renaksi 2016-2017.

### **d. Tahap Penajaman Renaksi**

Pada tahap penajaman renaksi, dilaksanakan dua metode, diskusi bilateral dan multilateral, metode ini dipilih untuk memastikan setiap komitmen yang menjadi rencana aksi adalah sesuatu yang fundamental bagi tercapainya prioritas nasional. Selain itu, diskusi penajaman juga berguna untuk memastikan setiap rencana aksi masuk di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan/atau teranggarkan oleh instansi penanggung jawab terkait.

### e. Tahap Finalisasi Renaksi

Pada tahap finalisasi, Seknas OGI mempraktikkan ko-kreasi dengan pelibatan seluruh koalisi masyarakat sipil, K/L serta pemda yang terlibat dalam komitmen renaksi untuk duduk bersama dan menyepakati bersama poin-poin renaksi dalam bentuk dokumen resmi. Pada fase inilah Seknas OGI berhasil menetapkan 50 komitmen dari 17 K/L dan pemda untuk periode 2016-2017.

## II. Kolaborasi dalam Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Open Government Indonesia 2016-2017

Setidaknya terdapat 3 (tiga) praktik partisipasi dan ko-kreasi dalam siklus Open Government Partnership yaitu : (1) diseminasi informasi; (2) pelibatan publik melalui forum dialog; dan (3) kepemilikan bersama serta pengambilan keputusan bersama. Dalam aspek diseminasi informasi, terdapat website resmi yang mudah diakses, menyimpan seluruh data terkait kinerja Seknas OGI seperti rencana aksi tiap dua tahunan, laporan pelaksanaan rencana aksi tahunan – *Government Self-Assessment Report (GSAR)*, laporan evaluator independen terhadap pencapaian rencana aksi – *Independent Reporting Mechanism (IRM)*, dan data-data terkait implementasi keterbukaan.

Kemudian dalam aspek pelibatan publik melalui forum dialog dan ko-kreasi, telah dibuka ruang praktik pelibatan publik, termasuk masyarakat sipil, di tiap tahapan penyusunan Renaksi. Telah disediakan kolom komentar di website dan jejaring sosial media OGI yang selalu terbuka dengan berbagai input/masukan dari publik. Selanjutnya, dalam aspek kepemilikan bersama serta pengambilan keputusan bersama, Seknas OGI juga memberikan ruang partisipasi yang sama besarnya bagi unsur publik dan pemerintah dalam seluruh tahapan Renaksi. Baik pada tahapan penyusunan hingga implementasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan Rencana Aksi OGI harus dapat diawasi dan dikendalikan dengan tepat agar target yang ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal. Untuk itu, sejak tahun 2017, Seknas OGI melaksanakan praktik pemantauan bersama dan evaluasi bersama renaksi dalam bentuk diskusi. Pada setiap triwulannya, Seknas OGI mengajak perwakilan masyarakat sipil untuk turut memberikan penilaian terhadap data dukung yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang terlibat dalam rencana aksi. Diskusi dilaksanakan secara terbuka dengan fokus membahas target capaian dan bukti dukung yang dilampirkan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait. Melalui forum ini, pada akhirnya akan disepakati penilaian kuantitatif (range:0-100%) terhadap klaim capaian yang diberikan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam sistem pemantauan nasional.

### III. Kampanye Isu Keterbukaan Pemerintah di Level Regional

Indonesia sebagai salah satu pemrakarsa Open Government Partnership (OGP) bersama dengan 7 (tujuh) negara lain, berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah, meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik dengan inovasi dan teknologi. Sejak bergabungnya Indonesia dalam kemitraan multilateral ini, Indonesia telah menunjukkan kepemimpinannya sebagai *Co-Chair* OGP pada periode 2013-2014 dan terutama di regional Asia Pasifik dengan kesuksesan pemerintah Indonesia menyelenggarakan Asia Pacific Leaders' Forum (APLF) pada tahun 2017.

APLF 2017 dengan mengusung tema *Open Government for Inclusive Development* dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan dihadiri Wakil Presiden II Republik Islam Afghanistan Muhammad Sarwar Danish, Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina Benjamin Diokno, Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili, serta 650 perwakilan pemerintahan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya dari 14 negara anggota Open Government Partnership (OGP) se-Asia Pasifik dan 29 negara sahabat lainnya di Asia Pasifik dan sekitarnya.

APLF 2017 mengagendakan sembilan sesi dialog, yaitu : (1) *Opening Plenary - Setting the Stage : Open Government for Inclusive Development*; (2) *Ministerial Roundtable*; (3) *Subnational Roundtable*; (4) *Panel on The Role of Accountability Institutions in Promoting Open Government*; (5) *Session 1: Achieving Poverty Reduction and Economic Development through Open Government*; (6) *Session 2: Building Trust and Public Integrity*; (7) *Session 3: Public Service Delivery for Inclusive Development*; (8) *Session 4: The Role of Open Government in Environmental Sustainability*; dan (9) *Closing Plenary*. Pembahasan dilakukan secara mendalam, meliputi pemetaan kondisi terkini, tantangan yang dihadapi, potensi solusi, serta best practices keterbukaan pemerintah.

## C. Rekomendasi Independent Reporting Mechanism (IRM) 2016-2017

Menindaklanjuti rekomendasi dari *Independent Reporting Mechanism (IRM)* sebagai tim evaluator independen OGP pada *IRM Progress Report* tahun 2016-2017, terdapat beberapa rekomendasi dan masukan untuk rencana aksi OGI kedepannya yang terdiri dari :

### I. Rekomendasi untuk mengikuti panduan OGP dalam pembuatan rencana aksi, pengembangan, dan pemantauan.

Pemerintah terus melakukan perbaikan dan peningkatan performa dalam proses penyusunan rencana aksi kedepannya khususnya untuk Rencana Aksi Open Government Indonesia 2018-2020. Pada tahun 2017, Seknas OGI mulai lebih intens melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dengan seluruh mitra OGI sesuai dengan panduan dari OGP.

### II. Rekomendasi terkait pengembangan strategi untuk melokalisasi keterbukaan pemerintah di daerah-daerah di Indonesia.

Dalam Rencana Aksi OGI 2016-2017, Seknas OGI telah menjangkau 5 (lima) daerah dengan tujuan mempromosikan dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah. Kelima daerah tersebut adalah Kota DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kabupaten Bojonegoro. Ke depannya akan diperluas cakupan penerapan keterbukaan pemerintah ke daerah-daerah di seluruh Indonesia dalam bentuk berbagai kegiatan.

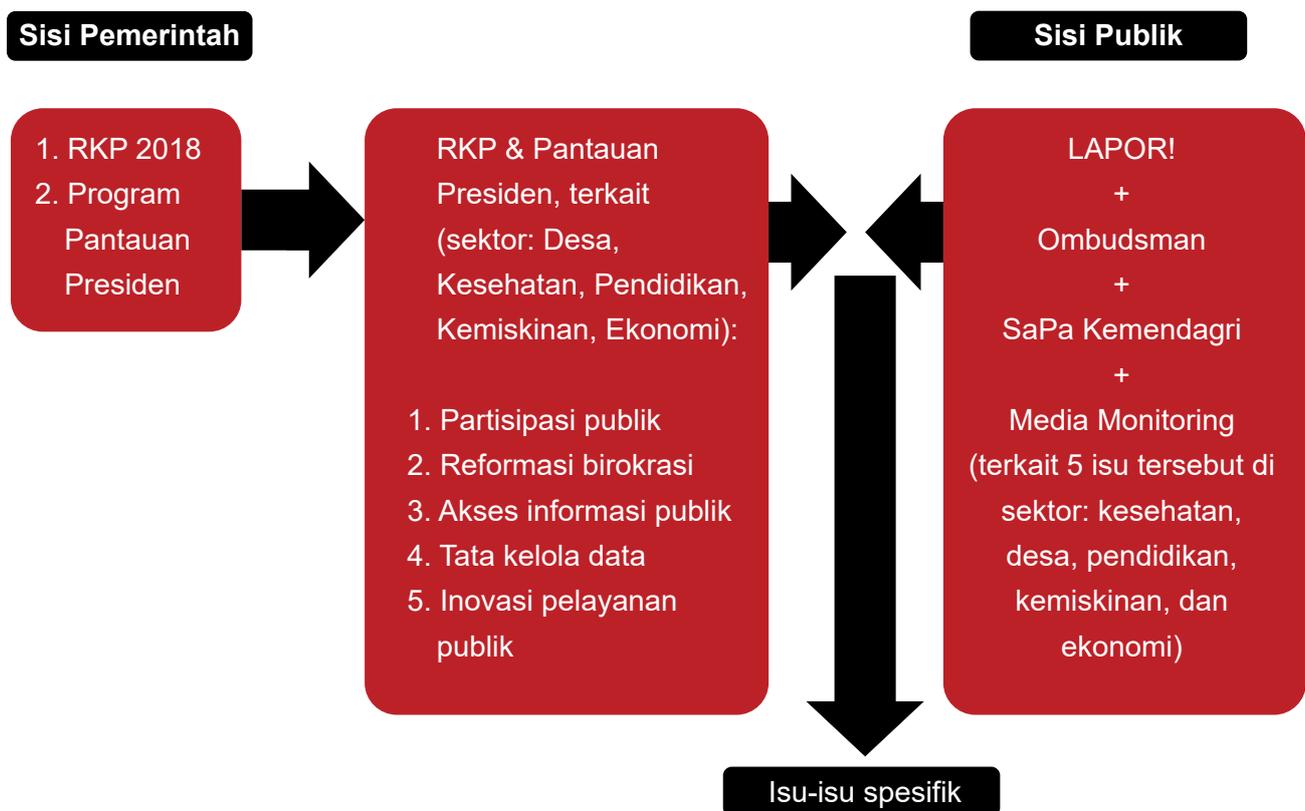
### III. Rekomendasi terkait melembagakan forum kemitraan melalui keputusan pemerintah.

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS tentang Tim Pelaksana Open Government Indonesia 2017-2018 untuk mendukung keberlanjutan dari kolaborasi yang dijunjung tinggi oleh inisiatif keterbukaan pemerintah. Selain itu, terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan upaya pemerintah dalam mendorong prinsip kolaborasi dan partisipasi ke dalam proses pelayanan publik. Sementara, pada level pemerintah daerah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan-peraturan ini merupakan kerangka hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menunjang dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam mendorong keterbukaan pemerintah kedepannya.

#### IV. Rekomendasi terkait penyertaan rencana dan prioritas pemerintah strategis dalam rencana aksi nasional OGP.

Memasuki siklus Rencana Aksi 2018-2019, Seknas OGI memulai pembahasan dengan menyusun konsep perumusan rencana aksi pada siklus tersebut. Dari hasil diskusi dan pembelajaran yang mengacu dari berbagai sumber seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RPJMN, Pantauan Presiden, kanal-kanal pengaduan masyarakat, maka ditetapkan konsep penyusunan Rencana Aksi 2018-2019 yang mencoba mengkombinasikan agenda prioritas pemerintah dengan aspirasi masyarakat.

Gambar 2 : Konsep penyertaan prioritas pemerintah dengan Renaksi OGI



#### V. Rekomendasi terkait pembuatan pendaftaran kepemilikan manfaat online terbuka.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi ini, kami telah merencanakan adanya pendaftaran kepemilikan manfaat online secara terbuka dalam Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah tahun 2018-2020. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan inisiatif beneficial ownership transparency sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap Paris Declaration yang disepakati dalam Open Government Partnership Global Summit tahun 2016. Pemerintah Indonesia memastikan bahwa pendaftaran kepemilikan manfaat online terbuka akan diakomodir dalam Rencana Aksi OGI selanjutnya.

## D. Implementasi Komitmen Rencana Aksi Open Government Indonesia 2017

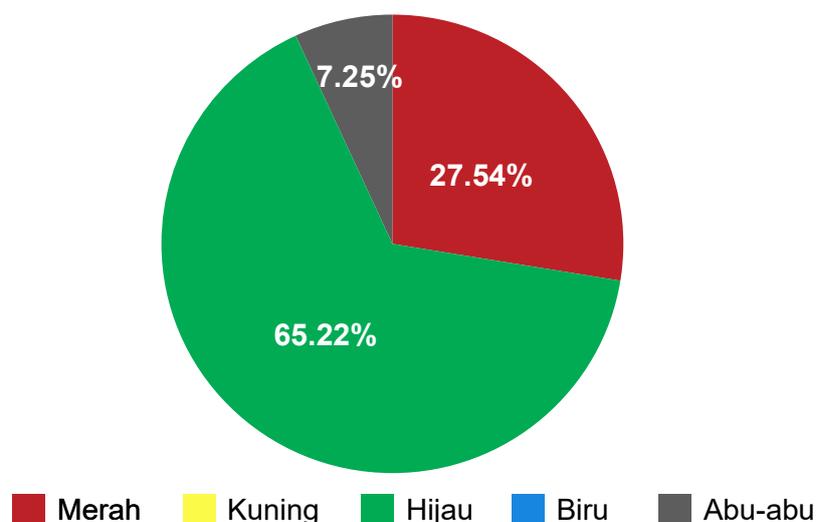
Dalam kurun waktu implementasi yang kurang dari dua tahun, secara umum tingkat capaian renaksi pada paruh putaran keempat (4th NAP cycle) mengalami peningkatan, walaupun terjadi sedikit penurunan pada jumlah kementerian/lembaga yang terlibat seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 1 : Perbandingan Tingkat Ketercapaian Renaksi OGI Periode 2012 - 2016**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah KLD	14	13	24	21	17	17
Komitmen	38	21	64	52	50	50
Capaian 100%	76.6	85.7	54.7	48	70	65.22

Dari total 69 indikator capaian oleh 17 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dirangkum dan dijabarkan dalam Rencana Aksi Open Government Indonesia 2017, sebanyak 45 indikator capaian (65.22%) berhasil mencapai target akhir yaitu 100%, 19 indikator capaian (27.54%) sudah mulai dijalankan namun belum mencapai target akhir capaian, dan sebanyak 5 indikator capaian (7.25%) yang ditargetkan untuk diselesaikan di tahun 2017 dikategorikan sebagai tidak memiliki target akhir capaian. Adapun gambaran atas capaian renaksi 2017 dapat dilihat pada diagram berikut.

**Gambar 1 : Capaian Renaksi OGI 2017**



T17-B12 December 2017

■ 19 • 19 Target akhir tidak tercapai

■ 45 • 45 Target akhir tercapai

■ 5 • 5 Tidak ada target

TOTAL 69

## I. Pencapaian Tingkat Nasional

Terdapat total 21 komitmen dan 21 target rencana aksi 2017 di tingkat nasional. Dari rencana aksi ini, sebanyak 16 target telah mencapai target akhir, sedangkan 5 target belum tercapai. Tabel dibawah ini memberikan rangkuman atas pencapaian komitmen rencana aksi 2017 di tingkat nasional tersebut.

**Tabel 2 : Rangkuman Pencapaian Renaksi OGI 2017 di Tingkat Nasional**

Pilar Prioritas	Area Pengembangan	Penanggung Jawab
<b>Tercapai (16 Target)</b>		
<i>Grand Strategy</i> Pemerintah Terbuka	Tersusunnya Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintah Terbuka	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Peningkatan Partisipasi Publik	Tersusunnya himbuan dan panduan bagi instansi publik untuk melakukan konsultasi publik secara rutin di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan sebagai realisasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Tersusunnya panduan tata kelola yang baik (manual governance) dan pelaksanaan forum konsultasi publik sebagai upaya mewujudkan pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs yang lebih partisipatif	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS

	Peningkatan partisipasi publik di dalam perbaikan tata kelola informasi geospasial	Badan Informasi Geospasial (BIG)
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Meningkatkan keterhubungan lebih banyak BUMN ke LAPOR!	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Terselenggaranya Tata Kelola Pembangunan Desa (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan) yang terbuka dan partisipatif berbasis potensi dan tingkat perkembangan desa	Kementerian Dalam Negeri
	Peningkatan kapasitas pengawasan pelayanan publik Ombudsman RI	Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
	Peningkatan kredibilitas Ombudsman RI sebagai otoritas nasional pemantau kualitas pelayanan publik	Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
	Peningkatan kepatuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang pelayanan publik Kementerian Agama	Kementerian Agama
	Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

	Meningkatkan responsivitas badan publik terhadap aspirasi dan pengaduan yang masuk sebagai salah satu metode meningkatkan akuntabilitas LAPOR!	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Peningkatan kepatuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang pelayanan publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Penguatan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan
	Penguatan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatkan keterbukaan informasi sistem anggaran	Kementerian Keuangan

**Tidak Tercapai (5 Target)**

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Tersusunnya peraturan/ instruksi/ edaran MenPANRB untuk mendorong terintegrasinya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di LNS kedalam LAPOR!-SP4N	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
---	---	---

	Meningkatkan sosialisasi terhadap penggunaan LAPOR! sebagai SP4N dengan target meningkatkan jumlah pengaduan yang masuk via LAPOR! menjadi 1 Juta aduan untuk 2016	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Penguatan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	Mewujudkan keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tata Kelola Data	Penguatan tata kelola data antar instansi pemerintah	Kantor Staf Presiden

## II. Pencapaian Tingkat Subnasional

Terdapat total 25 komitmen dan 48 target renaksi di tingkat daerah dengan rincian 34 target tercapai dan 14 target lainnya tidak tercapai. Secara garis besar, komitmen Renaksi 2017 di level daerah tercapai untuk keempat pilar strategis: (1) penguatan keterbukaan informasi publik, (2) peningkatan partisipasi publik, (3) perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan pelayanan publik, (4) tata kelola data. Tabel berikut memberikan rangkuman atas pencapaian komitmen Renaksi 2016 di tingkat sub-nasional (pemerintah daerah).

**Tabel 3 : Rangkuman Pencapaian Renaksi OGI 2017 di Tingkat Daerah**

Pilar Prioritas	Area Pengembangan	Penanggung Jawab
<b>Tercapai (34 Target)</b>		
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya 1,500 berkas data di portal data Kota Bandung	Pemerintah Kota Bandung

	Terbitnya revisi Perwal 26 Tahun 2012 tentang PPID di lingkungan Kota Semarang;	Pemerintah Kota Semarang
	Publikasi DIP yang telah diuji konsekuensi melalui website semarangkota.go.id. terupdate	Pemerintah Kota Semarang
	Tersedianya SIM yang terintegrasi dengan pengelolaan PPID untuk fasilitasi kedewanan	Pemerintah Kota Semarang
	Terlaksananya penguatan pelayanan informasi berupa tersedianya desk pelayanan informasi pada tiap SKPD dan percontohan di 5 kelurahan setiap wilayah Kota Administrasi	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Terpublikasikannya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui media luar ruang dan website di 70 desa terpilih	Pemerintah Kota Banda Aceh
	Terpublikasikannya perencanaan pembangunan dan anggaran daerah berbasis keterbukaan informasi publik	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Terpublikasikannya rincian APBD SKPD pada web PPID SKPD berbasis keterbukaan informasi publik	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Terimplementasikannya aplikasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

	Tersedianya daftar inventaris semua layanan, informasi, dan aplikasi publik yang dimiliki oleh setiap SKPD yang ada di Pemprov DKI sebagai basis rencana penyusunan strategi komunikasi dan sosialisasi	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Portal Jakarta.go.id dan semua portal turunannya, terintegrasi dan dapat diakses publik sebagai One-Stop Service Portal	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Memastikan semua website SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan website sub- domain yang terhubung dengan portal Jakarta.go.id, mencantumkan link ke laman muka portal Jakarta.go.id	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Terintegrasinya data dari 41 SKPD dengan portal data Banda Aceh (data.bandaacehkota.go.id)	Pemerintah Kota Banda Aceh
Peningkatan Partisipasi Publik	Pembentukan PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 56 SMPN	Pemerintah Kota Bandung
	Tersedianya laporan pemantauan dan tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan yang masuk untuk 2017	Pemerintah Kota Semarang
	Terselenggaranya rapat evaluasi berkala sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring evaluasi	Pemerintah Kota Semarang

	Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (80%)	Pemerintah Kota Semarang
	Terlaksanakannya penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pemerintahan Desa pada 30 desa	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Terlaksanakannya pendampingan pembentukan desk Layanan Informasi Desa (PPID Desa) pada 30 Desa	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Presentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (75%)	Pemerintah Kota Banda Aceh
Penguatan Tata Kelola Data	Penambahan e-contract pada BIRMS dengan pola e-purchasing (e-catalogue);	Pemerintah Kota Bandung
	Integrasi dengan sistem e-budgeting	Pemerintah Kota Bandung
	Ditetapkannya Perwali tentang Tata Kelola Data di Pemkot Semarang	Pemerintah Kota Semarang
	Teridentifikasinya 62 dataset pada Seluruh SKPD Prioritas/Uji Coba untuk disinergikan pada Satu Basis Data Pemkot Semarang	Pemerintah Kota Semarang
	Pengembangan Kapasitas Pengelola data pada Seluruh SKPD Prioritas/Uji Coba	Pemerintah Kota Semarang
	Tersedianya Situation Room sebagai data center (NOC), pusat kajian dan analisa data kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang

	Sinergi Data pada Pemkot Semarang dengan Portal Satu Data Nasional	Pemerintah Kota Semarang
	Terverifikasinya data hasil input kader dasa wisma PKK sebagai data tunggal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Tersedianya dashboard visualisasi pada aplikasi data dasa wisma	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Terinputkannya data bojonegoro pada portal data nasional data.go.id	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Pengembangan dan pemanfaatan dashboard LAPOR! sebagai hub aplikasi pengaduan publik	Pemerintah Kota Bandung
	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan LAPOR!	Pemerintah Kota Bandung
	Presentase efektivitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (80%)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Tersedianya tur pemantauan langsung usulan masyarakat pada sistem e-Musrenbang	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

**Tidak Tercapai (14 Target)**

Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Terpublikasikannya data pelaksanaan fungsi legislasi yang meliputi: Prolegda, Raperda, Naskah Akademik, Perda yang sudah disahkan, laporan studi banding, risalah sidang dan tim penyusun/pembahas Raperda	Pemerintah Kota Semarang
--	--	--------------------------

	Tersedianya strategi dan rencana kerja komunikasi dan sosialisasi yang terintegrasi terkait semua layanan, informasi dan aplikasi publik yang dimiliki setiap SKPD di Pemprov DKI dengan mengoptimalkan berbagai media komunikasi, baik digital, cetak, ruang ataupun sosialisasi lapangan	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Penguatan Tata Kelola Data	Tersedianya hasil kegiatan dan target kinerja DPR dalam melaksanakan 3 fungsinya (budgeting, pengawasan, dan legislasi) secara daring setiap tahun	Pemerintah Kota Semarang
	Tersedianya 1500 Dataset di Portal Open Data (data.jakarta.go.id)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik	Tersedianya informasi standar layanan seluruh SKPD secara lengkap dan termuktahirkan berdasarkan SOTK baru	Pemerintah Kota Bandung
	Penambahan tur komentar dalam rangka berinteraksi dengan masyarakat	Pemerintah Kota Bandung
	Persentase SKPD dengan nilai standar pelayanan berada di zona hijau sebanyak 75%	Pemerintah Kota Bandung
	Terpublikasikannya anggaran seluruh SKPD tahun 2016 melalui web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung <a href="http://ppid.bandung.go.id">http://ppid.bandung.go.id</a> ;	Pemerintah Kota Bandung

	<p>Terpublikasikannya mekanisme proses penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat melalui aplikasi SABILULUNGAN  <a href="http://sabilulungan.bandung.go.id">http://sabilulungan.bandung.go.id</a></p>	Pemerintah Kota Bandung
	<p>Terselenggaranya training pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah kota Semarang</p>	Pemerintah Kota Semarang
	<p>Tersosialisasikannya kanal saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat Kota Semarang di seluruh website SKPD</p>	Pemerintah Kota Semarang
	<p>Terpublikasikannya APBDes, Laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa berbasis keterbukaan informasi publik melalui baliho (100%) , webdes (70%); terpublikasikannya aset desa melalui baliho (10%)</p>	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	<p>Terimplementasikannya pelayanan publik yang melibatkan partisipasi warga masyarakat</p>	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	<p>Terlaksanakannya maklumat pelayanan publik di bidang kesehatan pada 2 (dua) Puskesmas</p>	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

## E. Komitmen Unggulan 2017

Penentuan komitmen unggulan adalah berdasarkan pencapaian target sebesar 100% dan memiliki dampak yang transformatif dengan memuat nilai-nilai keterbukaan pemerintah. Komitmen unggulan tersebut diambil dari beberapa komitmen level nasional dan komitmen level daerah, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

### I. Satu Peta sebagai Bentuk Pemetaan Partisipatif

Tujuan dari komitmen ini adalah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam tata kelola perbaikan geospasial. Indikator capaiannya ditentukan dengan ditetapkannya standar acuan peran masyarakat dalam kebijakan satu peta. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat secara aktif dan mengakses kebijakan satu peta.

### II. Forum Konsultasi Publik

Penyusunan himbauan dan panduan bagi instansi publik dalam melakukan konsultasi publik merupakan tujuan dari komitmen ini. Output yang telah dihasilkan dari komitmen ini adalah terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2017.

### III. Keterbukaan Anggaran

Transparansi keterbukaan informasi anggaran menjadi tujuan dari komitmen ini. Akses terhadap portal data melalui website [data-apbn.kemenkeu.go.id](http://data-apbn.kemenkeu.go.id) dan fitur peta data serta data query menjadi hasil yang ingin dicapai lewat komitmen keterbukaan anggaran ini. Dampak yang signifikan dari berhasilnya implementasi komitmen ini adalah masyarakat dapat memantau alokasi anggaran dengan mudah dan informatif.

### IV. Panduan Tata Kelola dan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Dengan adanya panduan ini, Sekretariat SDGs dapat membangun platform komunikasi digital yang memungkinkan publik berkontribusi secara aktif di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan rencana aksi SDGs.

### V. Keterbukaan Kanal Informasi Gampong (Desa) di Kota Banda Aceh

Desa menjadi salah satu bagian dari pemerintahan yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Untuk memperkuat kinerja pemerintah desa, pada rencana aksi keterbukaan pemerintah 2016-2017, Kota Banda Aceh berkomitmen untuk membuka informasi dan melibatkan partisipasi masyarakat. Informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat diantaranya Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui media luar ruang dan website di 70 desa terpilih. Selain itu, untuk memperkuat komitmen tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh juga menetapkan Perwali terkait Sistem Layanan Informasi Pemerintah Desa/ Kelurahan.

## **VI. Penguatan Tata Kelola Data dan Kanal Pengaduan Publik di Kota Semarang**

Salah satu komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mendorong keterbukaan pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan data. Data tersebut diintegrasikan juga dengan pelayanan informasi publik yang inovatif, dan juga dengan peningkatan mekanisme pelaporan masyarakat Semarang. Pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan sangat progresif di dalam memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat daerah di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah dengan membentuk Pusat Informasi Publik yang mengintegrasikan pelayanan data dan informasi, dengan pelayanan pengaduan masyarakat, serta juga berfungsi sebagai pusat kegiatan publik.

## **VII. Penguatan Keterlibatan Masyarakat di Kota DKI Jakarta**

Komitmen DKI Jakarta dalam mengimplementasikan keterbukaan salah satunya dengan memperkuat keterlibatan masyarakat. Upaya penguatan tersebut terdiri dari penguatan pemanfaatan informasi publik, partisipasi dalam perencanaan pembangunan dan penguatan saluran pengaduan pelayanan publik. Komitmen unggulan keterbukaan pemerintah di DKI Jakarta terkait dengan partisipasi publik adalah terlaksananya pengembangan sistem Citizen Relationship Management (CRM) untuk mengintegrasikan seluruh kanal aduan masyarakat (termasuk yang masuk melalui kanal LAPOR!). Selain membangun platform pengaduan yang terintegrasi, DKI Jakarta juga mempublikasikan Pergub Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Pemprov DKI untuk memperkuat portal pengaduan tersebut.

## **VIII. Open Data di Kota Bandung**

Salah satu bukti komitmen utama Bandung terhadap pemerintahan terbuka adalah pada usahanya untuk mengoptimalkan peran teknologi informasi dalam memperkuat transparansi pemerintah-nya. Untuk membenahi kuantitas dan kualitas data pemerintah, Kota Bandung berkomitmen meningkatkan jumlah data yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka.

## F. Penutup

Tahun 2017 merupakan tahun yang cukup penuh tantangan dalam mengimplementasikan Renaksi periode 2016-2017. Selain dikarenakan jumlah komitmen yang masih cukup banyak kuantitasnya, namun cakupan komitmen juga telah meluas, bukan hanya berfokus pada pemerintah pusat namun bekerjasama pada lima pemerintah daerah. Berdasarkan pengalaman tersebut, terdapat beberapa pembelajaran yang didapatkan.

Empat pembelajaran yang didapatkan dari implementasi Renaksi 2016-2017 di antara lain:

- a. Penyusunan dan implementasi renaksi OGI masih sangat bergantung pada figur-figur yang menempati posisi tertentu dalam pemerintahan. Ketika individu tersebut tidak menjabat lagi, sangat sulit untuk mempertahankan komitmen maupun melakukan transfer ilmu pada figur selanjutnya. Hal ini disebabkan karena belum tumbuh rasa kepemilikan yang mendalam dari K/L terhadap Renaksi OGI maupun gerakan Open Government itu sendiri.
- b. Proses pengendalian atas renaksi, melalui pemantauan dan evaluasi belum berjalan dengan maksimal. Agenda pemantauan dan evaluasi perlu menjadi salah satu prioritas agar komitmen-komitmen dalam Renaksi dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan.
- c. Rencana Aksi Open Government Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak Renaksi yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Substansi yang didorong melalui beberapa Renaksi tersebut berpotensi tumpang tindih dan tidak efektif.
- d. Salah satu aspek terpenting dalam OGI adalah ko-kreasi, dimana Civil Society Organizations (CSOs) menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan Renaksi pemerintah. Pada fase implementasi Renaksi, yang bertanggung jawab menjalankan komitmen sepenuhnya dilaksanakan K/L. Ke depan keterlibatan dan tanggungjawab CSO dalam proses pengawalan renaksi perlu diperkuat dan diperluas.

Dari empat pembelajaran yang telah disebutkan, dapat ditarik empat rekomendasi yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kepemilikan Renaksi Open Government dan gerakan keterbukaan pada pemerintah, perlu adanya pelembagaan komitmen keterbukaan dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- b. Penguatan proses pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renaksi.
- c. Konsolidasi substansi dalam Renaksi OGI dengan rencana aksi atau kebijakan-kebijakan nasional lainnya.
- d. Perluasan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam Renaksi, tidak hanya dalam proses penyusunan tetapi dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.





# LAMPIRAN III

Brafaks Laporan *OGP Global Summit Georgia*



30228

KILAT

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
KYIV**

Ul. Otto Shmidta 8, Kyiv 01030 Ukraine  
Telp. +380-44 206-5446 Fax. +380-44 206-5440  
Email : Indonesia@kbri.kiev.ua

Kepala Perwakilan RI

**Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, M.E.**

Duta Besar LBBP

**BERITA BIASA**

Nomor : B-00168/KYIV/180720  
Kepada : Yth. Menteri Luar Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri PANRB, Ketua KPK  
Up : Yth. Dirjen Multilateral, Dir. PELH, Sesditjen Multilateral, Deputi II KSP, Deputi Bid. Polhukam Bappenas, Deputi Bid Kelembagaan dan Tatalaksana KemenPANRB, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KemenkoPerekonomian  
Info : Yth. Dubes RI Kopenhagen, Dubes RI Seoul  
Dari : Duta Besar RI Kyiv  
Jumlah : 10 (sepuluh) Halaman  
Perihal : Laporan Delri pada Pertemuan ke-5 *OGP Global Summit*, 16-19 Juli 2018 di Tbilisi

**Ringkasan Berita**

1. *5<sup>th</sup> Open Government Partnership (OGP) Global Summit* yang berlangsung pada tanggal 16-19 Juli 2018 di Tbilisi telah menegaskan pentingnya prinsip-prinsip untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik (*good governance*) sebagai upaya untuk mendukung pembangunan di semua negara dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan yang terkait.
2. Indonesia yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak dalam komitmen dan pelaksanaan OGP ini kiranya perlu terus menunjukkan peran aktifnya sehingga pelaksanaan OGP di Indonesia dapat menjadi akselerator (*catalyst*) dalam pembangunan nasional dengan mensinergikan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 2030).

Merujuk perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertemuan ke-5 *Open Government Partnership (OGP) Global Summit* telah dilaksanakan pada tanggal 16-19 Juli 2018 di Tbilisi, Georgia. *OGP Global Summit* dihadiri kalangan pemerintah, parlemen, organisasi internasional dan kalangan masyarakat madani (*civil society organization/CSO*) serta pemangku kepentingan lainnya. *OGP Global Summit 2018* dihadiri perwakilan dari 96 negara dan dibuka oleh Perdana Menteri (PM) Georgia serta hadir sejumlah Kepala Negara/Pemerintah yaitu President Sri Lanka, PM Serbia, PM Kyrgyz, PM Antigua and Barbuda, sejumlah Walikota, Ketua Parlemen maupun Badan/Komisi Anti Korupsi.
2. Delegasi Indonesia dipimpin Kepala Staf Kepresidenan dengan didampingi Dubes RI Kyiv, Ketua KPK, Deputi II KSP, Deputi Polhukam Bappenas, pejabat terkait dari KemenPANRB, Dit. PELH Kemlu, KBRI Kyiv, *Open Government Indonesia (OGI)*, serta kalangan LSM Indonesia terkait khususnya yang bergerak dalam Kemitraan *Open Government*.
3. *OGP Global Summit* adalah pertemuan yang diadakan setiap dua tahun sekali dan diselingi pertemuan regional masing-masing kawasan di antara pertemuan tingkat global. *OGP Global Summit* sebelumnya diadakan di Paris tahun 2016. Sedangkan Indonesia pernah menjadi tuan rumah utk OGP untuk kawasan Asia Pasifik pada tahun 2014 dan 2017 di Jakarta.
4. OGP merupakan sebuah gerakan internasional yang diprakarsai oleh 8 (delapan) negara yaitu, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Indonesia, Inggris, Meksiko, Norwegia pada September 2011. OGP bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi masyarakat, dan inovatif dalam mewujudkan pemerintah yang berkeadilan.
5. Sejak pendirian OGP, Indonesia telah menjadi anggota aktif *Steering Committee (SC)* periode 2012 – 2015 dan 2015 – 2018, dan efektif pada Oktober 2018 akan berakhir mengingat keanggotaan Indonesia sudah maksimal dua kali. Peran Indonesia selama dalam keanggotaan SC telah diapresiasi banyak pihak karena dapat memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif dalam pengembangan OGP kedepan. Direktur Eksekutif OGP Support Unit Mr. Sanjay Pradhan bahkan telah menyampaikan secara langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan RI selaku Ketua Delri untuk tetap mengharapan peran Indonesia walaupun tidak duduk dalam SC OGP. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif OGP SU memandang bahwa Indonesia merupakan negara besar yang memberikan efek yang positif dan konkrit terhadap kemajuan OGP di dunia. Secara khusus Indonesia diminta memberikan asistensi teknis OGP kepada Filipina, Mongolia, dan Sri Lanka selepas periode jabatan Dewan Pengarah berakhir. Kepala Staf Kepresidenan menyanggupi untuk memberikan asistensi tersebut.
6. *OGP Global Summit 2018* kali ini menghasilkan resolusi yang disepakati oleh SC pada tingkat menteri yang diadakan pada tanggal 16 Juli 2018. Resolusi tersebut disusun oleh Pemerintah Georgia sebagai Co-chairs mewakili Pemerintah dan Mr. Mukelani Dimba sebagai Co-chairs mewakili LSM. Rancangan (terlampir) tersebut didiskusikan dan disepakati oleh peserta SC tingkat menteri, yang berjumlah 22 peserta (11 perwakilan pemerintah, 11 perwakilan masyarakat sipil). Di antara negara yang berperan sebagai SC selain Indonesia adalah Kanada, Chili, Kroasia, Perancis, Georgia, Italia, Meksiko, Romania, Afrika Selatan, Korea Selatan. Turut hadir perwakilan Nigeria dan Argentina sebagai negara yang akan masuk ke SC per Oktober 2018, sebagai pengamat sidang.
7. Di antara beberapa isu yang menjadi pembicaraan pokok baik selama pertemuan SC maupun panel selama rangkaian summit, adalah isu terkait dengan menyempitnya ruang gerak

masyarakat sipil dan ancaman terhadap demokrasi. Atas isu tersebut, Kepala Staf Kepresidenan selaku perwakilan Pemerintah RI menyampaikan bahwa demokrasi memerlukan keseimbangan pengaruh antara semua pihak baik masyarakat ataupun pemerintah. Bahwa perlu disadari juga di era digitalisasi informasi, yang terjadi justru bukan hanya menyempitnya ruang gerak publik, tetapi juga ruang gerak pemerintah sendiri. Saat ini pemerintah tidak dengan mudah menyampaikan fakta ketika harus berhadapan dengan sentimen dari kelompok radikal atau kelompok dengan perspektif yang berseberangan. Namun demikian Kepala Staf Kepresidenan mengajak pemerintah global untuk tetap menjaga ruang kebebasan berpendapat publik dan konsisten dalam menyampaikan informasi yang berbasiskan fakta kepada masyarakat.

8. Selain itu dibahas juga bagaimana komitmen negara anggota OGP dalam mendorong tata kelola yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif dapat secara nyata memberi dampak pada masyarakat. Salah satu strategi untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendorong kolektif global yang bersifat tematik, sehingga diperoleh fokus dari arah gerak negara anggota OGP tersebut. Pemerintah RI menegaskan komitmen untuk terus terlibat dalam kepemimpinan negara-negara anggota OGP meski sudah tidak lagi duduk dalam Dewan Pengarah, terutama dalam tema pencegahan korupsi dan tema pelayanan publik. Atas tema pencegahan korupsi, Pemerintah RI menyampaikan gagasan implementasi *Beneficial Ownership* atau Keterbukaan atas Pemilikan Perusahaan yang sudah dituangkan dalam Perpres 13/2018. Sementara atas tema pelayanan publik, Pemerintah RI mengedepankan gagasan untuk peningkatan kualitas dari informasi yang dibuka ke masyarakat sebagai hulu dari penyelenggaraan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri.
9. Pertemuan Bilateral Delri
  - a. **Menteri Kehakiman Georgia, Ms Thea Tsulukiani**
    - Kepala Staf Kepresidenan selaku Ketua Delri telah melakukan *courtesy call* kepada Menteri Kehakiman Georgia. Kedua pimpinan telah menyampaikan perkembangan dalam penanganan pelayanan publik untuk masing-masing negara baik berupa tantangan yang dihadapi maupun pencapaian-pencapaian yang diraih.
    - Menteri Georgia menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk mengimplementasikan MoU yang telah ditandatangani bersama Menteri PANRB sewaktu berada di Jakarta, Desember 2017 yang lalu.
  - b. **Sekretaris Negara untuk Pembangunan Denmark, Mr Martin Bille Hermann**
    - Ketua Delegasi Denmark pada OGP Global Summit atas permintaannya telah menemui Ketua Delri dan pada intinya menyampaikan tentang rencana Denmark menjadi tuan rumah "*18<sup>th</sup> International Anti-Corruption Conference*" yang akan berlangsung pada tanggal 22-24 Oktober 2018 di Copenhagen. Konferensi dimaksud direncanakan akan menghadirkan sekitar 30 Pemerintah, berbagai organisasi internasional dan kalangan *Civil Society Organizations (CSO)*. Dan mengaharapkan kehadiran Pemerintah Indonesia pada konferensi tersebut.
  - c. **Wakil Menteri Dalam Negeri dan Penyelamatan Korea Selatan, Mr Shim BoKyun**
    - Deputi II KSP didampingi wakil dari KemenPANRB dan Kemlu telah bertemu Wakil Menteri Korea Selatan dan menyampaikan terkait kerjasama bilateral di bidang *e-Government* yang tertuang dalam wadah *Electronic Government Cooperation Center (eGCC)*. Disampaikan berbagai pelaksanaannya *project* dan aktifitas dari tahun 2016-

2017 termasuk aktifitas yang sedang dilakukan tahun ini dengan pembangunan model referensi mengenai hukum dan peraturan *e-Government*.

- Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menginginkan kerjasama dengan pemerintah Korea dimaksud dapat diperpanjang guna mendukung dan membantu pemerintah Indonesia dalam membangun *e-Government*.
- Terkait hal ini, Wakil Menteri Korea telah menunjukkan indikasi yang positif terhadap kerangka kerjasama tersebut dan akan menghubungi kembali Pemerintah Indonesia. Disamping itu, sekiranya disetujui perpanjangan MoU kiranya dapat dilakukan dan disaksikan pada saat kunjungan Presiden RI ke Korea Selatan bulan September 2018 mendatang.

## 10. Pertemuan lainnya (*Side events*)

### a. **Parlemen Indonesia pada Forum Parlemen**

Dalam mendorong semangat dan praktik keterbukaan pada lembaga parlemen, DPR RI turut menghadiri sesi Open Parlemen pada OGP Global Summit. Open Parlemen secara global dideklarasikan sejak 2012. Open Parlemen (OP) merupakan perluasan dari OGP yang mendorong semangat dan praktik keterbukaan pada lembaga parlemen. Dengan hadirnya delegasi DPR RI di OGP Global Summit, menunjukkan kesiapan dan komitmen DPR RI untuk bergabung secara formal dengan Open Parlemen

### b. **Ketua KPK sebagai salah satu Panelis OGP Global Summit**

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menjadi salah satu Panelis OGP Global Summit pada sesi "*The Challenges and Successes of National Anti-Corruption Systems*". Dalam sesi tersebut Ketua KPK menyampaikan capaian-capaian dan pengalaman KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

### c. **Pertemuan dengan Deputy Head, EITI**

Pertemuan dilakukan antara Eddie Rich, Deputy Head EITI dengan Deputi II Kantor Staf Kepresidenan dan Deputi Bidang Politik, Pertahanan, Hukum dan Keamanan. Pertemuan tersebut membahas rencana implementasi *Beneficial Ownership* di Indonesia. Deputy Head EITI menanyakan terkait tata kelola penyelenggaraan OGP, EITI dan BO di Indonesia. Eddie Rich juga mengingatkan terkait dengan rencana validasi laporan Indonesia untuk EITI yang dikelola Kementerian Koordinator Perekonomian melalui sekretariat.

### d. **OGP Indonesia pada Forum CSO**

Salah satu nilai utama dari OGP adalah ko-kreasi, ko-kreasi antara masyarakat sipil (CSOs) dan Pemerintah dalam menyusun program atau kebijakan untuk tujuan pembangunan. Delegasi RI yang juga terdiri dari unsur masyarakat sipil turut berpartisipasi dalam Forum CSO pada *OGP Global Summit*. Forum CSO bertujuan sebagai sebuah ajang untuk bertukar wawasan dan pengalaman antar CSO dari berbagai negara dalam mendorong kebermanfaatannya secara kolektif.

### e. **Pengumuman Multi-Donor Trust Fund (MDTF) OGP – World Bank**

Pada *OGP Global Summit* di Tbilisi juga diumumkan dan diluncurkan MDTF OGP-Bank Dunia yang sudah dibentuk sejak 2017. Trust Fund ini ditujukan untuk membantu negara-negara klien Bank Dunia yang sudah menjadi anggota OGP atau ingin menjadi

anggota OGP untuk mendukung reformasi pemerintahan agar makin terbuka, akuntabel, dan makin berdaya-tanggap (*responsive*) lewat hibah yang diberikan kepada masyarakat sipil dan pemerintah. Untuk mengelola dana hibah ini, dibentuk *Trust Fund Council* (Dewan Dana Hibah) yang terdiri dari perwakilan Bank Dunia, wakil donor, dua wakil dari OGP, dan satu wakil dari OGP Support Unit. Untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan keterwakilan berbagai pandangan, wakil pemerintah dipilih dari anggota Dewan Pengarah (SC) OGP yang bukan donor namun dalam kapasitas pribadi. Sdr. Yanuar Nugroho (Deputi II Kepala Staf Kepresidenan) terpilih duduk dalam *Trust Fund Council* tersebut dan mewakili pemerintah dari 80 negara anggota OGP bersama Mr. Aidan Eyakuze dari Tanzania yang mewakili seluruh komponen masyarakat sipil.

Adapun tahap pertama hibah dimaksud diberikan kepada 9 (sembilan) pihak dari seluruh dunia, dimana salah satunya dari **Bojonegoro Institute** asal Indonesia yang menerima sejumlah US\$ 86,000 selama setahun untuk mendukung keterbukaan pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

**f. Lain-Lain**

Selain sesi-sesi di atas, Delegasi Indonesia turut berpartisipasi sebagai narasumber di beberapa sesi pada *OGP Global Summit*, antara lain:

- *Promoting People's Participation for Improved Public Services: SMART Commitments on Implementing Open Government through Social Accountability*
- *The Challenges and Successes of National Anti-Corruption Systems*
- *Communities, Inequality, and Water: Who Receives Water, When, and at What Price – Can Open Government Make a Difference*
- *Rethinking Public Services in Asia-Pacific: Innovations for Improving Reach, Access, and Quality*
- *Transparency for What? Going Beyond the Openness Rhetoric*
- *What's Next on Beneficial Ownership?: Company Leadership and Implementation through NAPs*
- *Labstorm - Strengthening results-oriented commitments in action plans & draft commitment feedback*

11. Dalam memperluas kebermanfaatannya yang didapat ketika *OGP Global Summit*, perwakilan delegasi RI mengadakan kegiatan *live video conference* dari lokasi *OGP Global Summit* di Tbilisi, Georgia bersama dengan puluhan anak-anak muda di Jakarta, Indonesia. Perwakilan *Youth* yang hadir pada *OGP Global Summit* di Tbilisi menghendaki adanya keterwakilan anak muda dalam struktur tatakelola OGP kedepan.

**Catatan & Pengamatan**

12. Bagi Indonesia pelaksanaan inisiatif internasional OGP ini merupakan usaha komplementer yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam membangun tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya dalam pengembangan prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, penanganan korupsi, pelayanan publik dan partisipasi masyarakat yang aktif.
13. Komitmen dan peran aktif Indonesia dalam OGP ini juga dapat menjadi akselator atau *catalyst* dalam mendukung program-program Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam perwujudan tatakelola pemerintah yang baik melalui program seperti LAPOR (Layanan

Aspirasi dan dan Pengaduan Online Rakyat), *e-government*, *e-budgeting*, *e-procurement* dan lain-lain. Disamping juga dapat menghindari penyalahgunaan anggaran oleh berbagai pihak.

14. Apresiasi oleh banyak pihak internasional kepada Pemerintah dan masyarakat madani Indonesia terhadap peran dan kontribusi pada OGP ini ditandai dengan banyaknya permintaan delegasi Indonesia menjadi pembicara dan panelis dalam berbagai aktifitas selama OGP Global Summit berlangsung. Selain itu, pada tingkat lokal (*sub-national*) LSM dari Bojonegoro menjadi salah satu penerima hadiah (*award*) internasional OGP dalam mendukung pengelolaan dan pengawasan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
15. Dalam menjaga momentum dan mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, kiranya program dan kegiatan OGP dapat diperkuat dan dikembangkan lebih lanjut pada RPJM 2020 – 2024. Disamping itu, pelaksanaan dari OGP melalui Sekretariat *Open Government Indonesia* (OGI) juga dapat menyelaraskan dengan usaha-usaha dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs 2030) dengan kepentingan dan prioritas pembangunan nasional Indonesia baik jangka menengah maupun jangka panjang.

#### Tindak Lanjut

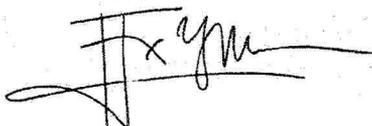
16. Sekretariat OGI bersama pemangku kepentingan terkait lainnya kiranya dapat menyelesaikan dokumen Rencana Aksi Nasional OGP untuk periode 2018-2020 dan kemudian dapat disosialisasikan pada tingkat nasional maupun lokal.
17. Sebagai negara pendiri OGP dan peranan aktif Indonesia serta kemanfaatan yang positif dan konkrit bagi Indonesia, kiranya Pemerintah Indonesia segera dapat menyelesaikan kontribusi OGP untuk tahun 2018 (surat permintaan kontribusi kepada Pemri terlampir).
18. Melalui kemitraan secara bersama khususnya Pemerintah (KSP, Bappenas dan Kemlu) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pemangku kepentingan terkait lainnya kiranya dapat dilakukan rapat evaluasi secara komprehensif guna menindaklanjuti hal-hal yang terkait selama pelaksanaan *OGP Global Summit* di Tbilisi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Petugas Komunikasi

  
Prasetyoko

Pembuat Berita

  
Yanuar Nugroho  
Deputi II KSP/Anggota Delri

***OGP Steering Committee Resolution - Proposed by lead co-chairs Government of Georgia and Mukelani Dimba; and endorsed by the full Governance and Leadership Subcommittee***

We, members of the OGP Steering Committee, renew our commitment to the principles and values of the Open Government Partnership, as outlined in the Open Government Declaration and the Paris Declaration,

We will, together with all Open Government Partnership members, continue to increase the quantity of truly transformative open government reforms, and to deepen the collaboration between government and civil society,

We will move beyond promoting open governance in the executive branch of government, and increase efforts to foster a culture of open governance in legislatures, the judiciary and independent government institutions, as well as at local levels of government,

We will promote open governance reforms of legislatures, by enhancing mechanisms for better citizen engagement in the oversight of the government and in the policy development process, ensuring inclusive and participatory legislative and decision-making processes and supporting legislatures in becoming more transparent, responsive, and accountable,

We will promote open governance reforms of the judiciary by working with judicial authorities to introduce measures to enhance accountability, integrity and transparency of the judiciary,

We will foster open governance at the subnational level, by working with local governments to promote public participation in service delivery and bring government closer to the people,

We will continue to focus on the tangible impact of our efforts on the lives of communities and citizens, to broaden collective ownership of OGP reforms, and to go beyond a consultative model of citizen engagement by promoting inclusive and active partnership with citizens through co-creation in policymaking and service delivery,

We will establish new partnerships and bring in new actors and use innovative open government approaches -including a renewed focus on fully including women and girls in open government reform processes- to advance the most critical governance and societal priorities such as anti-corruption efforts, open, inclusive and effective service delivery, reducing income inequality and enhancing trust in institutions, and inclusive policy making,

We will focus on strengthening partnership with the private sector to strengthen our collective impact and the sustainability of open governance reforms,

We will champion open, inclusive, and democratic governance, believing that OGP must take a stand when there are threats to democracy and civic space, and leveraging our leadership role at various global fora so OGP becomes a positive force for openness and deeper democracy,

We will ensure the OGP action plan process and broader domestic reform efforts in each of our countries strengthens government-citizen relations to open civic space, including working with civil society organizations to improve the legal enabling environment, to uphold and protect policies for journalists and human rights defenders, and to design frameworks and policies that protect digital rights, media freedoms, and the right of access to information,

We pledge to advance the values and principles of open government widely, including in other global initiatives such as the Sustainable Development Goals, anti-corruption efforts, and the fight against climate change, so that OGP and the principles of open government help strategically advance implementation, in coordination with established monitoring and implementation mechanisms, including those implemented by the United Nations,

We commit to rising to this challenge as well as to continuing to promote open government reforms as a means to foster transparency, accountability, and equality through technology, innovation and co-creation in all branches of government in ways that inspire the wider open government community,

We believe these commitments can take OGP to a new level, acknowledging that we all joined Open Government Partnership to improve governance on behalf of the communities and peoples that we serve, and to advance unequivocal respect for dignity and human rights.

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP  
1110 Vermont Avenue NW  
Suite 500  
Washington, DC 20005  
United States

PHONE +1 202 609 7859  
EMAIL info@opengovpartnership.org

### OGP Invoice Summary

2018 Requested Contribution:	\$50,000
Requested Contribution:	\$50,000

April 19, 2018

The Open Government Partnership Support Unit, as the Secretariat for OGP, respectfully requests that the Government of Indonesia submit its requested contribution of US\$50,000 to help cover the cost of Support Unit and Independent Reporting Mechanism (IRM) operations for the period January 1, 2018 – December 31, 2018.

The requested contribution will go directly to the OGP Support Unit. The OGP Support Unit is a charity publicly registered in the United States, with non-profit status is confirmed by its official exemption from federal income taxation under Section 501(c)(3) of the US Internal Revenue Code. Please find the wire transfer information for the OGP Support Unit attached. **Please note that this is updated wire transfer information, and includes information not on previous invoices.**

Thank you very much for your prompt attention to this matter as we seek to secure the necessary resources for the OGP Support Unit and IRM budget in 2018.

NOTE: If the Government of Indonesia is in a position to commit more than \$50,000 for 2018, this would be most welcome. Your final contribution will be reported to the Steering Committee and acknowledged on the OGP website.

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP  
1110 Vermont Avenue NW  
Suite 500  
Washington, DC 20005  
United States

PHONE +1 202 609 7859  
EMAIL info@opengovpartnership.org

**Wire Transfer Instructions:**

Receiving Bank: Bank of America  
222 Broadway, New York, NY 10038  
ABA Number: 026-00959-3  
Account Name: Open Government Partnership Secretariat  
Account Number: 226005697933  
Swift Code for USD: BOFAUS3N  
Swift Code for non-USD: BOFAUS6S

Please reference the below so that your contribution is recorded correctly  
Sending Organization: Government of Indonesia



# LAMPIRAN IV

Brafaks Laporan *OGP Regional Meeting* Korea Selatan



KILAT

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
SEOUL

Kepala Perwakilan RI

**UMAR HADI**  
DUTA BESAR LBBP

**BERITA BIASA**

Nomor : B-00414/Seoul/181114  
Kepada Yth : Menteri Luar Negeri RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, et Ketua Komisi Pemilihan Umum.  
U.p. Yth : Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Deputi Bid. Polhukhankam BAPPENAS, Deputi II KSP, et Deputi Bid. Kelembagaan dan Tatalaksana KemenPANRB.  
Info Yth : Wamenlu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kepala Biro DSP, Direktur Astimpas, Direktur PELH, Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan, Kepala Biro KTLN – Setneg, Direktur Kerja Sama Teknik et Duta Besar RI Ottawa  
Dari : Kepala Perwakilan RI Seoul  
Jumlah : 6 Halaman  
Perihal : Laporan *Open Government Partnership – Asia Pacific Regional Meeting 2018*, Seoul, 5-6 November 2018

**RINGKASAN BERITA**

*Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific Regional Meeting* yang berlangsung pada tanggal 5-6 November 2018 di Seoul merupakan *platform* bagi negara-negara anggota OGP di Asia Pasifik untuk dapat bertukar ide dan pengalaman terkait keterbukaan pemerintah dengan merujuk pada tiga tematik besar kegiatan ini yaitu *promoting democracy, improving governance, dan renewing trust*.

Sebagai salah satu pendiri *Open Government Partnership* dan *champion* di wilayah Asia Pasifik, Indonesia diminta secara khusus untuk terus meningkatkan peran dan kepemimpinannya dalam mengadvokasi nilai-nilai keterbukaan melalui kerja sama multilateral dan *platform* global yang diikuti.

Merujuk perihal pada pokok berita, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Open Government Partnership – Asia Pacific Regional Meeting 2018* telah diselenggarakan di Seoul pada tanggal 5-6 November 2018. *OGP - Asia Pacific Regional*

*Meeting 2018* dihadiri oleh peserta dari pemerintah, organisasi internasional, akademisi, organisasi masyarakat sipil (*civil society organisations/CSOs*), serta pemangku kepentingan lainnya. Tercatat ada 43 negara dari wilayah Asia Pasifik dan negara *observer* yang menghadiri *OGP Asia Pacific Regional Meeting 2018*.

2. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Duta Besar RI Seoul, Ketua KPU, pejabat dari BAPPENAS, pejabat dari Kantor Staf Presiden, pejabat dari KemenPANRB, pejabat dari LKPP, *Open Government Indonesia (OGI)*, rekan-rekan dari lembaga swadaya masyarakat, serta para mitra di Indonesia yang terkait dengan inisiatif *open government*.
3. OGP merupakan sebuah gerakan internasional yang diprakarsai oleh 8 (delapan) negara yaitu, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Indonesia, Inggris, Meksiko, Norwegia pada September 2011. OGP bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi masyarakat, dan inovatif dalam mewujudkan pemerintah yang berkeadilan.
4. *OGP Regional Meeting* merupakan pertemuan regional yang umumnya menjadi kegiatan sesudah dan sebelum *OGP Global Summit* dimana *OGP Global Summit* terakhir dilaksanakan pada 17-19 Juli 2018 di Tbilisi, Georgia. Indonesia sendiri pernah menjadi tuan rumah kegiatan OGP pada tahun 2014 dan 2017.
5. Sejak pendirian OGP pada tahun 2011, Indonesia telah menjadi anggota aktif *Steering Committee (SC)* pada dua periode yaitu tahun 2012-2015 dan 2015-2018, dimana keanggotaan ini telah berakhir pada bulan Oktober lalu.
6. *OGP-Asia Pacific Regional Meeting 2018* dibuka oleh Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan Kim Boo Kyum. Setelah itu dilanjutkan dengan pidato dari Direktur Eksekutif OGP Sanjay Pradhan, yang turut mengajak negara-negara anggota OGP untuk secara aktif mengatasi ketimpangan ekonomi yang menjadi masalah global terutama di negara-negara Asia Pasifik dengan mengedepankan metode kolaborasi OGP antara pemerintah dan masyarakat.
7. Puncak dari pertemuan regional OGP ini terefleksi dalam sesi *ministerial roundtable* yang berlangsung pada tanggal 6 November 2018, dimana sesi ini menghadirkan sejumlah menteri dari berbagai negara anggota OGP serta perwakilan dari mitra-mitra pembangunan yang terkait dengan inisiatif *open government*. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi turut menjadi panelis dalam sesi *ministerial roundtable* ini.
8. Pada sesi *ministerial roundtable*, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menyampaikan pentingnya menggunakan pendekatan *open government* dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, terutama dalam mendukung program-program pemerintah. Menteri PPN menjelaskan program bantuan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2015. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan dana desa langsung sebesar 60 Trilyun Rupiah setiap tahun kepada 74.957 desa di Indonesia. Dengan mengedepankan nilai-nilai keterbukaan pemerintah, pemerintah dapat mengawasi penggunaan dan kebermanfaatannya dari dana desa tersebut sekaligus mendorong partisipasi rakyat untuk secara langsung terlibat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa.
9. Pada sesi *ministerial roundtable* juga, Menteri PANRB Syafruddin Kambo menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan lebih detail terkait program *one agency, one innovation* yang diinisiasi oleh kementerian tersebut, dimana indikator yang digunakan

sebagai alat ukur inovasi publik ini adalah inovatif, transparansi, akuntabilitas, integritas, kolaboratif dan partisipatif yang merupakan nilai-nilai penting dari *open government*. Dengan adanya program ini, pemerintah di Indonesia didorong untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik setiap tahunnya. Menteri Syafruddin juga menyampaikan bahwa salah satu program inovasi pelayanan publik pemerintah Indonesia yang telah mampu mendapatkan penghargaan *Asia Pacific United Nations Public Service Award 2018* adalah program pengendalian malaria melalui sistem diagnosis dan pengobatan dini oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat. Program ini merupakan refleksi kolaborasi yang sangat baik di antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk praktik *open government* yang luar biasa.

10. Selain itu, pada sesi *bilateral meeting* antara Menteri PPN RI dengan Direktur Eksekutif OGP Sanjay Pradhan, dibahas pula keberlangsungan peran Indonesia setelah menyelesaikan jabatan sebagai anggota aktif *Steering Committee* (2015-2018). Direktur Eksekutif OGP secara khusus mengajak Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai keterbukaan pemerintah pada kerja sama multilateral yang Indonesia ikuti, mengingat Indonesia merupakan salah satu *founder* OGP dan memimpin inisiatif-inisiatif baik OGP di regional Asia Pasifik. Menteri PPN Bambang Brodjonegoro, menyambut baik permintaan tersebut dengan menyampaikan bahwa Indonesia akan membawa nilai-nilai *open government* ke dalam *South-South triangular framework*.
11. Beberapa pertemuan lainnya (*side events*) yang berlangsung sejak tanggal 5-6 November 2018 memiliki urgensi untuk dapat diperhatikan bersama:
  - ***Open Contracting Deep Dive***  
Pada sesi *workshop* ini, delegasi Indonesia yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri PPN/BAPPENAS Diani Sadia Wati beserta perwakilan dari *Bojonegoro Institute* yaitu Joko Purwanto berbagi praktik baik, tantangan, dan solusi yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia mengenai *open contracting*. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari pionir pencetus komitmen *open contracting* dengan menerbitkan dokumen pengadaan melalui *Bojonegoro Open System Portal*.
  - ***Improving Citizen Engagement and Government Responsiveness for Better Public Services***  
Dalam *workshop* ini, Mas Muhammad Gibran Sesunan selaku Tenaga Ahli Muda Kedepatian I Kantor Staf Presiden menjelaskan mengenai poin-poin utama dalam sistem pengaduan nasional (LAPOR! SP4N) kepada para delegasi dari negara lain. LAPOR! SP4N telah menjadi suatu sarana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan masyarakat di Indonesia.
  - ***Advancing A Feminist Open Government Agenda: Challenges and Opportunities***  
Pada sesi ini, Tities Eka Agustine dari Seknas *Open Government Indonesia* menyampaikan kisah keberhasilan komunitas yang dipimpin oleh wanita di Kabupaten Bojonegoro yang telah merevolusi proses pengambilan data-data penting terkait kondisi wilayah mereka sehingga memudahkan para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan serta telah berhasil meningkatkan pelayanan publik di 430 desa.
  - ***Youth-Led Solution for Open Government***  
Dalam sesi ini, Debby Adelina Suryani dari Seknas *Open Government Indonesia* mengajukan ide untuk membuat sebuah jaringan pemuda bernama *OGP Youth Connect* dalam menjangkau anak muda untuk berkontribusi pada isu keterbukaan pemerintah dalam skala global. Selain itu, untuk skala nasional diperlukan adanya seminar dan FGD serta memberikan kesempatan bagi pemuda untuk bisa berkontribusi secara langsung dalam pengimplementasian keterbukaan pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah harus memperluas jaringan kepada CSO, khususnya yang menargetkan para pemuda. Terakhir, ia menyarankan untuk memperbaiki strategi komunikasi dengan mengangkat isu-isu pemuda dengan cara yang lebih menarik dan mulai menggunakan *hashtag* #OGPYouth untuk mempromosikan OGP kepada para pemuda.

- ***From Shoddy Construction to Grand Corruption: Renewing Trust through Open Contracting***

Menteri PPN/BAPPENAS RI Bambang Brodjonegoro turut juga mengisi sesi ini dan menyampaikan bahwa inisiatif *open contracting* bisa membawa dampak yang signifikan dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia terus mendorong terwujudnya pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam hal pengadaan barang dan jasa sekaligus mendorong partisipasi publik dengan dibentuknya sejumlah sistem pengadaan online seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), *e-Tendering*, *e-Purchasing*, *e-Contract*, *e-Catalogue*, dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP).

- ***Leaving No One Behind: From Theory to Practice for The Sustainable Development Agenda***

Slamet Soedarsono selaku Deputy Polhukhankam Kementerian PPN/BAPPENAS RI menyampaikan bahwa SDGs dapat didorong dengan nilai-nilai OGP khususnya nilai partisipasi masyarakat. Pemerintah juga membuka partisipasi mulai dari desa hingga provinsi. Dalam hal ini, terdapat poin penting untuk melakukan pendekatan khususnya di daerah, mengingat masing-masing daerah memiliki potensi yang berbeda. Ia pun menyarankan bahwa inisiatif global ini perlu diterjemahkan ke dalam konteks daerah agar dapat diimplementasikan dengan baik.

- ***Open Election and Improving the Quality of Participatory Democracy***

Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum turut mengisi sesi ini bersama dengan Titi Angraini dari Perludem untuk membahas bagaimana proses pemilu yang terbuka melalui *open government* bisa meningkatkan kepercayaan publik. Ia menjelaskan salah satu upaya konkrit KPU yaitu dengan membentuk aplikasi yang bisa menampilkan informasi tentang calon yang akan dipilih serta profil partainya. Dalam hal ini, KPU bekerja sama dengan Perludem untuk mewujudkan aplikasi yang dapat diakses secara gratis ini.

- ***Open Parliament: The Next Frontier for the Open Government Agenda in Asia Pacific***

Sesi ini berfokus pada bagaimana parlemen dapat membuka dan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Sesi ini juga menyentuh peran penting parlemen dalam mengawasi pemerintah komitmen, memastikan keberlanjutan agenda reformasi antar administrasi, dan membuat undang-undang dan sumber daya pelaksanaan reformasi pemerintahan terbuka.

- ***Advancing Open Government in Asia through Legal Empowerment***

Pada sesi yang di hadiri oleh Diani Sadia Wati dari Kemen PPN/BAPPENAS ini, disampaikan bahwa dalam keadilan, kesetaraan adalah salah satu nilai dasar yang kita manfaatkan untuk memimpikan masyarakat yang lebih baik. Perlu dicatat bahwa, akses terhadap keadilan dalam bentuk bantuan hukum adalah bagian dari prinsip negara hukum. Ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang damai dan kesetaraan bagi semua warga untuk memungkinkan semua orang untuk mendapatkan keadilan dan memenuhi hak-hak dasar.

OGP telah menjadi *platform* bagi setiap negara untuk berpartisipasi dalam mengembangkan tata pemerintahan yang baik serta mempromosikan transparansi,

partisipasi publik, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintah. Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan mekanisme untuk berbagai Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil untuk terlibat bersama-sama yang tercermin pada kerja sama BAPPENAS, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Dalam Negeri, BPHN dan masyarakat sipil (YLBHI, LBH Apik dan ILRC) untuk mengembangkan kebijakan untuk mendorong dan melakukan sinkronisasi dan penganggaran untuk bantuan hukum di daerah tersebut. Ini juga menunjukkan penguatan dan kerja sama yang luas dan partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah di sektor peradilan.

- ***Diversity Management for Open Government***

Adi Junjuran Mustafa dari KemenPANRB menyampaikan bahwa Indonesia terdiri dari 300 ras etnis, 1.340 suku, 1.211 bahasa lokal yang tersebar di 16.056 pulau. Dalam mengelola keberagaman, Indonesia menerapkan beberapa kebijakan melalui aparat sipil negara yang pada akhirnya akan membentuk dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menyatukan bangsa. Maka dari itu aparat sipil negara di Indonesia harus terintegrasi dan mengambil kandidat-kandidat dari seluruh pelosok bangsa.

- ***Anti-Corruption Commitments: The Building Blocks for Rebuilding Trust***

- Sesi ini dihadiri oleh Bimo Wijayanto selaku Tenaga Ahli Utama Kedepujian II Kantor Staf Presiden dimana disampaikan bahwa Indonesia menyadari bahwa *Beneficial Ownership* (BO) telah menjadi isu yang sangat strategis dan multi-sektoral. Pemerintah Indonesia bersama dengan aktor non-Pemerintah, memiliki pemahaman yang kuat dan berkomitmen untuk menerapkan BO. BO tidak hanya penting untuk mengatasi pencucian uang dan pendanaan teroris; ini juga penting untuk anti korupsi, perpajakan, industri ekstraktif, sektor keuangan, dan investasi.
- Kemajuan BO pada Rencana Aksi OGP di Indonesia termasuk implementasi dari peraturan Presiden yang ada: (1) Panduan akhir tentang pendaftaran perusahaan BO dengan menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; (2) Pembagian informasi dan penyebaran panduan untuk semua *stakeholder*; (3) Sistem Administrasi untuk Layanan Korporasi dengan menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; (4) Menyiapkan integrasi data BO di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (5) Uji coba pelaporan BO untuk 112 Penambangan *Coy* dan 69 Minyak dan Gas *Coy* sebagai inisiatif EITI, dan ini harus tersedia untuk umum.

- ***From Data to Engagement: Placing the Citizens at the Heart of Open Contracting***

Sesi ini dihadiri oleh Joko Purwanto dari *Bojonegoro Institute* dimana disampaikan bahwa permasalahan 70% kasus korupsi di Indonesia berasal dari pengadaan. Korupsi dan penipuan bisa mencapai 20-25% dari anggaran pengadaan (sumber: UNODC). Selain itu didalam pengadaan terdapat kurangnya kontrol yang memadai dari pemerintah dalam hal kebijakan, kapasitas dan mekanisme dan karena itu rentan mengalami mismanajemen. Informasi di domain yang beredar di publik tentang proses kontrak dan hasilnya seperti isi perjanjian, mekanisme pengawasan masih kurang terbuka. Oleh karena itu, penerapan *open contracting* sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam sesi ini, disampaikan pula langkah-langkah awal Indonesia dalam menuju *open contracting* kedepannya.

- ***Stepping Stones to Achieving Innovative Public Service Delivery Commitments in Asia: Health, Education, and Water***

Sesi ini merupakan *platform* bagi Indonesia untuk membagikan pengalaman baik terkait inovasi dalam pelayanan publik. Sesi ini dihadiri oleh perwakilan dari Puskesmas Sempu Hadi Kusairi, dimana disampaikan permasalahan yang dihadapi

oleh Puskesmas Sempu di Banyuwangi adalah berkaitan dengan tingkat angka kematian ibu melahirkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Puskesmas Sempu meluncurkan program *High Risk Pregnancy Hunters* (Pemburu Ibu Hamil Beresiko Tinggi/Bumil Resti). Program tersebut menggerakkan tukang sayur di desa yang dinamakan Mlijo untuk mengumpulkan informasi mengenai ibu hamil yang beresiko tinggi. Perekrutan tukang sayur didasari oleh 3 (tiga) aspek strategis; 1. Tukang sayur bisa masuk ke seluk beluk desa yang tidak bisa dijangkau pemerintah; 2. Kebanyakan langganan tukang sayur adalah ibu-ibu yang menggunakan kesempatan berbelanja untuk berbagi informasi; 3. Tukang sayur sudah banyak yang bisa menggunakan alat elektronik untuk meneruskan pesan dan informasi dengan cepat dan *real time*. Program ini juga didukung dengan aplikasi yang telah disiapkan Pemda Banyuwangi.

12. Pada *closing ceremony*, beberapa panelis diundang ke podium untuk memberikan *overall statement* terkait sesi-sesi yang telah diikuti. Salah satu perwakilan dari Indonesia yaitu Ilham Saenong dari Hivos menyampaikan bahwa pemerintah telah menyediakan *platform open contracting* untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai aset bagi negara untuk dapat maju kedepan. Pidato penutup disampaikan oleh *Chief, Country Support OGP* yaitu Paul Maassen dimana dalam pidatonya ia turut menegaskan inklusivitas dan pentingnya pemerintah mendengarkan suara dari seluruh lapisan masyarakat terutama dari perempuan. *Open Government Partnership Asia Pacific Regional Meeting 2018* telah mengundang pembicara dengan porsi 50% perempuan dan 50% laki-laki.
13. Akhir dari upacara penutupan *OGP-Asia Pacific Regional Meeting 2018*, perwakilan dari Pemerintah Kanada Natalia Little, mengundang seluruh *stakeholders* dari *open government* untuk hadir dalam *Open Government Partnership Global Summit 2019* yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2019 di Ottawa, Kanada. Dalam kesempatan ini, ia turut menyampaikan bahwa konferensi tingkat tinggi yang akan datang merupakan *platform* bagi seluruh pemangku kepentingan inisiatif *open government* untuk memberikan solusi dan mengambil aksi terkait sejumlah isu yang juga menjadi prioritas Pemerintah Kanada yaitu inklusivitas, partisipasi, dan katalisasi dampak pertumbuhan.

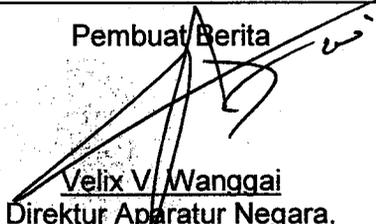
Atas perhatian disampaikan terima kasih.

Seoul, November 2018

Petugas Komunikasi

  
Paksyi Marutho

Pembuat Berita

  
Velix V. Wanggai  
Direktur Aparatur Negara,  
Kedeputan Bidang Politik,  
Hukum, Pertahanan, dan  
Keamanan, Kementerian  
PPN/Bappenas

# LAMPIRAN V

Laporan Performa Media Sosial

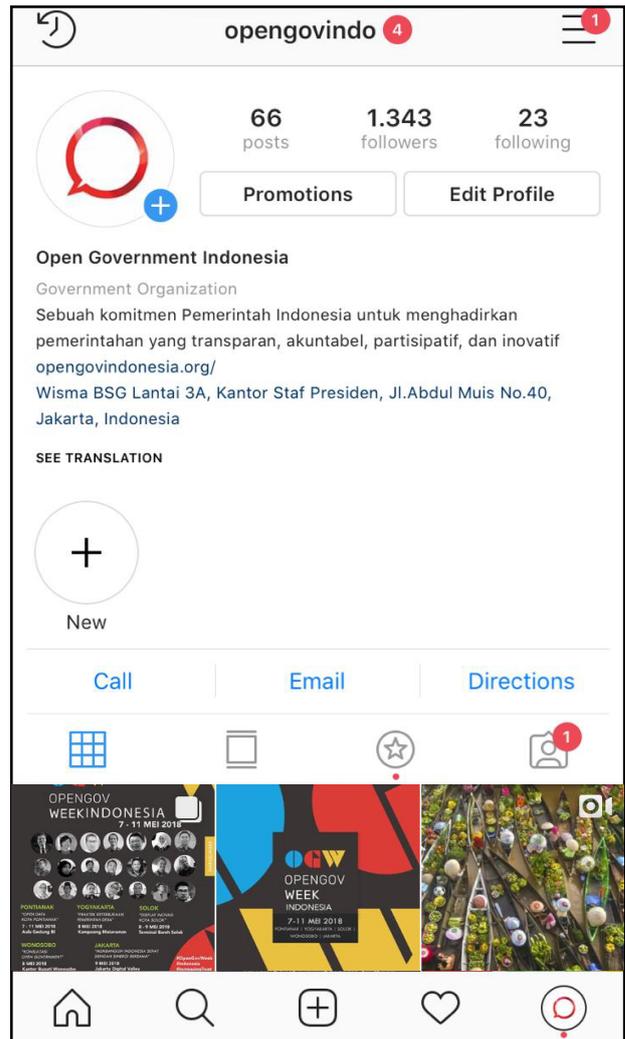
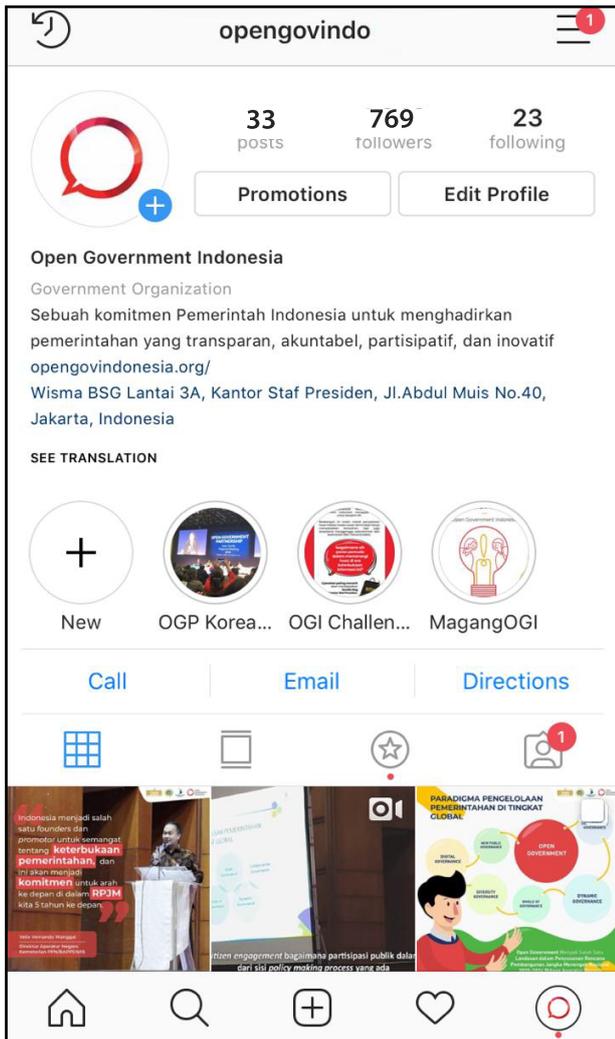


Lampiran V

# MEDIA SOSIAL

## OPEN GOVERNMENT INDONESIA

### Instagram

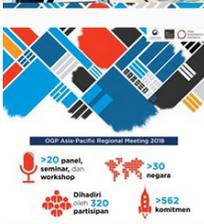


JULI - DESEMBER 2018

**FOLLOWERS:** 769 ➔ 1.343

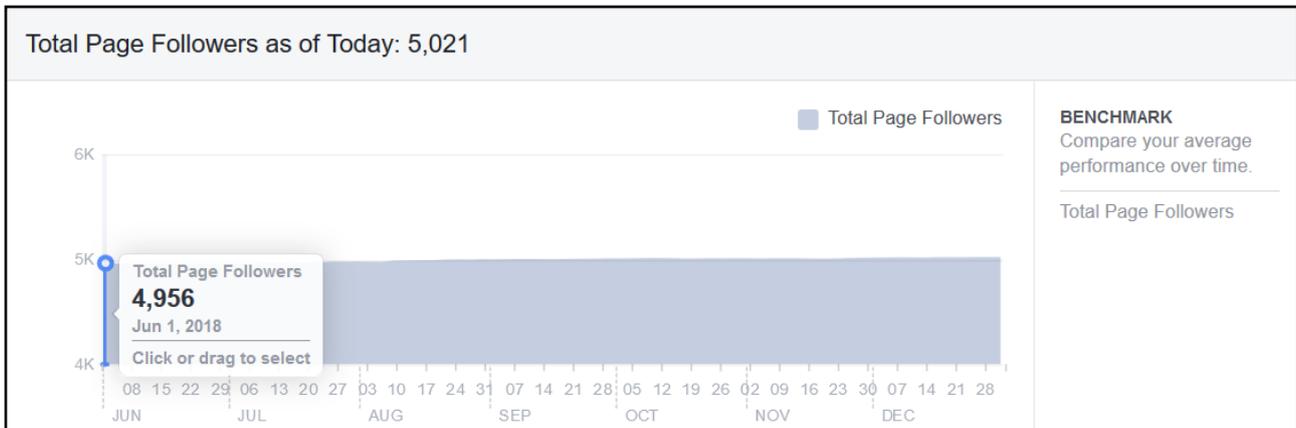
**+574**  
**Growth 74,6%**

**POSTS:** 33 Posts



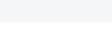
JULI - DESEMBER 2018

**FOLLOWERS:** 4.956 ➔ 5.021 **+65**  
**Growth 1,3%**



**POSTS:** 30 Posts

Published	Post	Type	Targeting	Reach	Engagement
01/21/2019 11:50 AM	GovPay is the APAC tax, urbantech, data, identity,			457	24 4
01/10/2019 3:45 PM	Dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik RPJNM			367	16 7
01/10/2019 3:45 PM	"Indonesia menjadi salah satu founders dan promotor untuk			762	10 19
12/25/2018 5:59 PM	We wish you a Merry Christmas! May the peace and joy of			198	10 3
12/21/2018 6:16 PM	Halo Sahabat OGI! Independent Reporting Mechanism (IRM) dari			267	17 9
11/23/2018 6:05 PM	Ini dia salah satu gebrakan yang telah dibuat oleh DPR RI untuk			4K	147 104
11/23/2018 6:01 PM	Tahukah kamu kalau DPR RI sudah mendeklarasikan Inisiatif			420	36 4
11/23/2018 5:56 PM	Sahabat OGI, tahukah kamu kalau DPR RI sudah			401	31 9
11/13/2018 2:15 PM	Dalam sesi Advancing Legal Empowerment and Citizen-			322	15 7

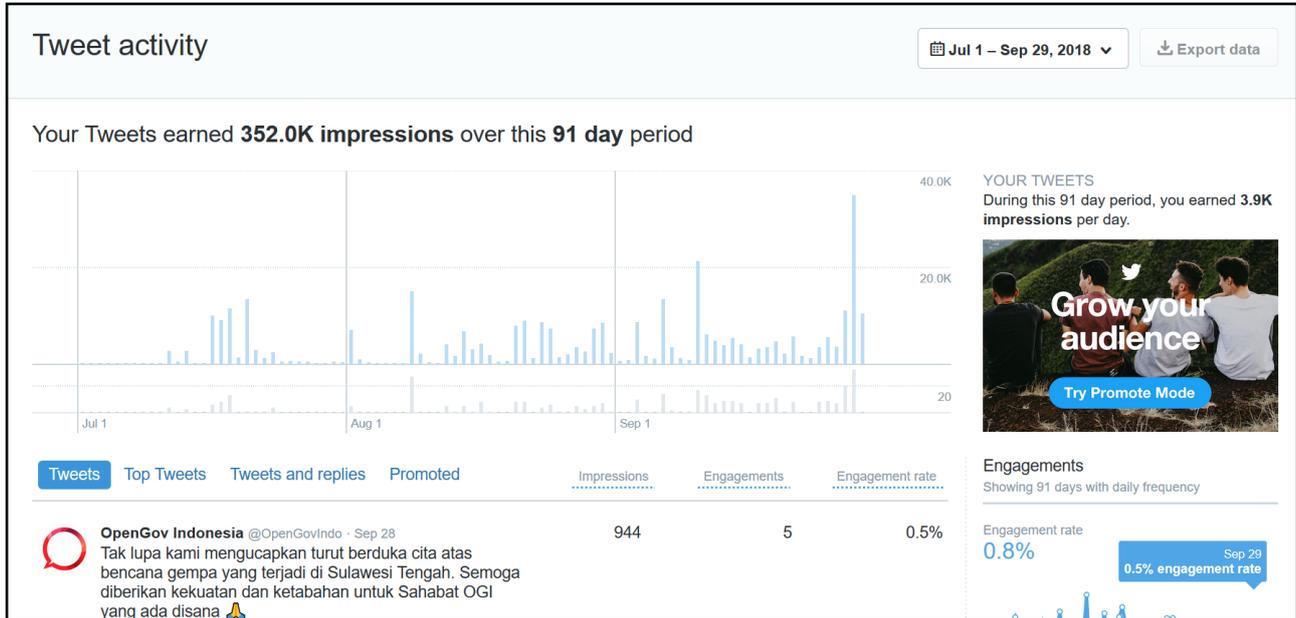
11/10/2018 2:52 PM		Pahlawan bukan hanya mereka yang namanya			214		0 4	
11/09/2018 4:31 PM		Dalam sesi Determinant of Trust in Government:			310		38 4	
11/09/2018 4:13 PM		Di hari kedua (6/11) OGP Asia-Pacific Regional			719		29 15	
11/08/2018 4:12 PM		Dalam sesi Ministerial Roundtable pada hari kedua			252		29 1	
11/08/2018 1:59 PM		Dua perwakilan dari Sekretariat Nasional OGI juga			242		13 2	
11/08/2018 11:50 AM		Annyeonghaseo Sahabat OGI! Sudah pada tahu kan			685		75 22	
11/05/2018 11:37 AM		Open Government Partnership Asia-Pacific			288		50 8	
10/29/2018 5:08 PM		Sekretariat Nasional OGI mengucapkan turut berduka			288		12 12	
10/24/2018 10:43 AM		Selasa (23/10) Seknas OGI tengah mengadakan Rapat			418		73 12	
10/15/2018 4:32 PM		Sejak hari ini sampai dua hari ke depan (15-17/10) tengah			265		11 8	
10/15/2018 10:23 AM		Depok (12/10), Sekretariat Open Government Indonesia			217		12 4	
10/11/2018 5:12 PM		Kamis (11/10), Bupati Jember mengadakan lokakarya			719		86 16	
10/09/2018 12:55 PM		[08/10] Seknas OGI bersama Indonesia Corruption Watch			466		35 16	
08/17/2018 10:49 PM		Selamat Hari Ulang Tahun ke-73 Republik Indonesia!			1.9K		58 51	
07/23/2018 1:05 PM		Halo Sahabat OGI! Dalam mengimplementasikan			2.7K		194 84	
07/17/2018 11:23 AM		Halo Sahabat OGI! OGP Summit Georgia 2018 telah			850		61 26	
07/11/2018 7:16 PM		Hi Sahabat OGI! Tahukah kamu bahwa tanggal 17-19			692		56 13	
06/28/2018 12:56 PM		Batas akhir pendaftaran Cerita Inovasi diperpanjang			1.2K		71 62	
06/21/2018 3:33 PM		AYO BERBAGI CERITA INOVASI!!💡 Punya cerita			616		32 22	
06/19/2018 9:23 PM		Open Government Indonesia mengucapkan Selamat Idul			246		6 7	
05/06/2018 1:16 PM		Tahun ini Indonesia ikut turut serta dalam penyelenggaraan			1.3K		149 34	

# Twitter

**JULI - SEPTEMBER 2018**

Tweets : 334

Impressions : 3.900/day



## Top Tweets

Tweets	Top Tweets	Tweets and replies	Promoted	Impressions	Engagements	Engagement rate
	<b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Jul 18	Dari beberapa cerita panelist OGP Summit hari ini, ada 2 praktek OGP yg menarik. #1 Lembaga-lembaga negara di Sri Lanka spt KPK, BPK dll dipilih oleh Statutory Body. Bukan oleh DPR, apalagi eksekutif. #OGPgeorgia #OpenGovIndo @HivosROSEA		18,735	57	0.3%
	<b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Sep 28	Selesai sudah #OGITalk hari ini 😊 Terima kasih atas partisipasi dari @taufikmadjid71 @KemenDesa @InfoPATIRO @rikard_wawo @WahanaVisi_ID dan semua Sahabat OGI. Sampai jumpa di #OGITalk berikutnya ya! #MulaiDariDesa #JadiOpen		13,323	26	0.2%
	<b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Sep 6	Pagi Sahabat OGI! Hari ini tengah diadakan Forum "Festival Pembelajaran Program Akuntabilitas Sosial untuk Peningkatan Layanan Publik" bersama @KSPgoind @BappenasRI @Kemendagri_RI @KemenkesRI @KemenDesa dengan dukungan dari @KOMPAK_Parmad @WahanaVisi_ID #PartisipasiPublik pic.twitter.com/ZvszKJ63J		9,420	84	0.9%
	<b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Sep 28	Sejauh mana nih UU Desa mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran dana desa yang terbuka? @taufikmadjid71 #MulaiDariDesa #JadiOpen twitter.com/taufikmadjid71...		8,079	59	0.7%
	<b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Sep 28	Kalau masih ada aspirasi yang belum tersampaikan bisa disalurkan melalui tautan bit.ly/05nap #MulaiDariDesa #OGITalk #JadiOpen		6,786	70	1.0%
	<b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Aug 29	The House of Representative of the Republic of Indonesia has declared on Open Parliament, together with the celebration of its 73rd Anniversary. This is a huge milestone for parliamentary openness and encourages people to be closer with its representatives. @opengovpart @DPR_RI pic.twitter.com/KYs06hMlj		6,251	98	1.6%

# OKTOBER - DESEMBER 2018

Tweets : 169

Impressions : 2.400/day

### Tweet activity

Oct 2 – Dec 31, 2018 Export data

Your Tweets earned **222.1K impressions** over this **91 day** period

**YOUR TWEETS**  
During this 91 day period, you earned **2.4K impressions** per day.

**Engagements**  
Showing 91 days with daily frequency

Engagement rate **0.4%**

**Tweets** | Top Tweets | Tweets and replies | Promoted

Impressions | Engagements | Engagement rate

	Impressions	Engagements	Engagement rate
<p><b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Dec 25</p> <p>We wish you a Merry Christmas! May the peace and joy of Christmas always be in our hearts. God bless you! pic.twitter.com/MOBFY4Dcnu</p> <p><a href="#">View Tweet activity</a></p>	965	11	1.1%

## Top Tweets

<p><b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Nov 1</p> <p>Kamis (1/11), Seknas OGI menghadiri acara talkshow yang diadakan oleh @LKPP_RI yang bertajuk "Koalisi Masyarakat Sipil, Kawal Pengadaan Bebas Korupsi" #JadiOpen pic.twitter.com/iC92cYCVlo</p> <p><a href="#">View Tweet activity</a></p>	13,147	93	0.7%	<a href="#">Promote</a>
<p><b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Oct 11</p> <p>Kamis (11/10), Bupati Jember mengadakan lokakarya bersama perwakilan dari Bappenas dan Kantor Staf Presiden sebagai pengampu penyelenggaraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Open Government Indonesia untuk mendiskusikan mekanisme partisipasi publik dalam mencapai TPB. pic.twitter.com/5nyr8WJXuV</p> <p><a href="#">View Tweet activity</a></p>	4,875	93	1.9%	<a href="#">Promote</a>
<p><b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Oct 11</p> <p>Atas penyampaian tersebut, Bupati Jember menyambut baik dan berharap untuk dapat terus berkolaborasi dengan para pengampu inisiasi TPB dan Open Government Indonesia, termasuk dengan @BappenasRI serta @KSPgoid. #JadiOpen</p> <p><a href="#">View Tweet activity</a></p>	3,865	7	0.2%	<a href="#">Promote</a>
<p><b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Nov 5</p> <p>Pada kesempatan ini pula, Diani Sadiawati, Staf Ahli Menteri @BappenasRI Bidang Hubungan Kelembagaan berbagi 2 model kolaborasi Indonesia untuk @opengovpart dan Anti-Corruption Strategy dalam sesi yang sama</p> <p>#OGPAsiaPac #OGIforkorea #JadiOpen pic.twitter.com/Q0tCQ9uZW3</p> <p><a href="#">View Tweet activity</a></p>	3,765	41	1.1%	<a href="#">Promote</a>
<p><b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Oct 11</p> <p>Pada kesempatan tersebut, @yanuarnugroho juga menyampaikan bahwa konsep tersebut perlu dipahami sebagai instrumen bagi Kepala Daerah untuk dapat mengupayakan inovasi pembangunan.</p> <p><a href="#">View Tweet activity</a></p>	3,629	13	0.4%	<a href="#">Promote</a>
<p><b>OpenGov Indonesia</b> @OpenGovIndo · Nov 5</p> <p>Sesi Stepping Stones to Achieving Innovative Public Service Delivery Commitments in Asia: Health, Education, and Water telah berlangsung. Sesi ini membahas tentang pelayanan publik yang inovatif.</p> <p>#OGPAsiaPac #OGIforkorea #JadiOpen pic.twitter.com/ua86v53NJS</p> <p><a href="#">View Tweet activity</a></p>	3,621	36	1.0%	<a href="#">Promote</a>



**Tautan Video :** <http://bit.ly/OpenParliamentIndo>



# LAMPIRAN VI

*Newsletter Open Government Indonesia*



Austenyta Sola Gracia <austenyta12@gmail.com>

---

## OGI Timeline [June-2018]

1 message

---

**Open Government Indonesia** <contact@opengovindonesia.org>  
Reply-To: Open Government Indonesia <contact@opengovindonesia.org>  
To: austenyta12@gmail.com

Wed, Jun 27, 2018 at 5:55 PM



June - 2018

---

**FROM INSIDE INDONESIA**

---



Celebrating Eid Mubarak 1439 H

---

### **Bojonegoro Institute Talking About Openness**

The NGO Bojonegoro Institute (BI) held a joint discussion among youth representatives of the Student Organization (Ormawa). In the discussion, invite young people of Bojonegoro to talk about aspiration net, action plan of openness of Bojonegoro regency government. [\*\(Article in Bahasa\)\*](#)

Local CSO

## **Movement Through Data**

The youth, local government, and the private sector in Pontianak are moving. They are eager and eager to work together to create a working atmosphere based on data. The goal is only one: for the better future of the city. *(Article in Bahasa)*

Open Government Week

## **Working Together with Government and The Public for a More Advance Indonesia**

On May 7-11th 2018, Indonesia participated in organizing Open Government Week which was held simultaneously along with 96 countries. In Indonesia, this event was held in 5 cities such as Jakarta, Pontianak, Yogyakarta, Solok and Wonosobo. It is a form of the commitment of the Indonesian government to form a more open government. Open Government Indonesia is jam packed with multiple activities including seminars, workshop, innovation exhibition, consultation forum and with each cities having different themes and topics. *(Article in Bahasa)*

Open Government Week

## **At 72 Years of Age The Government Solo City Introduced Online Budget System for Information Transparency**

On the 72nd anniversary of the Solo City Government, the municipal government gave a gift to the Solo community in the form of information disclosure on Solo's Budget (APBD). The disclosure of information is packed through the Regional Budget Information (INAB). *(Article in Bahasa)*

Local Government

## **Aceh Integrated Information System, to Overcome Lack of Data**

Vice Governor of Aceh Nova Iriansyah in his speech during the opening of the One Data Insight Workshop for the Aceh SIAT program, said that one of the obstacles experienced in running the Aceh development program so far is the availability of data that is still weak. To overcome this weakness, said Vice Governor we should be able to apply information technology that is able to provide data needs in a fast, realtime, integrated, and up to date. The presence of the SIAT program is basically aimed at providing a data center, so evidence based planning principles can be implemented at all levels. *(Article in Bahasa)*

Local Government

---

# Ayo Berbagi Cerita Inovasi!

Mari bagikan cerita-cerita Praktik Inovasi dalam Pelayanan Publik di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil (CSO), pemerintah daerah, atau akademisi. Tunjukkan inovasimu, untuk menginspirasi Indonesia dan Dunia!



Daftarkan tulisanmu di:  
[bit.ly/ceritainovasi](https://bit.ly/ceritainovasi)

Deadline: 1 Juli 2018

Tim OGI akan melakukan evaluasi abstraksi dan akan dilakukan pendalaman cerita.

Kisah terpilih akan dipublikasikan dalam kanal komunikasi OGI dan portal Open Government Partnership.

Informasi lebih lanjut:  
[contact@opengovindonesia.org](mailto:contact@opengovindonesia.org)



[INDONESIA ONLY]

Open Government Indonesia held a special event "Ayo Berbagi Cerita Inovasi" To gather the stories of Innovation Practices in Public Service in Indonesia. The stories will be shared in the Open Government Indonesia communications channel, while the selected story will also be featured in the global portal of Open Government Partnership and is planned to be featured at the Open Government Summit this year in Tbilisi, Georgia.

**Submit**

**FROM INTERNATIONAL**

## Open Data, Open Government

The application of data and their assimilation with solving social problems, enabling better governance and powering elected government to serve their citizens better in ushering new revolution.

The Hindu

## The Right Tools for The Right Job How OGP Can Help Win The Fight for Civic Space

Based on an analysis of documented events over the last five years, freedom of association, assembly, and expression are under threat in many OGP countries. The most common problems are: (1) attacks on journalists and human rights defenders, (2) failure to respect and protect public assemblies, and (3) barriers to independent and efficient operation of formal civil society organizations. Is OGP focusing on the right problems and using the right tools?

Open Government Partnership

## Government's Data-Accessibility Challenge

There's more to transparency than just putting reams of information out there. It needs to be easy to understand and useful. Spreadsheets just won't work here. You need to invest in data visualization techniques and content writing to explain data, no matter how it is accessed.

Governing

## Citizen's Participation Necessary for Economic and Social Development

Professor George Gyan-Baffour, Minister for Planning of Ghana has stressed the need for appreciation and active engagement of all stakeholders within the boundaries of a new planning culture in terms of socio-economic development that creates space for all to participate.

GNA

---

***That's It for Now, Peeps!***

**Let's keep in touch.**

Visit us on [Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#), [Youtube](#), or our [Website](#). You can also ask anything or share your thoughts about Open

Government Indonesia by send us an [email](#). Thank you!

Connect with us



**Sekretariat Nasional Open Government Indonesia**

Wisma BSG, [Jalan Abdul Muis No.40, RW.8,](#)  
Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, 10160  
Indonesia

---

This email was sent to [austenyta12@gmail.com](mailto:austenyta12@gmail.com)

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

Open Government Indonesia · Wisma BSG, [Jalan Abdul Muis No.40, RW.8, Petojo Selatan, Gambir](#) · [Jakarta Pusat 10160](#) ·  
Indonesia





Austenyta Sola Gracia &lt;austenyta12@gmail.com&gt;

---

**Fwd: OGI Timeline [July-2018]**

1 message

**tities eka agustine** <tities.ekagustine@gmail.com>

Sun, Jan 27, 2019 at 5:46 PM

To: austenyta12 &lt;austenyta12@gmail.com&gt;

----- Forwarded message -----

From: **Open Government** <contact@opengovindonesia.org>

Date: Tue, 31 Jul 2018, 15:08

Subject: OGI Timeline [July-2018]

To: &lt;tities.ekagustine@gmail.com&gt;



---

***WHAT OGI HAS READ AND EXPLORED THIS MONTH***

---

**NASIONAL*****OGP Summit Georgia 2018 : Youth Talk***



On July 18, 2018, Open Government Indonesia with Indonesian Youth Diplomacy and supported by Cocowork conducted a seminar entitled OGP Summit Youth Talk: Bolstering Youth Participation to Open Government. This activity aims to share experiences of Indonesian delegates participating in the Open Government Partnership (OGP) Summit in the Capital of Georgia, Tbilisi on 16-17 July 2018 to the community, especially among young people including students. *(Article in Bahasa)*

[Read more](#)

---

## [Moeldoko Leads Indonesia Delegation at The 2018 OGP Summit in Georgia](#)

Presidential Chief of Staff, Moeldoko led the Indonesian delegation at the fifth Global Summit of Open Government Partnership (OGP) Summit 2018 held Tbilisi, Georgia, 16-18 July 2018. The forum was attended by delegates from 76 countries comprising representatives of government, parliament, researchers, and civil society activists engaged in anti-corruption, openness and public service issues. *(Article in Bahasa)*

OGP Global Summit

## National Government - Fadli Zon: House of the Representative of the Republic Indonesia is Committed to Join Open Parliament Initiatives

On 17-18 July 2018 the House of Representatives delegation appointed by House Speaker Fadli Zon attended the 2018 Open Government Partnership Summit in Tbilisi, Georgia. In the 5th OGP Summit, Fadli Zon affirmed the commitment and readiness of DPR-RI, to join the Open Parliament. *(Article in Bahasa)*

OGP Global Summit

## Open Data: Industrial Revolution 4.0 and The Future of Governance

Open Government requires open data (Open Data). Some of the regions in Indonesia have implemented this initiative, one of them is the city of Bandung. Open Data is used by the Government of Bandung City to encourage evidence-based policies. However, on the other hand, there are other challenges needs to be addressed, such as the unavailability of the city government policy framework related to open data and the limited access of marginal people to technology (digital literacy). *(Article in Bahasa)*

Open Data BlogOGI

## ***Cerita Inovasi***



**CERITA INOVASI:**  
**Bridging Tiga Sistem (SIM RSMS, BPJS, dan INA-CBG's) Satu Untuk Semua - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto**

#BlogOGI

**CERITA INOVASI:**

**Bed Management System (BMS)- RSUD Provinsi NTB**

#BlogOGI





**CERITA INOVASI:**

**Implementasi Open Data di Kota  
Magelang melalui Sistem  
Informasi DataGO dalam  
Mendukung Konsep Satu Data  
Indonesia oleh Pemerintah Kota  
Magelang**

**#BlogOGI**

---

***Forum Konsultasi Publik***



Ingin terlibat langsung dalam proses perumusan

## Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018-2020?

Bagikan aspirasimu di:

[bit.ly/nap-OGI](https://bit.ly/nap-OGI)

hingga 30 Agustus 2018



Dalam mengimplementasikan keterbukaan, Pemerintah Indonesia bersama Open Government Indonesia saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia Tahun 2018-2020. Proses penyusunan tersebut telah melibatkan berbagai *stakeholder*.

Pada tahapan selanjutnya, Rencana Aksi ini akan dipublikasikan secara daring untuk mendapatkan masukan dari masyarakat luas. Maka dari itu, Open Government Indonesia mengajak anda semua (Pengguna Layanan Pemerintah, Penerima Manfaat Layanan Pemerintah, Akademisi, Peneliti, Mahasiswa, CSO, Sektor Swasta, dan Media) untuk terlibat dalam proses perumusan Renaksi OGI 2018-2020 dengan cara mengisi form Konsultasi Publik.

**Pengisian form kami tunggu hingga 30 Agustus 2018. Pastikan anda menjadi bagian dalam perumusan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia Tahun 2018 - 2020!**

**Isi Form Sekarang!**

## INTERNASIONAL

### **Open Government Partnership - My Story of Open Contracting**

OGP is a partnership of 74 countries, 15 subnational governments and thousands of civil society organizations who have co-created over 3000 commitments in national action plans to make governments more open and less corrupt. And guess what? Open contracting is one of the most prominent, rapidly growing areas for commitments in OGP action plans, embraced already by 23 countries and 4 subnational governments. ([opengovpartnership.org](http://opengovpartnership.org))

Open Government Partnership

### **United Nations Development Programme - Open Government is The Key to Leaving No One Behind**

The 5th Global Open Government Summit taking place this week (17-19 July) in Tbilisi, Georgia focusses on civic engagement, fighting corruption and public service delivery. UNDP has supported the Open Government Partnership (OGP) for the past seven years as a multilateral partner. For many countries, the Global Summit will be an opportunity to learn from the diverse experiences of partner countries and reflect on their own commitment to open government. ([undp.org](http://undp.org))

OGP Global Summit

### **RCI - Canada to Host Global Summit on Open Government in 2019**

The 5th Global Open Government Summit taking place this week (17-19 July) in Tbilisi, Georgia focusses on civic engagement, fighting corruption and public service delivery. UNDP has supported the Open Government Partnership (OGP) for the past seven years as a multilateral partner. For many countries, the Global Summit will be an opportunity to learn from the diverse experiences of partner countries and reflect on their own commitment to open government. ([rcinet.ca](http://rcinet.ca))

OGP Global Summit

## Transparency International - Three Priorities at The Open Government

### Partnership Summit

This week, the Open Government Partnership (OGP) is holding its 5th global summit in Tbilisi, Georgia to highlight three cross-cutting issues facing national governments today: anti-corruption, civic engagement and public service. ([transparency.org](https://www.transparency.org))

OGP Global Summit

---

***That's It for Now, Peeps!***

---

**Let's keep in touch.**

Visit us on [Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#), [Youtube](#), or our [Website](#). You can also ask anything or share your thoughts about Open

Government Indonesia by send us an [email](#). Thank you!

Connect with us

<td class="mcnFollowIconContent" style="padding-right: 10px;padding-bottom: 9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 10



Austenyta Sola Gracia <austenyta12@gmail.com>

---

**Fwd: OGI Timeline [August-2018]**

1 message

---

**tities eka agustine** <tities.ekagustine@gmail.com>  
To: austenyta12 <austenyta12@gmail.com>

Sun, Jan 27, 2019 at 5:46 PM

----- Forwarded message -----

From: **Open Government** <contact@opengovindonesia.org>

Date: Fri, 31 Aug 2018, 22:00

Subject: OGI Timeline [August-2018]

To: <tities.ekagustine@gmail.com>



---

***WHAT OGI HAS READ AND EXPLORED THIS MONTH***

---

**NATIONAL**



“

Hidup adalah tantangan,  
jangan dengarkan  
omongan orang, yang  
penting kerja, kerja, dan  
kerja.

Kerja akan menghasilkan  
sesuatu, sementara  
omongan hanya  
menghasilkan alasan.”

—  
**Presiden Joko Widodo**



image credit : Biro Pers Setpres

## **Open Government Indonesia Gelar Kick Off Penyusunan Rencana**

### **Aksi 2018-2020**

Sekretariat Open Government Indonesia menyelenggarakan kegiatan 'Kick Off Meeting' Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia Periode 2018-2020 di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 8 Agustus 2018. Kegiatan 'Kick Off Meeting' merupakan salah satu rangkaian awal dari proses penyusunan rencana aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020 adalah rencana aksi kelima semenjak bergabung ke dalam Open Government Partnership.

Rencana Aksi OGI

## **Pertemuan Bilateral Open Government Indonesia**

Setiap tahun proses penyusunan rencana aksi keterbukaan pemerintah selalu diawali dengan proses diskusi dengan organisasi masyarakat sipil. Proses demikian dinamakan dengan ko-kreasi, dimana masyarakat bekerja bersama pemerintah untuk merumuskan perbaikan pelayanan publik sepanjang dua tahun kedepan. Pada rencana aksi kali ini, terdapat 22 organisasi masyarakat sipil dan 21 kementerian/lembaga duduk membahas target dan indikator capaian dari masing-masing aksi.

Rencana Aksi OGI

## **DPR RI Bersiap Untuk Deklarasi *Open Parliament***

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Sekretariat Open Government Indonesia mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bertemakan "Open Parliament Day OGP Summit 2018 dan Arah Keterbukaan Parlemen DPR RI" di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat (Senin, 13 Agustus 2018). Kegiatan FGD diselenggarakan dalam rangka membahas kerangka penerapan Open Parliament di DPR RI dan pemerintah Indonesia dalam Forum OGP Summit di Georgia Juli lalu.

Open Parliament

## **DPR RI Deklarasikan *Open Parliament Indonesia***

Bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke-73, DPR RI mendeklarasikan inisiatif *Open Parliament* DPR-RI. Kegiatan Deklarasi Inisiatif *Open Parliament* diselenggarakan di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Jakarta Pusat (Rabu, 29 Agustus 2018).

Open Parliament

## **Workshop Penyusunan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Kabupaten**

### **Bojonegoro**

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Open Government Partnership Kabupaten Bojonegoro periode 2018-2020. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, bekerja sama dengan Bojonegoro Institute, telah menggelar Workshop di Hotel Griya Dharma Kusuma, pada, Rabu (15/8/2018). Acara tersebut dihadiri oleh 35 peserta, yang terdiri dari 18 peserta dari unsur OPD dan 17 peserta dari unsur CSO, perguruan tinggi dan Relawan Keterbukaan.

Renaksi Daerah

## **Rakor Penetapan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Kabupaten**

### **Bojonegoro 2018-2020**

Setelah penyelenggaraan Workshop Multipihak untuk penyusunan Draft Rencana Aksi (Renaksi) Keterbukaan pemerintah Bojonegoro, 15 Agustus lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memantapkan komitmennya terhadap keterbukaan pemerintahan. Salah satunya melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Multipihak Kabupaten Bojonegoro. Rakor yang dipimpin oleh Joko Lukito, Asisten 1 Setda ini bertujuan untuk melakukan finalisasi atas rancangan Renaksi keterbukaan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Periode 2018-2020.

Renaksi Daerah

---

## ***Forum Konsultasi Publik***



Ingin terlibat langsung dalam proses perumusan

## Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018-2020?

Bagikan aspirasimu di:

**[bit.ly/nap-OGI](https://bit.ly/nap-OGI)**

hingga 30 September 2018



Logos at the bottom include: the Indonesian Government logo, the logo for 'Keterbukaan Masyarakat' (Open Society), the logo for 'OGI' (Open Government Indonesia), and the 'OPEN GOVERNMENT INDONESIA' logo.

Dalam mengimplementasikan keterbukaan, Pemerintah Indonesia bersama Open Government Indonesia saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia Tahun 2018-2020. Proses penyusunan tersebut telah melibatkan berbagai *stakeholder*.

Pada tahapan selanjutnya, Rencana Aksi ini akan dipublikasikan secara daring untuk mendapatkan masukan dari masyarakat luas. Maka dari itu, Open Government Indonesia mengajak anda semua (Pengguna Layanan Pemerintah, Penerima Manfaat Layanan Pemerintah, Akademisi, Peneliti, Mahasiswa, CSO, Sektor Swasta, dan Media) untuk terlibat dalam proses perumusan Renaksi OGI 2018-2020 dengan cara mengisi form Konsultasi Publik.

**Pengisian form kami tunggu hingga 30 September 2018. Pastikan anda menjadi bagian dalam perumusan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia Tahun 2018 - 2020!**

**Isi Form Sekarang!**

---

## INTERNATIONAL

### **Advancing Aid and Budget Transparency Development: Five Things You Need to Know**

At the core of the relationship between citizens and the state are decisions about how public resources are raised and spent. Budgets are the most important economic policy tool available to governments to promote inclusion and redress inequality. The availability of comprehensive, timely information, with meaningful opportunities for citizen engagement in budget processes, can lead to substantive improvements in service delivery and governance.

Open Government Partnership

## Defend Your Rights to a Free Press and an Open Government

Today, the Institute for Nonprofit News -- which counts *Maryland Matters* as a member -- joins journalists across the country in asking you, the public, to stand up for your rights to free speech and an open government. This started as a campaign by *The Boston Globe* to ask the president of the United States to knock off attacking the news media. But the president's attacks on the press aren't ultimately about the press.

Marylandmatters

---

***That's It for Now, Peeps!***

---

### **Let's keep in touch.**

Visit us on [Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#), [Youtube](#), or our [Website](#). You can also ask anything or share your thoughts about Open Government Indonesia by send us an [email](#). Thank you!

Connect with us



Austenyta Sola Gracia &lt;austenyta12@gmail.com&gt;

---

**OGI Timeline [September-2018]**

1 message

---

**Open Government Indonesia** <contact@opengovindonesia.org>  
Reply-To: Open Government Indonesia <contact@opengovindonesia.org>  
To: austenyta12@gmail.com

Sun, Sep 30, 2018 at 3:24 PM



---

## ***WHAT OGI HAS READ AND EXPLORED THIS MONTH***

---

### **NATIONAL**

---

#### **Indonesia Korsel Bekerja Sama di Bidang E-Government**

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Syafruddin dalam kunjungan kerja mendampingi Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan (Korsel)

menandatangani nota kesepahaman bidang *e-government* dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea, Kim Boo Kyum. Penandatanganan kerja sama yang dilakukan di Seoul, Senin (10/9), berlaku pada 2019 dan merupakan perpanjangan kerja sama sebelumnya pada 2016-2018

Beritasatu

### **Mendekatkan dan Mengedukasi masyarakat Melalui Festival Media**

Rangkaian Festival Media (Fesmed) 2018 resmi dibuka Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Jumat (21/9). Sutarmidji mengatakan peran media sangat dibutuhkan dalam era keterbukaan informasi. Penyampaian informasi jauh lebih cepat dan efektif melalui media massa. Itu dirasakannya sendiri saat masih menjadi Wali Kota Pontianak hingga resmi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat.

Merdeka

### **Komisi Informasi Pusat Gelar Peringatan Hari Hak Untuk Tahu**

Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar peringatan Hari Hak untuk Tahu (RTKD/Right To Know Day) se-dunia, Minggu (30/09) di Silang Timur Monas Jakarta. Ketua KI Pusat Gede Narayana menyatakan, kegiatan ini merupakan peringatan tentang kampanye keterbukaan informasi publik berskala internasional yang diperingati di seluruh dunia.

Sindonews

### **Mantap! DKIPS Sulbar Akan Susun E-Government**

Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merencanakan penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang elektronik-government (e-government). Kepala Bidang Layanan E-Government DKIPS Sulbar, Muh Ridwan Djafar, mengatakan, pihaknya merencanakan kegiatan penyusunan Perda pengembangan e-government Tahun 2019, agar penerapan e-government lebih terintegrasi. .

Wartaekonomi

## Menuju Sragen Smart City, Bupati Harap Semua Dinas Implementasikan

### E-Government

Smart city menjadi isu yang sedang banyak digarap oleh beberapa daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, dalam rangka upaya mewujudkan Kab. Sragen menuju Smart City, Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati secara resmi membuka seminar Implementasi e-Government Kab. Sragen tahun 2018 yang berlangsung di Ruang Sukowati Setda Kab. Sragen, Selasa (04/09/2018). Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sragen, Purwadi, S.H., M.M, dalam pemaparannya menjelaskan tujuan seminar tersebut untuk mendukung program pemerintah pusat dalam percepatan penetrasi TIK kepada masyarakat melalui edukasi TIK dengan program pemberdayaan TIK.

[Sragen.go.id](http://Sragen.go.id)

---

## INTERNATIONAL

### Key Open Gov Deadline Nears With No Public Action

OGP was officially launched by eight founding nations in September 2011, after President Barack Obama outlined a general concept for it in a speech before the United Nations in September 2010. Former U.S. Ambassador to the United Nations Samantha Power once called it Obama's "signature governance initiative." Under Trump, the United States government has moved from /open to /closed. Open government has regressed under the president, with well-documented "information darkness" spreading across agencies, further erosion of trust in government and the office of the presidency itself, and the ongoing, unconstitutional corruption of the conflicts of interest that Trump retained in office.

Fcw

## **India: Significant Beneficial Ownership: Who is the Real Owner of The Shares**

The recent changes to Section 90 of Companies Act, 2013, is to determine the identity of the person behind the curtain who is having a significant ownership of the company and is essentially controlling the management and daily affairs of the company. The Ministry of Corporate Affairs notified the Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018 ("Rules") on 13 June 2018. These Rules were made in exercise of powers provided under Section 90 of the Companies Act, 2013 (Act) which was notified on 6 June 2018.

Mondaq

## **Government Blows Past Deadline for Fourth National Action Plan for Open Government**

August has come and gone and the U.S.'s fourth National Action Plan for Open Government, commonly referred to as NAP 4, is nowhere to be seen. Initially, NAP 4 was scheduled for release in October 2017. However, on Oct. 31, 2017, then acting federal CIO Margie Graves sent a delay letter to the CEO of the Open Government Partnership, the organization that oversees these plans. Some in civil society have expressed concern over what open government will look like under President Trump, an administration that has openly shunned transparency norms. Demand Progress, for example, declined to participate in the drafting of the NAP this time around, citing what it called Trump's "authoritarian policies."

Fedscoop

## **Open, Goal-oriented, Collaborative: How We See The Future of Procurement**

In Washington, D.C. and Buenos Aires, at more than 8,000 km on opposing ends of the American continent, two different conferences discuss the future of procurement. Towards the Digital Frontier at the General Public Procurement Conference (GPPC) and The future is open at the International Open Data Conference (IODC). We are at both events to learn about new trends and tools that can make procurement more impactful and most important to connect with open contracting frontiers from around the world.

Open-contracting

---

***That's It for Now, Peeps!***

---

**Let's keep in touch.**

Visit us on [Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#), [Youtube](#), or our [Website](#). You can also ask anything or share your thoughts about Open Government Indonesia by send us an [email](#). Thank you!

Connect with us



**Sekretariat Nasional Open Government Indonesia**

Wisma BSG, 3rd-A Floor,  
Kantor Staf Presiden  
Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta, 10160

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

---

This email was sent to austenyta12@gmail.com

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

Open Government Indonesia · Wisma BSG, [Jalan Abdul Muis No.40, RW.8, Petojo Selatan, Gambir](#) · [Jakarta Pusat 10160](#) ·  
Indonesia





Austenyta Sola Gracia &lt;austenyta12@gmail.com&gt;

---

**OGI Timeline [October-2018]**

1 message

---

**Open Government** <contact@opengovindonesia.org>  
Reply-To: Open Government <contact@opengovindonesia.org>  
To: austenyta12@gmail.com

Wed, Oct 31, 2018 at 5:32 PM



---

***WHAT OGI HAS READ AND EXPLORED THIS MONTH***

---

**NATIONAL**

---

**Pertemuan Finalisasi Rencana Aksi OGI dan Persiapan Delegasi OGP**



Sebagai bentuk ko-kreasi yang menjadi prasyarat pelaksanaan Open Government, pada 23 Oktober 2018, Sekretariat OGI menyelenggarakan pertemuan finalisasi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 di Hotel Cemara. Tujuan penyelenggaraan acara ini adalah untuk mendapatkan masukan akhir dari Kementerian/Lembaga maupun CSO terhadap draft Renaksi OGI. Pada hari yang sama pula diselenggarakan pertemuan pembekalan delegasi Indonesia untuk kegiatan Open Government Asia-Pacific Regional Meeting 2018. Di dalamnya dijelaskan mengenai informasi terkait susunan acara dan berbagai persiapan yang dibutuhkan pada saat pertemuan regional berlangsung.

#### Fourth High-Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing 2018 Nusa Dua, Bali



Sebagai bentuk ko-kreasi yang menjadi prasyarat pelaksanaan Open Government, pada 23 Oktober 2018, Sekretariat OGI menyelenggarakan pertemuan finalisasi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 di Hotel Cemara. Tujuan penyelenggaraan acara ini adalah untuk mendapatkan masukan akhir dari Kementerian/Lembaga maupun CSO terhadap draft Renaksi OGI. Pada hari yang sama pula diselenggarakan pertemuan pembekalan delegasi Indonesia untuk kegiatan Open Government Asia-Pacific Regional Meeting 2018. Di dalamnya dijelaskan mengenai informasi terkait susunan acara dan berbagai persiapan yang dibutuhkan pada saat pertemuan regional berlangsung.

## [Yuk Intip Kegiatan OGI Talk, Sebuah Talkshow Virtual untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat demi Pemerintahan yang Lebih Terbuka](#)

Partisipasi publik dewasa ini memiliki pengaruh yang cukup penting, khususnya pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mendorong pemerintahan yang lebih partisipatif, terbuka, transparan, akuntabel, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) berinisiatif untuk menyelenggarakan diskusi virtual melalui media Twitter. Diskusi tersebut bertajuk Live Tweet OGI Talk.

## [Kabupaten Jember Mengadopsi Praktik Open Government untuk Percepatan SDGs](#)

Pemerintah Kabupaten Jember bersama INFID, Migrant Care dan Medialink sebagai perwakilan dari masyarakat sipil menyelenggarakan lokakarya dan diskusi yang bertajuk “Mengonsolidasikan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Open Government Partnership di Kabupaten Jember.” Tujuan dari acara ini adalah untuk mendorong komitmen Kabupaten Jember agar melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs dalam kerangka Open Government.

## [Menteri PPN: Cegah Korupsi dengan Pemerintah Terbuka](#)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan komitmen Indonesia dalam mencegah korupsi melalui implementasi open government. Ini dia sampaikan saat menghadiri the 18th International Anti-Corruption Conference (IACC) yang berlangsung di Kopenhagen, Denmark pada Senin (22/10/2018)

## [Demi Pelayanan, Pemkab Kulonprogo perkuat Open Government Partnership](#)

Pemkab Kulonprogo berupaya meningkatkan performa pemerintahan dengan cara mendorong partisipasi warga dan memperbesar daya tanggap pemerintah kepada warga. Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo, mengungkapkan untuk mewujudkan hal tersebut Pemkab menggelar workshop Penguatan Pelaksanaan Open Government Partnership (OGP), Rabu (17/10/2018). Terdapat lima garis tegas dalam OGP di Kulonprogo, antara lain integritas dan etika, transparansi, akuntabilitas, layanan publik dan satu data.

---

## INTERNATIONAL

### [Building a Peaceful and Safer World through Collective Action in the Fight Against Corruption](#)

Over the last year, political rights and civil liberties around the world have experienced a general deterioration.

The rise of populism, misinformation, attacks on civil society, and illicit money in politics have fueled this decline to a point that they now threaten the very foundations of democracy in countries around the world. A common thread running through these trends are new and old forms of corruption, which enable the misallocation of public funds and concentration of power to repress the voices of many for the benefit of the few. As a result, we are seeing increased insecurity, threats to social and economic development, and deepening inequalities among citizens around the world - with the most vulnerable being the most affected

### [Canada Begins Its Year of Leading the International Open Government Partnership](#)

The Honourable Scott Brison, President of the Treasury Board and Minister of Digital Government, announced today the start of Canada's one-year co-chairship of the Open Government Partnership. The Government of Canada will be sharing the leadership of the organization's Steering Committee with civil society partner, Nathaniel Heller, Executive Vice President of Results for Development. The co-chairship will focus on initiatives built on Canada's ambitious leadership priorities for open government: Inclusion; Participation; and Impact. These themes are aimed at empowering underrepresented citizens of every gender, race and sexual orientation to actively engage with their governments.

### [Municipal governments begin to see the benefits of open government tools](#)

More than 50 representatives from municipal governments responsible for digital public procurement from across the emerging Europe region have met in the Moldovan capital Chişinău to explore and discuss the opportunities to improve public spending using open government tools.

---

***That's It for Now, Peeps!***

---

## Let's keep in touch.

Visit us on [Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#), [Youtube](#), or our [Website](#). You can also ask anything or share your thoughts about Open Government Indonesia by send us an [email](#). Thank you!

Connect with us



### **Sekretariat Nasional Open Government Indonesia**

Wisma BSG, 3rd-A Floor,  
Kantor Staf Presiden  
Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta, 10160

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

---

This email was sent to austenya12@gmail.com

*why did I get this?* [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

Open Government Indonesia · Wisma BSG, [Jalan Abdul Muis No.40, RW.8, Petojo Selatan, Gambir](#) · [Jakarta Pusat 10160](#) · [Indonesia](#)







Austenyta Sola Gracia <austenyta12@gmail.com>

---

## OGI Timeline [November-2018]

1 message

---

**Open Government** <contact@opengovindonesia.org>  
Reply-To: Open Government <contact@opengovindonesia.org>  
To: austenyta12@gmail.com

Fri, Nov 30, 2018 at 3:29 PM



---

### *WHAT OGI HAS READ AND EXPLORED THIS MONTH*

---

#### **NATIONAL**

---

**Delegasi Indonesia di OGP Regional Meeting Korea 2018**



### Mendorong Open Policy-Making Yang Inklusif di Indonesia

Proses pembuatan kebijakan yang inklusif, terbuka dan partisipatif menjadi agenda penting di era demokrasi. Pemerintah tidak bisa lagi menutup diri sebagai pemilik tunggal otoritas dalam pengelolaan pemerintahan. Suasana itu pula yang dirasakan hari ini ketika kekuatan otoritas terdistribusi ke berbagai institusi maupun individu yang berpengaruh. Oleh karena itu, negara wajib membuka diri dengan melibatkan publik dalam berbagai *policy-making process*. Hal ini sejalan pula dengan negara-negara lain yang menjalankan reformasi administrasi publik di era demokrasi.

## Pemilu Terbuka Tingkatkan Kualitas Partisipasi dalam Demokrasi

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tuntas dengan baik menyelenggarakan sebuah sesi diskusi bertema “Pemilu Terbuka dan Kualitas Demokrasi Partisipatif” yang digelar di Hotel Westin Chosun, Seoul, Korea (6/11). Diskusi ini adalah salah satu sesi dalam Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific Regional Meeting. Sesi ini mendiskusikan inisiatif-inisiatif digital soal pemilu terbuka yang muncul dari kolaborasi aktif antara pemerintah–khususnya penyelenggara pemilu–dan masyarakat sipil. Dalam diskusi ini, Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, membagi cerita tentang inisiatif API (Application Programming Interface) Pemilu, sebuah platform yang menyediakan data-data pemilu dalam format data terbuka.

## Overview - Indonesia Mid-Term Report 2016-2017 (Year 1)

Indonesia’s fourth action plan focused on improving public participation, complaints-handling, public information disclosure, and data governance. While the action plan touched on major open government themes for Indonesia, many commitments involved internal performance indicators. Moving forward, Indonesia should more closely follow OGP’s co-creation standards in developing the next action plan by prioritizing fewer, more impactful commitments and institutionalizing the multistakeholder forum. Indonesia should also develop a clear strategy to more effectively incorporate subnational units into the national action plan.

## Geger Laskar Pemburu Perempuan Hamil di Banyuwangi

Program menekan angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten **Banyuwangi**, Jawa Timur, berhasil mencuri perhatian di forum Open Government Partnership (OGP) Asia-Pacific Regional Meeting di Seoul, Korea Selatan. Adalah program pembentukan “Laskar Stop Angka Kematian Ibu dan Anak (SAKINA)” dari Puskesmas Sempu, Banyuwangi, yang dinobatkan sebagai “The Most Interested Innovation” dalam forum yang diikuti inovator dari 79 negara di wilayah Asia-Pasifik, termasuk dari Indonesia yang diwakili oleh Banyuwangi.

## Menpan RB Bahas Inovasi Berbagai Negara dalam Forum Open Government

### Partnership

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menghadiri Open Government Partnership, Rabu (6/11/2018). Forum diskusi tersebut dihadiri banyak negara untuk membicarakan inovasi-inovasi yang sedang berkembang di negara masing-masing. Syafruddin mengungkapkan, akan mengimplementasikan Open Government Service dan International Publish Service di tatanan pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan layanan pemerintahan terbuka sekaligus publish service yang baik agar masyarakat dapat terlayani dengan puas dan baik pula.

### Wujudkan Smart City Melalui Web Desa

Guna mewujudkan smart city, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus melakukan inovasi, khususnya dalam bidang Information and Communication Technologies (ICT), salah satunya melalui website desa. "Melalui web desa ini, masyarakat bisa mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa masing-masing. Web desa ini juga merupakan salah satu upaya pemkab dalam mewujudkan smart city di Kabupaten Bandung," ungkap Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung Atih Wiratih usai menghadiri acara Sabilulungan Festival Teknologi Informasi dan Komunikasi (Safetik) di Gedong Budaya Sabilulungan Soreang, Senin (26/11/2018). Web desa tersebut, lanjut Kadiskominfo memiliki dua fungsi yakni, sebagai keterbukaan informasi dan pelayanan publik.

---

## **INTERNATIONAL**

### Exclusive: Inside Indonesia's Plans to Fix Corruption and Inequality

Indonesia's four richest people own as much wealth as its poorest 100 million citizens, while its poorest 10% live on as little as 76 cents a day, the Central Bureau of Statistics reported in March 2018. To try to address this rising problem, President Joko Widodo has issued policy mandates to fight corruption and inequality in the country. In an exclusive interview, the Minister discusses how Indonesia is turning to data and tech to cut corruption and improve food security; and find new sources of growth.

## Unhappy Anniversary: U.S. Withdrawal from the Extractives Industries

### Transparency Initiative, one year later

When the United States withdrew as an implementing country from the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) one year ago this month, it did not garner the same attention as the Trump administration's decisions to withdraw from the Paris climate agreement, the Iran nuclear deal, or the UN Human Rights Council. However, it was still deeply disturbing for all those who care about fighting against corruption in natural resource extraction. The concern among transparency advocates was that the U.S. exit from this global multistakeholder organization dedicated to ensuring accountability could have, among other things, created a domino effect—weakening the EITI and the fight for good governance of the sector more generally. Fortunately, one year later, that has not happened. Others have stepped forward to help lead the fight and continue momentum, even while the U.S. vanguard role is sorely missed.

## Corporations Risking 'Serious Corruption' by Failing to Disclose Political

### Engagement, Researchers Say

Campaign group Transparency International's 2018 Corporate Political Engagement Index assessed 104 international businesses on their openness with political engagement in Britain. The index looked into areas such as donations to political parties and lobbying of those in power. Researchers found that almost 75 percent of firms were failing to adequately disclose how they engaged with politicians. Four in five companies had poor standards in disclosing their lobbying of politicians, while a quarter had no public information available on their political involvement.

---

***That's It for Now, Peeps!***

---

### **Let's keep in touch.**

Visit us on [Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#), [Youtube](#), or our [Website](#). You can also ask anything or share your thoughts about Open Government Indonesia by send us an [email](#). Thank you!

Connect with us



**Sekretariat Nasional Open Government Indonesia**

Wisma BSG, 3rd-A Floor,  
Kantor Staf Presiden  
Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta, 10160

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

---

This email was sent to austenya12@gmail.com

*why did I get this?* [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

Open Government Indonesia · Wisma BSG, Jalan Abdul Muis No.40, RW.8, Petojo Selatan, Gambir · Jakarta Pusat 10160 · Indonesia





Austenyta Sola Gracia <austenyta12@gmail.com>

---

## OGI Timeline [December-2018]

1 message

---

**Open Government** <contact@opengovindonesia.org>  
Reply-To: Open Government <contact@opengovindonesia.org>  
To: austenyta12@gmail.com

Wed, Jan 2, 2019 at 3:30 PM



---

### ***WHAT OGI HAS READ AND EXPLORED THIS MONTH***

---

#### **NATIONAL**

---



## **Bersama Masyarakat Sipil Memperkuat Gerakan**

### **Keterbukaan Pemerintah**

Selama 7 tahun sejak Indonesia ikut memprakarsai inisiatif global Open Government, kelompok masyarakat sipil telah membantu mewujudkan ko-kreasi antara Pemerintah dengan masyarakat yang merupakan salah satu nilai yang diusung untuk mendorong keterbukaan di unsur eksekutif. Untuk terus mewujudkan hal tersebut, Medialink selaku Ketua Sekretariat Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) di Indonesia mengadakan pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Hotel Millenium, Jakarta Pusat pada 12-13 Desember 2018 lalu.

## OGI Talk: Selebrasi Pemilu Serentak 2019 Melalui Keterbukaan

### Data

Menyambut pemilihan umum serentak tahun 2019 yang cukup dinantikan, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) kembali mengadakan program Live Tweet OGI Talk pada hari Senin (3/12) lalu, pukul 17.00 s.d 18.30 WIB. Tema yang diangkat pada kesempatan tersebut adalah "Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

## Keterbukaan dan Transparansi Pengelolaan Perikanan

### Harus Disosialisasikan

Seluruh stakeholder perikanan Indonesia terutama para nelayan mesti memahami 12 Standar Keterbukaan dan Tranparansi Pengelolaan Perikanan. Ini terkait upaya Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendorong pemerintah menerapkan 12 Standar Keterbukaan dan Transparansi Pengelolaan Perikanan.

## Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta

Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional 2018 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Selasa, 11 Desember 2018. Pembangunan infrastruktur selama ini ada satu permasalahan yang menonjol, yaitu tumpang tindih pemanfaatan lahan. Saat ini, total 85 peta tematik yang belum selesai tinggal peta rencana tata ruang laut nasional dan peta batas administrasi desa dan kelurahan.

---

## **INTERNATIONAL**

## **Star Reforms in The Open Government Partnership (Second Edition, 2018)**

This guide showcases a selection of twelve commitments from OGP action plans that the OGP Independent Reporting Mechanism (IRM) awarded “star” status in its latest cycle of reports. These twelve star commitments were picked because they have shown evidence of early results, representing major steps forward in relevant policy areas and transforming “business as usual.”

## **Open Government Partnership Global Summit 2019**

Canada will be hosting the Open Government Partnership (OGP) Global Summit in Ottawa from May 29-31, 2019. Academics, civil society, governments and citizens from Canada and around the world will have the opportunity to shape the global open government movement. From keynotes to debates and co-creation opportunities, the summit will explore the future of open government and help drive action.

## **EDITORIAL: Time for Transparency in Collective Bargaining**

It’s an integral tenet of a healthy democracy that taxpayers have a right to see how the public sector spends their money. That’s the idea behind Nevada statutes promoting open government. But there’s one important area where taxpayers remain in the dark – collective bargaining. Taxpayers may see the contracts, but only after union and government officials have held closed-door meetings to determine what will be in them.

## The Yellow Vests movement and The Urge to Update

### Democracy

In its last National Action Plan, France committed to 21 engagements for a more transparent and collaborative government. The Yellow Vests movement proves (once again) that it is urgent to implement our engagements with the Open Government Partnership to improve the Government's accountability to citizens, empower citizens as active stakeholders and public decision participants, and provide better services to users.

---

***That's It for Now, Peeps!***

---

### **Let's keep in touch.**

Visit us on [Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#), [Youtube](#), or our [Website](#). You can also ask anything or share your thoughts about Open Government Indonesia by send us an [email](#). Thank you!

Connect with us



### **Sekretariat Nasional Open Government Indonesia**

Wisma BSG, 3rd-A Floor,  
Kantor Staf Presiden  
Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta, 10160

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

---

This email was sent to austenyta12@gmail.com

*why did I get this?* [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

Open Government Indonesia · Wisma BSG, [Jalan Abdul Muis No.40, RW.8, Petojo Selatan, Gambir](#) · [Jakarta Pusat 10160](#) · [Indonesia](#)





# LAMPIRAN VII

Dokumentasi Kegiatan OGI

Lampiran VII

# DOKUMENTASI KEGIATAN OPEN GOVERNMENT INDONESIA

*Open Government Week(Jakarta) 090518*



*Open Government Week(Yogyakarta) 090518*



**Open Government Week(Pontianak) 090518**



**Open Government Week(Solok) 090518**



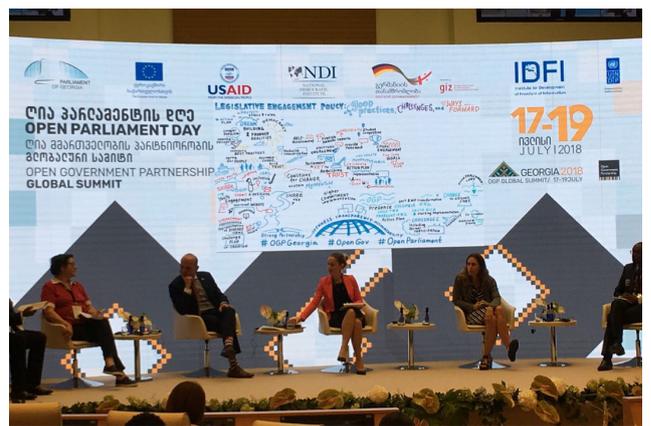
**Open Government Week(Wonosobo) 090518**



**Technical Meeting OGP Global Summit Georgia di Bappenas 040718**



**OGP Global Summit Georgia 17-190718**



**OGP Global Summit Georgia Youth Talk di Cocowork, JSC Hive-Jakarta 180718**



**Kick Off Rencana Aksi OGI 2018/2020 070818**



**Launching Open Parliament Indonesia 290818**



**Bilateral Meeting di Bappenas 0918**



**Pertemuan Finalisasi Rencana Aksi OGI 0918**



**Pertemuan dengan Komisi Informasi Pusat di KSP 031018**



**Pertemuan dengan Kemenkes 081018**



## Workshop SDGs di Jember 111018



## Pertemuan Konsultasi dengan Kemendagri di Depok 121018



**Wawancara Konten Video Open Parliament Bersama Fadli Zon 181018**



**Technical Meeting OGP Asia-Pacific Regional Meeting Seoul 231018**



**OGP Asia-Pacific Regional Meeting, Seoul South Korea 051118**



### Pertemuan dengan EITI di KSP 091118



### Diskusi NPD Banten 121118



### Bandung Open Contracting Expo 221118



Talkshow SDGs di Makassar 271118



Pertemuan Nasional CSOs di Jakarta 121218





2019